



RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 - 2028

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

PULAU PUNJUNG 2024



KATA PENGANTAR

Sebagai upaya melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 5 dan 6 agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penyusunan Dokumen dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dharmasraya bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan upaya penanggulangan bencana.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dharmasraya merupakan rencana kerja penanggulangan bencana di Kabupaten Dharmasraya. Dokumen ini bersifat komprehensif yang memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak pra-bencana hingga pasca bencana. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak dan alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Substansi tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Dharmasraya.

Tim Penyusun berharap agar dokumen yang dihasilkan dapat membantu implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, lebih terarah, dan lebih terintegrasi sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Dharmasraya dalam penanggulangan Bencana.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
BAB 1. Pendahuluan	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Maksud dan Tujuan	10
1.3. Ruang Lingkup	11
1.4. Landasan Hukum	11
1.5. Pengertian	12
1.6. Sistematika	15
BAB 2. Gambaran Umum Wilayah.....	16
2.1. Kondisi Fisik	16
2.1.1. Kondisi Geografis.....	16
2.1.2. Topografi dan Kelerengan	17
2.1.3. Geomorfologi.....	19
2.1.4. Hidrologi.....	20
2.1.5. Klimatologi	21
2.1.6. Jenis Tanah	22
2.1.7. Geologi.....	25
2.1.8. Hidrogeologi	27
2.2. Aspek Pelayanan Umum.....	28
2.2.1. Fasilitas Pendidikan	28
2.2.2. Fasilitas Kesehatan.....	30
2.2.3. Fasilitas Peribadatan.....	31
2.2.4. Fasilitas Prasarana Jalan.....	32
2.2.5. Wilayah Rawan Bencana.....	35
2.2.5.1. Potensi Gerakan Tanah/Longsor	36
2.2.5.2. Bencana Banjir.....	40
2.3. Kondisi Demografis.....	45
2.3.1. Perkembangan Penduduk	45
2.3.2. Kepadatan Penduduk.....	45
2.3.3. Rasio Penduduk.....	47
2.4. Kondisi Sosial Ekonomi	48
2.4.1. Kondisi Sosial.....	48
2.4.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	48
2.4.1.2. Usia Harapan Hidup (UHH).....	49
2.4.1.3. Harapan Lama Sekolah.....	50
2.4.2. Kondisi Ekonomi.....	50
2.4.2.1. Pertumbuhan PDRB	50
2.4.2.2. PDRB perkapita.....	51
2.4.2.3. Tingkat kemiskinan	52
2.4.2.4. Rasio Gini.....	53
2.4.2.5. Tingkat Inflasi.....	54
2.5. Sejarah Kejadian Bencana.....	55
2.5.1. Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Dharmasraya.....	55
2.5.2. Potensi Bencana di Kabupaten Dharmasraya.....	56
BAB 3. Penilaian Risiko Bencana.....	57
3.1. Ancaman	57

3.1.1.	Ancaman Bencana Banjir	57
3.1.2.	Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	58
3.1.3.	Ancaman Bencana Banjir Bandang.....	60
3.1.4.	Ancaman Bencana Tanah Longsor.....	61
3.1.5.	Ancaman Bencana Kekeringan	62
3.1.6.	Ancaman Bencana Cuaca Ekstrem.....	63
3.1.7.	Rekapitulasi Bahaya.....	64
3.2.	Kerentanan	64
3.2.1.	Kerentanan terhadap Bencana Banjir	65
3.2.2.	Kerentanan terhadap Bencana Banjir Bandang	67
3.2.3.	Kerentanan terhadap Bencana Tanah Longsor.....	68
3.2.4.	Kerentanan terhadap Bencana Kekeringan.....	70
3.2.5.	Kerentanan terhadap Bencana Cuaca Ekstrem	72
3.2.6.	Kerentanan terhadap Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	74
3.3.	Kapasitas.....	75
3.4.	Risiko	77
3.4.1.	Risiko Banjir.....	77
3.4.2.	Risiko Banjir Bandang.....	79
3.4.3.	Risiko Tanah Longsor	81
3.4.4.	Risiko Kekeringan.....	83
3.4.5.	Risiko Cuaca Ekstrem.....	85
3.4.6.	Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	87
3.5.	Penentuan Bencana Prioritas (Sumber Dokumen Kajian Risiko Bencana).....	89
BAB 4.	Pilihan Tindakan Penanggulangan Bencana	92
4.1.	Tindakan Tahap Pra Bencana.....	93
4.1.1.	Tindakan Pra Bencana.....	93
4.1.2.	Tindakan Pencegahan dan Mitigasi	94
4.1.3.	Tindakan Kesiapsiagaan.....	94
4.2.	Tindakan Tahap Saat Bencana	94
4.2.1.	Tindakan Saat Bencana.....	95
4.2.2.	Tindakan Tanggap Darurat.....	95
4.3.	Tahap Pasca Bencana.....	96
4.3.1.	Rekonstruksi.....	96
4.3.2.	Rehabilitasi	97
4.3.3.	Pemulihan	97
BAB 5.	Mekanisme Penanggulangan Bencana.....	98
5.1.	Kebijakan Penanggulangan Bencana.....	98
5.1.1.	Keterkaitan Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Dharmasraya	98
5.1.2.	Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Dharmasraya.....	98
5.1.3.	Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kabupaten Dharmasraya	98
5.2.	Mekanisme Penanggulangan Bencana Secara Umum	99
5.2.1.	Mekanisme Penanggulangan Bencana Tahap Pra Bencana	99
5.2.2.	Mekanisme Penanggulangan Bencana Tahap Saat Bencana	100
5.2.2.1.	Pengkajian secara Cepat dan Tepat terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian, dan Sumber Daya	101
5.2.2.2.	Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana	101
5.2.2.3.	Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat terkena Bencana;.....	102
5.2.2.4.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar.....	102
5.2.2.5.	Perlindungan terhadap Kelompok Rentan.....	103
5.2.2.6.	Pemulihan dengan segera Prasarana dan Sarana Vital.....	103
5.2.3.	Mekanisme Penanggulangan Bencana Tahap Pasca Bencana.....	103
BAB 6.	Alokasi Tugas dan Sumberdaya	104

6.1.	Kegiatan Yang Dilakukan.....	104
6.1.1.	Rencana Aksi Program Penanggulangan Bencana	104
6.1.1.1.	Banjir.....	108
6.2.	Pelaku Kegiatan	109
6.2.1.	Identifikasi Pelaku Kegiatan.....	109
6.2.1.1.	Pemerintah.....	109
6.2.1.2.	Media massa.....	110
6.2.1.3.	Lembaga non pemerintah	110
6.2.1.4.	Perguruan tinggi	110
6.2.1.5.	Pelaku bisnis.....	111
6.2.2.	Pembagian Peran.....	111
6.2.2.1.	Pemerintah.....	111
6.2.2.2.	Media massa.....	112
6.2.3.	Lembaga non pemerintah	112
6.2.3.1.	Perguruan tinggi	112
6.2.3.2.	Pelaku bisnis.....	113
6.3.	Sumber Pendanaan	113
6.3.1.	Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	113
6.3.2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.....	114
6.3.3.	Penggunaan Dana	116
6.4.	Monitoring dan Evaluasi.....	116
6.4.1.	Pengawasan dan Evaluasi	116
6.4.2.	Pelaporan	116
6.4.3.	Mekanisme Pembaruan	117
BAB 7.	Penutup.....	118
	Daftar Pustaka	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya.....	17
Gambar 2-2 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya	18
Gambar 2-3 Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya	18
Gambar 2-4 Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya.....	20
Gambar 2-5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya	24
Gambar 2-6 Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya	26
Gambar 2-7 Jenis Permukaan Jalan	33
Gambar 2-8 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	34
Gambar 2-9 Peta Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Dharmasraya	38
Gambar 2-10 Peta Overlay Rencana Pusat Permukiman Terhadap Rawan Bencana Gerakan Tanah	39
Gambar 2-11 Peta Overlay Rencana Jaringan Jalan Terhadap Rawan Bencana Gerakan Tanah.....	39
Gambar 2-12 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya.....	41
Gambar 2-13 Peta Overlay Rencana Pusat Permukiman Terhadap Rawan Bencana Banjir	43
Gambar 2-14 Peta Overlay Rencana Pusat Permukiman Terhadap Rawan Bencana Banjir	44
Gambar 2-15 Peta Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya	44
Gambar 2-16 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan.....	46
Gambar 2-17 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	47
Gambar 2-18 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2023 (indeks).....	48
Gambar 2-19 Usia Harapan Hidup Tahun 2010-2023 (Tahun).....	49
Gambar 2-20 Indeks Pembangunan Gender Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022.....	50
Gambar 2-21 Pertumbuhan PDRB (persen).....	51
Gambar 2-22 PDRB Perkapita (rupiah).....	52
Gambar 2-23 Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2023 (persen)	53
Gambar 2-24 Rasio Gini Tahun 2019-2023 (indeks).....	54
Gambar 3-1 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Dharmasraya.....	76
Gambar 3-2 Peta Kawasan Risiko Banjir.....	77
Gambar 3-3 Peta Kawasan Risiko Banjir Bandang.....	80
Gambar 3-4 Peta Kawasan Rawan Risiko Longsor	83
Gambar 3-5 Peta Kawasan Risiko Kekeringan.....	84
Gambar 3-6 Peta Kawasan Risiko Cuaca Ekstrem	87
Gambar 3-7 Peta Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	89
Gambar 4-1 Kategori Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong	16
Tabel 2-2 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya	17
Tabel 2-3 Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai	20
Tabel 2-4 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya	22
Tabel 2-5 Penyebaran Jenis Tanah	22
Tabel 2-6 Formasi dan Litologi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya	25
Tabel 2-7 Jumlah Fasilitas Pendidikan TK, RA, SD, dan MI di Kabupaten Dharmasraya.....	28
Tabel 2-8 Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SLTP di Kabupaten Dharmasraya.....	29
Tabel 2-9 Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SLTA di Kabupaten Dharmasraya	29
Tabel 2-10 Perguruan Tinggi di Kabupaten Dharmasraya	29
Tabel 2-11 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya	30
Tabel 2-12 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama.....	31
Tabel 2-13 Persentase UPT RSUD Terakreditasi	31
Tabel 2-14 Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Dharmasraya	32
Tabel 2-15 Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Dharmasraya	32
Tabel 2-16 Status Kewenangan Jaringan Jalan dalam per Kecamatan.....	33
Tabel 2-17 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.....	34
Tabel 2-18 Kondisi jaringan Jalan per Kecamatan.....	34
Tabel 2-19 Persentase jembatan dalam Kondisi Baik.....	35
Tabel 2-20 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya.....	37
Tabel 2-21 Bencana Longsor di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dan 2021	37
Tabel 2-22 Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawananan	38
Tabel 2-23 Rekapitulasi Lokasi Genangan di Kecamatan dan Klasifikasi Perkotaan	40
Tabel 2-24 Luas Daerah Risiko Banjir Berdasarkan Tingkat Kerawananan	42
Tabel 2-25 Bencana Banjir Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dan 2022.....	42
Tabel 2-26 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2019-2023.....	45
Tabel 2-27 Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.....	46
Tabel 2-28 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	47
Tabel 2-29 Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota sampel inflasi pada Januari 2024 (persen)	54
Tabel 2-30 Sejarah Kejadian Bencana 2023	56
Tabel 2-31 Potensi Bencana di Kabupaten Dharmasraya	56
Tabel 3-1 Luas Bencana Banjir.....	58
Tabel 3-2 Luas bencana kebakaran hutan dan lahan	59
Tabel 3-3 Luas bencana Banjir Bandang	60
Tabel 3-4 Luas bencana Longsor.....	61
Tabel 3-5 Luas bencana kekeringan	62
Tabel 3-6 Luas bencana Angin Puting Beliung	63
Tabel 3-7 Rekapitulasi bencana	64
Tabel 3-8 Kerentanan bencana banjir	65
Tabel 3-9 Kerugian dan Kerentanan Lingkungan bencana banjir.....	66
Tabel 3-10 Kerentanan Banjir Bandang	67
Tabel 3-11 Kerugian dan Kerentanan Lingkungan Banjir Bandang	68
Tabel 3-12 Kerentanan longsor.....	69
Tabel 3-13 Kerentanan Lingkungan dan Kerugian Longsor.....	70
Tabel 3-14 Kerentanan bencana kekeringan.....	71

Tabel 3-15 Kerugian bencana kekeringan.....	72
Tabel 3-16 Kerentanan bencana Angin Puting Beliung	73
Tabel 3-17 Kerugian Angin Puting Beliung	73
Tabel 3-18 Kerentanan Sosial Bahaya kebakaran hutan dan lahan	74
Tabel 3-19 Kerugian dan Kerentanan Lingkungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	75
Tabel 3-20 Kriteria Kerentanan Banjir (Hektar).....	78
Tabel 3-21 Kerentanan Banjir Berdasarkan Kecamatan (Hektar)	78
Tabel 3-22 Luasan Wilayah Risiko Banjir Bandang (Hektar)	79
Tabel 3-23 Kerentanan Banjir Bandang Berdasarkan Kecamatan (Hektar).....	80
Tabel 3-24 Luasan Wilayah Risiko Longsor.....	82
Tabel 3-25 Kerentanan Longsor Berdasarkan Kecamatan	82
Tabel 3-26 Luasan Wilayah Risiko Kekeringan	84
Tabel 3-27 Kerentanan Kekeringan Berdasarkan Kecamatan	84
Tabel 3-28 Luasan Wilayah Risiko Cuaca Ekstrim.....	86
Tabel 3-29 Kerentanan Cuaca Ekstrim Berdasarkan Kecamatan.....	86
Tabel 3-30 Luasan Wilayah Risiko Cuaca Ekstrim.....	88
Tabel 3-31 Kerentanan Cuaca Ekstrim Berdasarkan Kecamatan.....	88
Tabel 3-32 Matrik Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani.....	90
Tabel 3-33 Matrik Analisa Penentuan Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani.....	90
Tabel 4-1 Masalah Penanggulangan Bencana Tahap Pra Bencana Kabupaten Dharmasraya	93
Tabel 4-2 Masalah Penanggulangan Bencana Tahap Saat Tanggap Darurat Kabupaten Dharmasraya	95
Tabel 4-3 Masalah Penanggulangan Bencana Tahap Pasca Bencana Kabupaten Dharmasraya.....	96
Tabel 6-1 Rencana Aksi.....	105
Tabel 6-2 Sasaran dan Program dalam Pencegahan dan Mitigasi Banjir	108

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen RPB dapat dikategorikan sebagai “master plan” atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPB merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sendiri merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Bab III pasal 8 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi :

- a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memadai.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) juga merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar di tingkat kabupaten/kota dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.

Karakteristik wilayah dengan kerentanan bencana yang ada di Kabupaten Dharmasraya mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan manajemen pengurangan risiko bencana yang lebih terarah, terpadu, dan menyeluruh. Sesuai dengan dokumen KRB Tahun 2022 maka Bencana prioritas yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya karena termasuk dalam risiko tinggi yaitu 1 (satu) bencana termasuk kategori bencana geologi dan 5 (lima) bencana termasuk bencana hidrometeorologi meliputi:

- 1) Tanah Longsor;
- 2) Banjir;
- 3) Kekeringan;
- 4) Angin Puting Beliung (Cuaca Ekstrem);
- 5) Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
- 6) Banjir Bandang.

Untuk bencana yang lain yaitu: 1) Erupsi Gunungapi, 2) Gempa Bumi, dan 3) Pandemi/Epidemi/Wabah prioritasnya lebih rendah karena risikonya masuk kategori rendah dan sedang.

Menghadapi kompleksitas dan potensi bencana yang mengancam masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, maka perlu dilakukan perencanaan terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan semua pihak. Berbagai bencana yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya telah memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam penanggulangan bencana baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana mulai terlihat dalam pengelolaan bantuan bencana pada saat tanggap darurat, rehabilitasi dan

rekonstruksi dengan adanya program-program berbasis masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun penanggulangan bencana yang telah dilakukan selama ini masih meninggalkan beberapa catatan untuk dievaluasi seperti implementasi program dan kegiatan penanggulangan bencana yang belum sistematis dan terencana dengan baik, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program-program terkait penanggulangan bencana.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Dharmasraya adalah untuk menyediakan panduan yang komprehensif dan terstruktur dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah ini. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka, serta langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana.

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Dharmasraya adalah:

1. Meningkatkan Kesiapsiagaan

Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana melalui perencanaan yang matang dan terkoordinasi.

2. Mengurangi Risiko

Mengidentifikasi dan mengurangi risiko bencana melalui berbagai upaya mitigasi yang terencana dan berkelanjutan.

3. Mempercepat Tanggap Darurat

Memastikan respons yang cepat dan efektif saat terjadi bencana, dengan prosedur yang jelas dan sumber daya yang siap digunakan.

4. Mendukung Pemulihan

Menyediakan kerangka kerja untuk pemulihan pasca-bencana yang terkoordinasi, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan.

5. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan

Meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, serta cara-cara untuk melindungi diri dan keluarga.

6. Koordinasi Antar Lembaga

Memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Dengan adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini, diharapkan Kabupaten Dharmasraya dapat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, serta mampu melindungi dan menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dan harta benda masyarakat.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Dharmasraya terbagi atas ruang lingkup Geografis, ruang lingkup tahapan bencana, ruang lingkup tipe bencana dan pola umum penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ruang lingkup geografis dokumen RPB ini meliputi seluruh wilayah administratif yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan lingkup tahapan bencana, Dokumen RPB Kabupaten Dharmasraya mencakup penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 3 tahapan, yaitu pra-bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pascabencana.

Ruang lingkup tipe bencana di dalam RPB ini disesuaikan dengan tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hasil identifikasi dan kajian risiko bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki 6 (enam) potensi bencana, yaitu: Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung), dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dari 6 (enam) jenis potensi bencana yang ada tersebut.

Berdasarkan lingkup pola umum penyelenggaraan penanggulangan bencana, tiga upaya yang tercantum di dalam RPB ini adalah pengurangan tingkat ancaman, pengurangan tingkat kerentanan dan peningkatan kapasitas. Prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Dharmasraya disesuaikan dengan bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah berdasarkan hasil kajian risiko serta masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusunan RPB ini. Secara umum, keberadaan RPB Kabupaten Dharmasraya diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menurunkan risiko bencana yang ada.

Ruang lingkup periode berlaku dokumen RPB adalah dari tahun 2024 sampai Tahun 2029, dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi setiap tahun dan akan dilakukan reviu pada tahun terakhir masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana ini habis yaitu di tahun 2029.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2008 tentang Standar Teknis Pada Standar Layanan Minimal Sub Urusan Bencana;
13. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

1.5. Pengertian

Untuk memahami Rencana Penanggulangan Bencana Kota Surakarta ini, maka disajikan pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bahaya (hazard) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologi, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. Kapasitas (capacity) adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
4. Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
6. Bencana Non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah;
7. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror;
8. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024-2029 yang selanjutnya disebut RPB Kabupaten Dharmasraya adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana Kabupaten Dharmasraya untuk jangka waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029;
9. Penanggulangan bencana (disaster management) adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
11. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun.
12. Rencana Kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Mitigasi fisik (*structure mitigation*) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
18. Mitigasi non-fisik (*non-structure mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
19. Risiko (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
20. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
21. Pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
22. Tanggap darurat (*emergency response*) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana

23. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
24. Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
25. Rekonstruksi (reconstruction) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
26. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
28. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
30. Data dan Informasi Bencana Indonesia selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar. Terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
31. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
32. Kerangka Aksi Hyogo/Hyogo Frameworks for Actions untuk selanjutnya disebut HFA adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana.
33. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
34. Pemulihan (recovery) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
35. Pencegahan (prevention) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
36. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

37. Peringatan dini (early warning) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
38. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
39. Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
40. Sistem penanganan darurat bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
41. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut ZPPB adalah mekanisme penetapan wilayah intervensi teknis pemerintah di tingkat kabupaten.

1.6. Sistematika

Sistematika penulisan dokumen RPB terdiri dari 7 (tujuh) BAB, sebagaimana dijelaskan berikut:

- | | |
|--------|---|
| BAB 1. | PENDAHULUAN |
| BAB 2. | GAMBARAN UMUM WILAYAH |
| BAB 3. | PENILAIAN RISIKO BENCANA |
| BAB 4. | PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA |
| BAB 5. | MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA |
| BAB 6. | ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA |
| BAB 7. | PENUTUP |

BAB 2. GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1. Kondisi Fisik

2.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"- 1°41'40,269" LS dan 101°8'32,52"-101°53'30,166"BT yang berada pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau dan dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

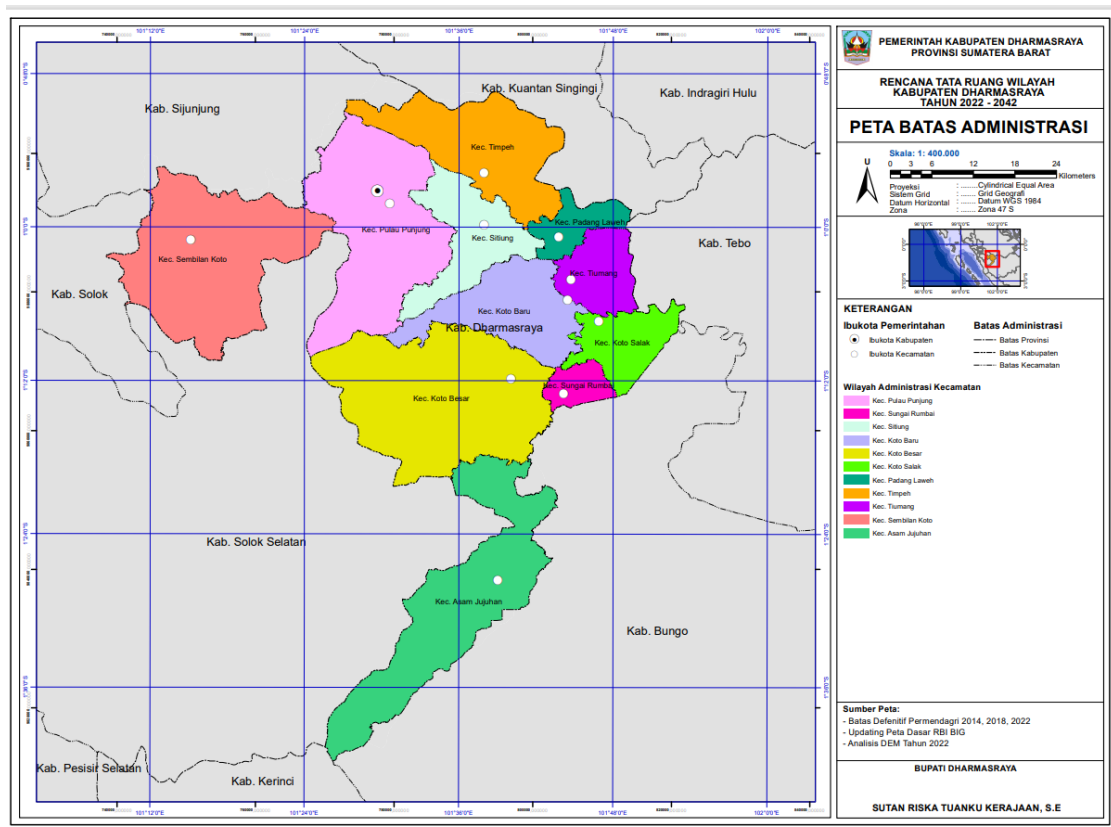
Wilayah Kabupaten Dharmasraya tercatat seluas 292.120 Ha dimana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong.

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Nagari
1	Koto Baru	21,813	4
2	Pulau Punjung	43,835	6
3	Sungai Rumbai	4,950	4
4	Sitiung	18,459	4
5	Sembilan Koto	46,655	4
6	Timpeh	28,711	5
7	Koto Salak	12,212	5
8	Tiumang	11,243	4
9	Padang Laweh	7,184	4
10	Asam Jujuhan	43,280	5
11	Koto Besar	53,780	7
Kab. Dharmasraya		292.120	52

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab. Dharmasraya

Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.2. Topografi dan Kelerengan

Wilayah Kabupaten Dharmasraya secara umum merupakan wilayah perbukitan dan pergunungan dengan kondisi topografi berada pada ketinggian 100-2.600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan ketinggian mulai dari 100 mdpl berada pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, sedangkan ketinggian 2.600 mdpl berada pada kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat.

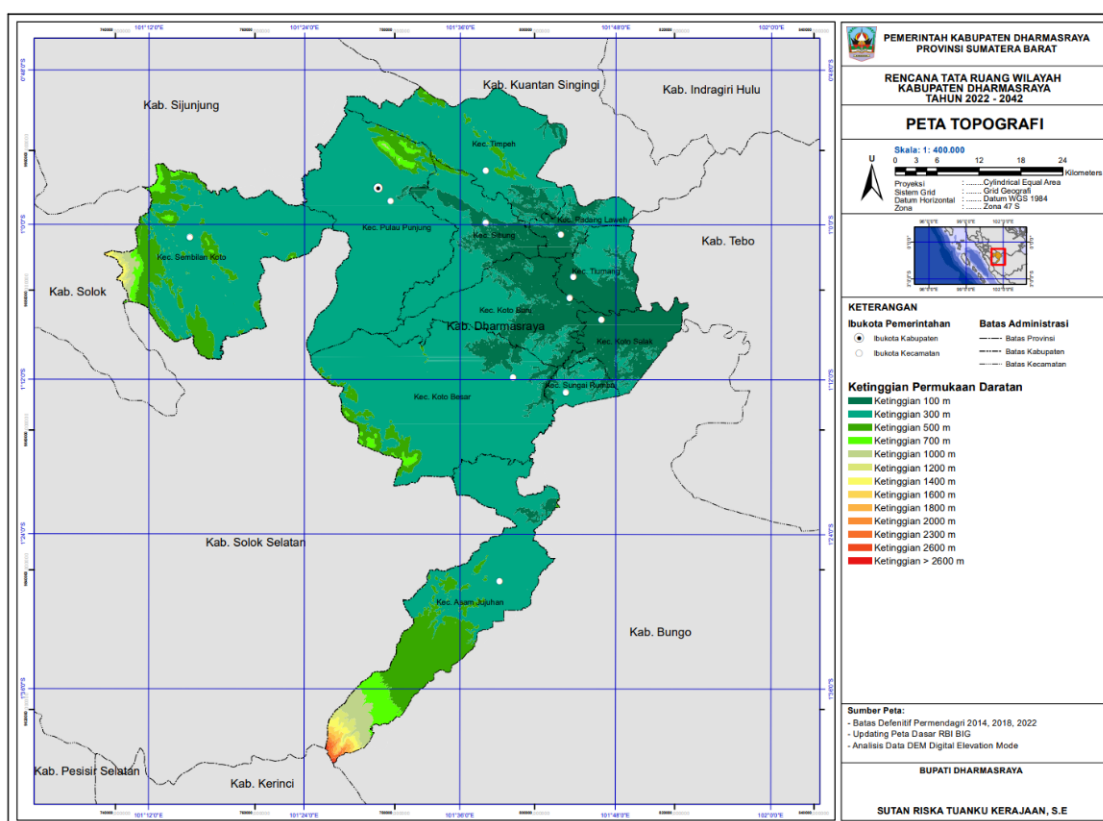
Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017, diperoleh data kelerengan lahan seperti disajikan pada Tabel 2-2, dan Gambar 2-2 dan Gambar 2-3.

Tabel 2-2 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

No	Klasifikasi Kemiringan Lereng	Tingkat Kemiringan	Luas	
			(Ha)	(%)
1	Datar	0 – 2,99 %	74,378	25.46
2	Agak Landai	3 – 7,99 %	134,367	46.00
3	Landai	8 – 14,99 %	35,852	12.27
4	Agak Curam	15 – 24,99 %	22,829	7.82
5	Curam	25 – 45 %	18,663	6.39
6	Sangat Terjal	>45 %	6,031	2.06
Jumlah			292.120	52

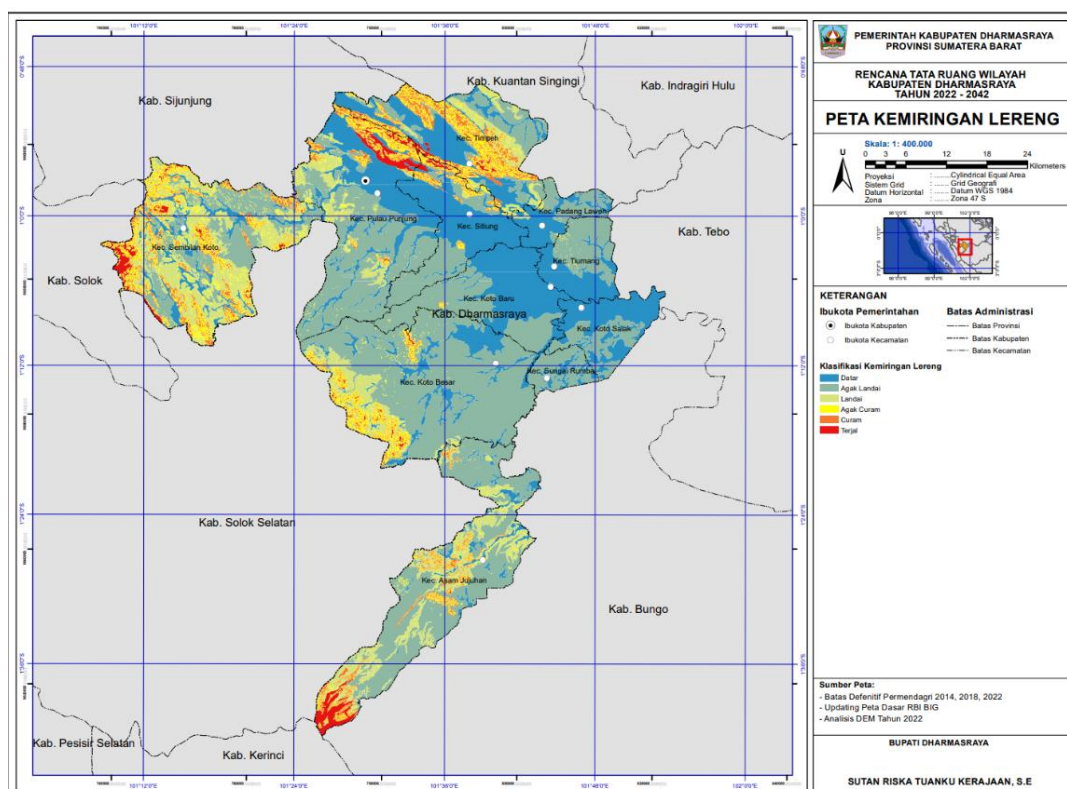
Sumber: Peta RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2-2 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2-3 Peta Kelerenghan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

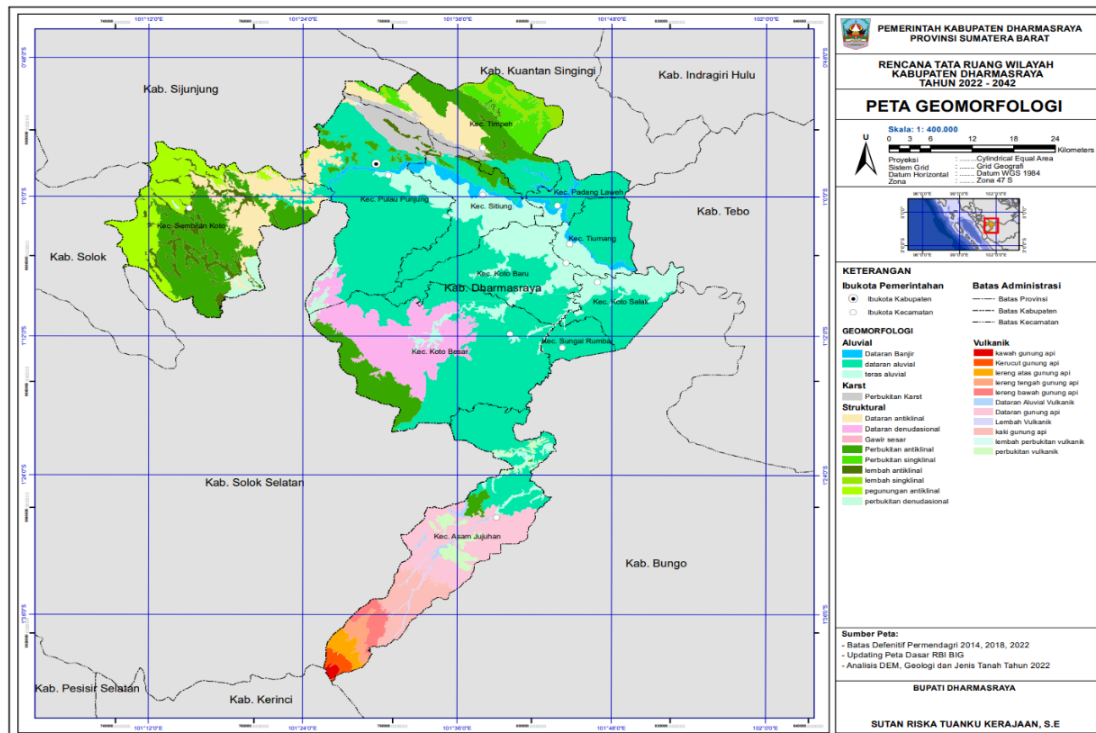
2.1.3. Geomorfologi

Terdapat 5 satuan morfologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- 1) Satuan aluvial
 - a. Jalur Aliran Sungai dengan topografi datar; daerah cekungan dengan topografi datar; dataran antar perbukitan dengan topografi agak landai.
- 2) Satuan dataran
 - a. Teras sungai (teras sungai bawah dengan topografi datar; teras sungai tengah dengan topografi landai; teras sungai atas dengan topografi agak curam)
 - b. Dataran (dataran berombak bergelombang, dataran bergelombang dan dataran perbukitan)
- 3) Satuan perbukitan
 - a. Perbukitan terpisah;
 - b. Perbukitan bergelombang;
 - c. Perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
 - d. Perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
 - e. Perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
 - f. Perbukitan sangat tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
 - g. Perbukitan karst paralel tertoreh
- 4) Satuan Pergunungan
 - a. Pergunungan sangat tertoreh
- 5) Satuan vulkan
 - a. Lereng atas vulkan dengan topografi sangat curam
 - b. Lereng tengah vulkan dengan topografi curam
 - c. Lereng bawah vulkan dengan topografi agak curam
 - d. Dataran vulkan bergelombang dengan topografi landai

Lebih jelasnya geomorfologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2-4 Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.4. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Sungai yang mengalir di Kabupaten Dharmasraya terlihat pada Tabel 2-3.

Tabel 2-3 Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
1	Batang Hari	Pulau Punjung	50,00	90,00	2,75	1,000	Untuk irigasi
2	Sungai Pauh	Pulau Punjung	3,00	4,00	0,50	1,250	
3	Batang Piruko	Pulau Punjung	18,00	20,00	1,00	0,450	Sumber air SPAM Koto Baru
4	Batang Mimpi	Pulau Punjung	10,00	11,00	1,50	0,400	
5	Batang Pangian	Pulau Punjung	8,00	15,00	1,25	0,800	
6	Batang Neli	Pulau Punjung	8,00	6,00	0,80	0,650	Sumber air SPAM Pulau Punjung
7	Batang Lolo	Pulau Punjung	6,00	8,00	1,20	0,500	
8	Sungai Balit	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,40	0,200	
9	Sei. Patapahan	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,30	0,150	
10	Batang Asahan	Pulau Punjung	3,50	3,00	0,35	0,300	
11	Sungai Kamang	Pulau Punjung	5,50	2,50	0,30	0,250	
12	Batang Tandun	Pulau Punjung	6,00	8,00	0,70	0,600	
13	Sungai Lamak	Pulau Punjung	4,00	1,50	0,50	0,300	
14	Batang Palanko	Pulau Punjung	9,00	8,00	0,60	0,300	

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
15	Batang Nyunyo	Pulau Punjung	7,00	6,00	0,75	0,250	
16	Batang Momong	Sembilan Koto	30,00	50,00	0,40	1,200	
17	Batang Siraho	Sembilan Koto	12,00	6,00	1,20	0,800	
18	Batang Silago	Sembilan Koto	9,00	12,00	0,65	1,500	
19	Batang Banai	Sembilan Koto	2,00	2,00	0,60	0,450	
20	Batang Sabilah	Sembilan Koto	2,50	2,50	0,30	1,750	
21	Batang Silikik	Sembilan Koto	2,00	1,75	0,40	0,900	
22	Batang Rambah	Sembilan Koto	3,00	5,00	0,50	0,750	
23	Batang Bakur	Sembilan Koto	5,00	4,00	0,55	0,850	
24	Batang Bugah	Sembilan Koto	16,00	8,00	0,75	0,600	
25	Batang Sipotar	Sembilan Koto	16,00	25,00	0,80	0,700	
26	Batang Singolan	Sembilan Koto	12,00	7,00	0,60	0,500	
27	Sungai Tonang	Sembilan Koto	3,00	3,50	0,50	0,200	
28	Sei. Lubuk Agung	Sitiung	2,40	6,30	0,45	0,113	
29	Sei. Udag	Sitiung	3,75	4,30	0,50	0,225	
30	Sei. Tolu	Sitiung	1,75	2,30	0,45	0,117	
31	Sei. Durian	Sitiung	1,35	1,47	0,48	0,112	
32	Sei. Sariak	Sitiung	4,60	12,70	0,65	0,215	
33	Sei. Tempratur	Timpeh	3,25	10,50	0,55	0,437	
34	Sei. Pinang	Timpeh	1,85	8,50	1,40	0,475	
35	Batang Timpeh	Timpeh	16,00	30,00	1,80	0,535	
36	Air Gemuruh	Timpeh	3,50	3,50	0,60	0,534	
37	Batang Timpeh Usau	Timpeh	7,80	12,50	1,20	0,445	
38	Sei Garingging	Timpeh	6,40	8,70	0,65	0,425	
39	Sei Murai	Timpeh	2,70	2,40	0,55	0,225	
40	Ngalau	Timpeh	2,30	6,80	0,75	0,335	
41	Batang Lodan	Timpeh	0,75	6,50	0,60	0,325	
42	Sarana Baru	Timpeh	3,25	6,50	0,55	0,231	
43	Sei. Kambang Mani	Timpeh	4,25	3,35	0,52	0,117	
44	Sei. Palabi	Timpeh	9,35	6,45	0,48	0,120	
45	Batang Sialang	Koto Baru	3,00	2,50	0,50	0,770	
46	Batang Tarok	Koto Baru	5,00	4,00	1,00	0,500	
47	Sei. Ampang	Koto Baru	6,00	3,50	0,60	0,400	
48	Sei. Cantiang	Padang Laweh	3,50	3,00	0,55	0,320	
49	Sei. Aman	Koto Salak	4,00	3,00	0,75	0,400	
50	Sei. Muai	Koto Besar	5,00	3,00	0,50	0,270	
51	Batang Siat	Koto Besar	28,00	0,50	1,20	0,800	
52	Batang Mata Air	Koto Besar	28,00	3,50	0,38	0,200	
53	Sungai Asam	Koto Besar	3,00	7,50	0,83	0,430	
54	Sungai Jujuhan	Asam Jujuhan	17,00	60,00	2,00	0,653	
55	Sungai Pangian	Asam Jujuhan	5,00	8,50	1,20	0,115	
56	Sungai Batang	Asam Jujuhan	10,00	6,00	1,20	0,510	
57	Sinamar	Asam Jujuhan					
58	Sei. Jernih	Sungai Rumbai	4,00	3,50	0,40	0,250	
59	Sei Telaga	Sungai Rumbai	3,00	2,50	0,55	0,250	
60	Cahaya Murni	Sungai Rumbai	3,50	3,25	0,45	0,300	

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.5. *Klimatologi*

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan

kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

Suhu udara berkisar antara 210C hingga 330C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Curah hujan sebesar 14.684 mm/tahun dengan banyak hari hujan 361.

2.1.6. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya ini terdiri atas 8 jenis tanah yaitu Aluvial, Kambisol, Gleisol, Nitosol, Latosol, Podsolik, Andosol, dan Litosol. Kesetaraan kedelepan jenis tanah tersebut dirinci atas satuan peta tanah (SPT) berdasarkan karakteristik: kelerengan, satuan fisiografi/bentuk wilayah, dan bahan induk tanah seperti terlihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2-4 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya

No	Pusat Penelitian Tanah (1983)	Soil Taxonomy (USDA,1975)	FAO-UNESCO (1974)	Luas	
				Ha	(%)
1	Aluvial	Tropaquepst	Gleysols	29.292	10,03
2	Andosol	Dystrandepts	Andosols	11.003	3,77
3	Gleisol	Tropaquepts	Gleysols	7.833	2,68
4	Kambisol	Dystropepts	Cambisols	127.573	43,67
5	Latosol	Haplorthoxs	Ferralsols	16.107	5,51
6	Litosol	Troporthents	Lithosols	2.411	0,83
7	Nitosol	Paleudults	Nitosols	92.543	31,68
8	Podsolik	Tropudults	Acrisols	5.358	1,83
Total				292.120	100

Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983) dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Tabel 2-5 Penyebaran Jenis Tanah

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas SPT (ha)	(%)
1	Aluvial	0-3	Jalur Aliran/Bekas Jalur Aliran Sungai	Endapan Liat, Pasir atau campurannya	1	22.393	7,60
2	Andosol	15-25	Lereng Bawah Volkan Agak Tertoreh	Abu Volkan dan Batuan Andesit	43	2.571	0,90
3	Andosol	25-40	Lereng Tengah Volkan Tertoreh	Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, breksi.	42	4.527	1,50
4	Andosol	>40	Lereng atas Volkan Agak tertoreh	Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, dan breksi.	41	3.371	1,10
5	Gleisol	3-8	Daerah Cekungan	Bahan Eluvio-Koluvium dari tufa masam	3	8.104	2,80
6	Kambisol	0-3	Teras Sungai Bagian Bawah	Bahan Endapan Aluvium (Liat)	10	19.981	6,80
7	Kambisol	3-8	Dataran antar perbukitan (Datar)	Bahan Aluvio-Koluvium (Liat)	2	10.052	3,40
8	Kambisol	3-8	Teras Sungai Bagian Bawah	Bahan Endapan Aluvium (Liat)	11	4.227	1,40
9	Kambisol	3-8	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	35	1.528	0,50
10	Kambisol	8-15	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	17	7.009	2,70

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas SPT (ha)	(%)
11	Kambisol	8-15	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	21	10.059	3,40
12	Kambisol	15-25	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	18,19	10.345	3,50
13	Kambisol	15-25	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	22	3.661	1,20
14	Kambisol	15-25	Dataran Vulkan (Bergelombang)	Tuf dan Batu Apung serta Batuan Andesit.	44	34.117	11,60
15	Kambisol	25-40	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	20	5.771	2,00
16	Kambisol	25-40	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	23	2.869	1,00
17	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	28	1.248	0,40
18	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	29	4.512	1,50
19	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	30	612	0,20
20	Kambisol	25-40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	36	4.034	1,40
21	Kambisol	>40	Perbukitan terpisah	Kompleks Batuan sedimen, metamorf (shale, slate) dan granit.	15	2.130	0,70
22	Kambisol	>40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	31	4.661	1,60
23	Kambisol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	37,38	5.610	1,90
24	Latosol	3-8	Teras Sungai Bagian Atas	Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Kolumium (Liat)	13	12.278	4,20
25	Latosol	15-25	Teras Sungai Bagian Atas	Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Kolumium (Liat)	14	4.361	1,50
26	Litosol	>40	Perbukitan Karst Paralel Tertoreh	Batu Kapur	47	2.420	0,80
27	Nitosol	3-8	Teras Sungai Bagian Tengah	Bahan Aluvio-Kolumium (Liat)	12	7.759	2,60
28	Nitosol	8-15	Dataran berombak bergelombang	Tufa Masam	4,5a,6a	22.160	7,60
29	Nitosol	8-15	Dataran Bergelombang	Tufa Masam	7,8	13.003	4,50
30	Nitosol	8-15	Dataran Perbukitan (Hillock)	Batuan Granit	9	2.687	0,90
31	Nitosol	15-25	Dataran berombak bergelombang	Tufa Masam	5b,6b	16.192	5,50
32	Nitosol	15-25	Perbukitan Bergelombang	Batuan Granit	16	4.490	1,50
33	Nitosol	15-25	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	24,25,26	10.873	3,70
34	Nitosol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	27	3.579	1,30
35	Nitosol	25-40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate)	39	2.843	1,00
36	Nitosol	>40	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	32	6.158	2,10
37	Nitosol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Batuan Granit	33	1.222	0,40
38	Nitosol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate)	40	2.442	0,80

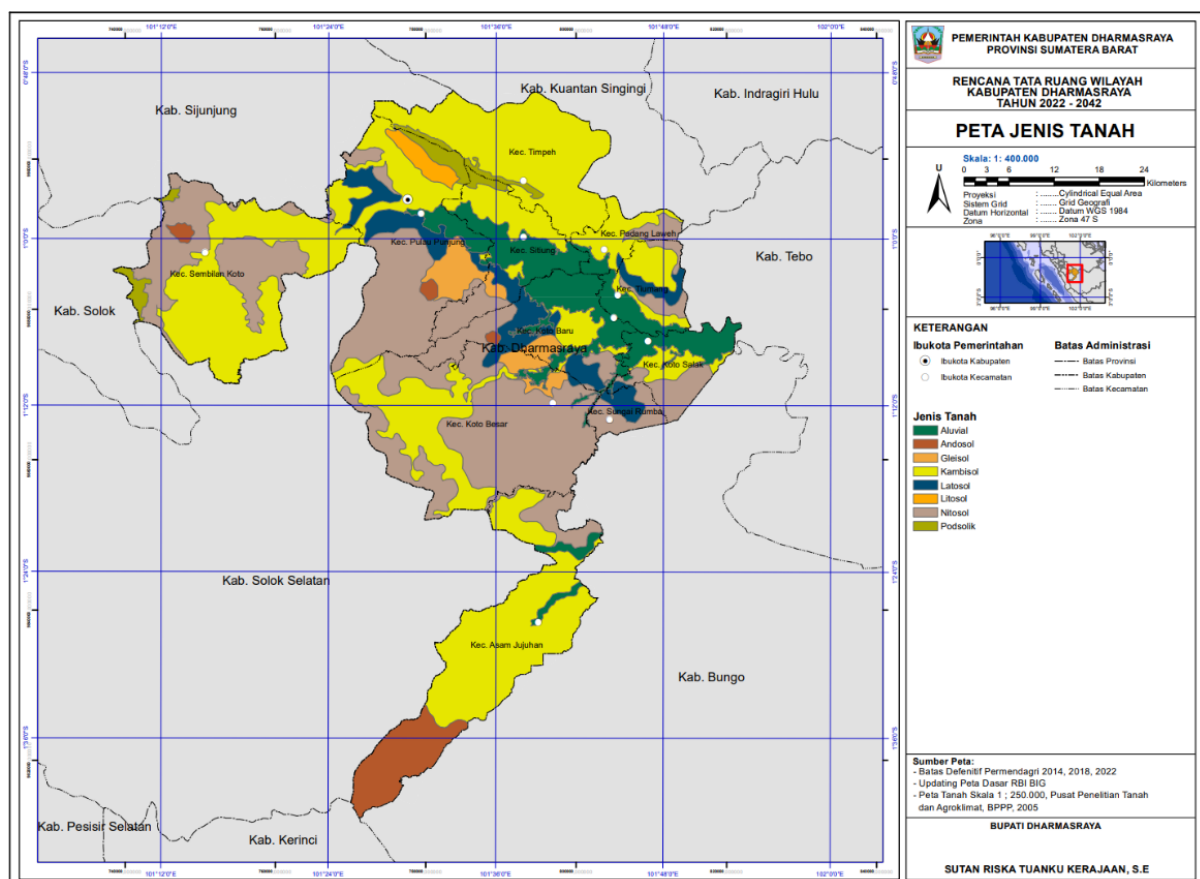
No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas SPT (ha)	(%)
39	Podsolik	>40	Pergunungan Sangat Tertoreh	Batuan Granit	45,46	2.380	0,80
40	Podsolik	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Batuan Metamorf (kwarsit, slate)	34	3.881	1,30
Luas Lahan						292.120	100

Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983); Peta Topografi Jantop TNI AD, 1984 dari Dokumen RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2023-2043

Dari data tabel di atas terlihat bahwa tanah di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh jenis tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut (tanah tua) dari jenis Kambisol (44,89%) dan Nitosol (32,40%). Tanah jenis ini telah mengalami pelapukan lanjut dan karena berada pada zona tipe iklim A (sangat basah) berdasarkan sistim klasifikasi iklim Schmidt Ferguson (1951) dan termasuk zona iklim B1 menurut zona agroklimat L.R.Oldeman sehingga telah mengalami proses leaching yang terus menerus.

Hal ini mengakibatkan kandungan hara menjadi rendah, KTK rendah, kandungan bahan organik rendah, ketersediaan Ca, Mg, Na, N, P dan K rendah, tinggi kandungan Aluminium (Al) dan Besi (Fe), dengan pH yang rendah (bereaksi masam). Solum tanah pada umumnya dalam sampai sangat dalam, pori mikro banyak, tekstur lempung liat berdebu, struktur remah dan konsistensi lekat.

Gambar 2-5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.7. Geologi

Berdasarkan data informasi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya secara geologi regional masuk dalam Peta Geologi Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut maka formasi dan litologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

- | | |
|---|---|
| 1. Aluvium | 12. Porfir Kuarsa |
| 2. Endapan Undak | 13. Granodiorit |
| 3. Batuan Gunung Api yang tak terpisahkan | 14. Formasi Barisan, Anggota batugamping |
| 4. Lava | 15. Formasi Barisan |
| 5. Formasi Kasai | 16. Formasi Pelepat |
| 6. Formasi Rantaukil | 17. Diabas, Basal |
| 7. Formasi Telisa, Anggota bawah | 18. Formasi Silungkang |
| 8. Formasi Gumai | 19. Formasi Kuantan, Anggota Bawah |
| 9. Formasi Talang Akar | 20. Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih |
| 10. Formasi Sinamar | 21. Formasi Kuantan, Anggota Batugamping |
| 11. Granit | |

Lebih jelasnya kondisi geologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.6 dan Tabel 2.6.

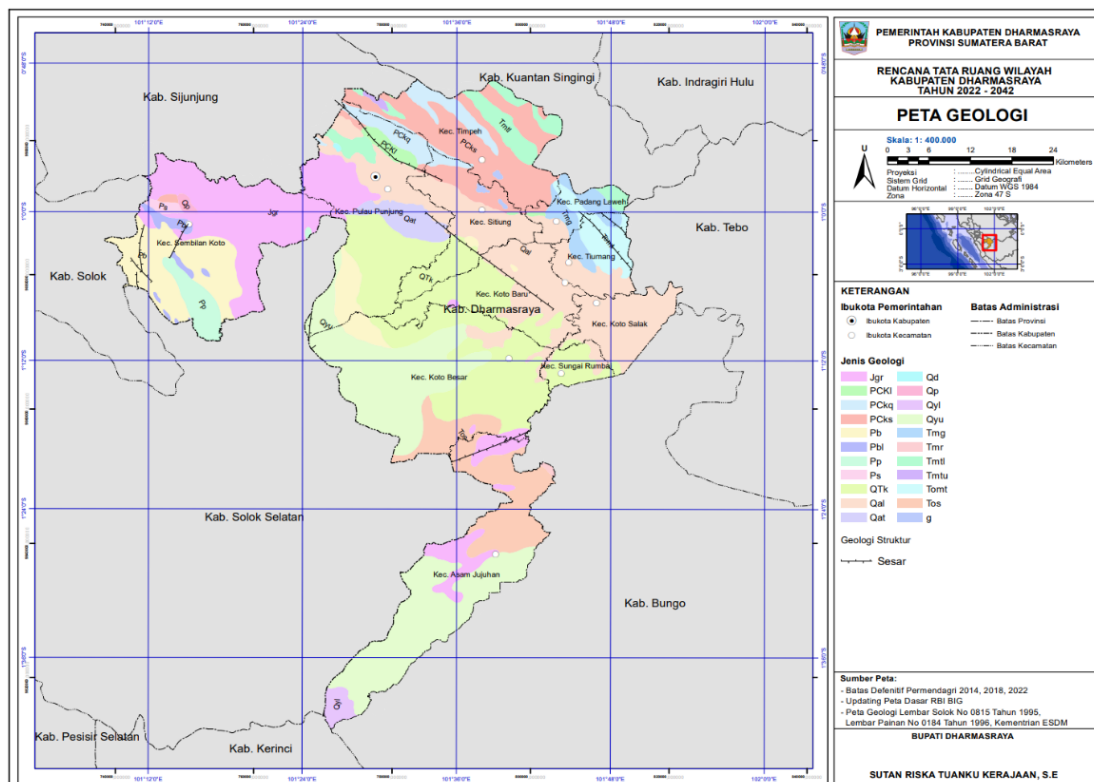
Tabel 2-6 Formasi dan Litologi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya

No	Simbol	Umur	Formasi	Litologi
1	Qal	Holosen	Aluvium	Lanau, pasir dan kerikil
2	Qat	Holosen	Endapan Undak	Bongkah, kerikil dan pasir; setempat tingginya 30-40 m di atas permukaan sungai
3	Qyu / Qvkb	Kuarter	Batuan Gunung Api yang tak Terpisahkan	Breksi Gunungapi, lahar, breksi tuf, bersusunan basalt sampai andesit. Batuan berasal dari G. Kerinci dan G. Tujuh
4	Qvl	Kuarter	Lava	Susunan dan asalnya sama dengan Batuan Gunung Api yang tak Terpisahkan (Qyu). Aliran terdapat di sekitar lereng G. Kerinci dan G. Tujuh
5	Qtk	Plio-Plistosen	Formasi Kasai	Tuf batupung bersifat asal, batupasir tufan, dengan sisipan bentonit dan sedikit lignit. Kayu yang membatu biasa diketemukan, berumur Plio-Plistosen, tebal maksimal 700 m.
6	Tmr	Miosen	Formasi Rantaukil	Batupasir lempungan, batupasir tufan, batupasir gampingan, batulempung tufan, napal dan lensa tipis batugamping.
7	Tmtl	Miosen	Formasi Telisa, Anggota bawah	Napal lempungan dengan lensa-lensa rijang hitam, batupasir lignit, tuf dan breksi andesit dan batupasir glaukonit
8	Tmg	Miosen	Formasi Gumai	Serpih, batugamping napalan, lapisan tipis tuf andesitan dan mengandung foraminifera kecil, terutama Globigerinidae; tebal maksimum 800 m.
9	Tomt	Oligo-Miosen	Formasi Talang Akar	Napal dengan lensa rijang hitam, batupasir lignitan, tuf andesitan, breksi andesitan, dengan batupasir glaukonit; tebal maksimum 1.500 m.
10	Tos	Oligosen	Formasi Sinamar	Konglomerat, batupasir kuarsa berbutir kasar, batupasir kuarsa mengandung mika, batupasir arkosan, batulempung, napal, batulempung pasir, lapisan batubara dan batugamping koral.
11	Jgr	Yura Awal	Granit	Granit biotit hornblenda sampai granodiorit. Bintik-bintik mineral mafik, oligoklas, hornblenda telah mengalami kloritisasi, setempat apatit; sebagai stok; granodiorit lebih muda.

12	g	Trias	Granit	Leuko-granit sampai monzonit kuarsa, faneritik-porfiritik. Umurnya 112;24 juta tahun.
13	qp	Trias	Porfir Kuarsa	Fenokris-fenokris kuarsa dan feldspar dalam masadasar berbutir sedang, hamper besar dari mineral mafik.
14	gd	Trias	Granodiorit	Bertekstur porfirit-faneritik, berwarna abu-abu muda, bersusunan anderin-oligoklas, ortoklas, kuarsa, hornblenda, biotit dan magnetit ikutan.
15	Pbl	Perem	Formasi Barisan, Anggota batugamping	Batugamping. Terpualamkan, terhablur dan pejal.
16	Pb	Perem	Formasi Barisan	Filit, batusabak, batugamping, batutanduk dan grewake meta.
17	Pp	Perem	Formasi Pelepat	Terutama lava, tuf sela hablur dan tuf sela andesitic; terpropilitkan, pirit, tembaga dan molibden. Lava basaltik dan riolitik tersebar tidak beraturan.
18	d	Permo-Karbon	Diabas, Basal	Keras, retak-retak, berongga, abu-abu tua, bintik-bintik hitam. Bertekstur trakit, feldspar dan mineral mafik dalam masadasar mikrolitik; sisipan dalam filit dan kuarsit.
19	Ps	Permo-Karbon	Formasi Silungkang	Bagian bawah, andesit hornblenda dan augit, meta-andesit dengan sisipan tuf, batugamping, srph dan batupasir. Bagian atas batugamping pasir, batupasir gpab dan serpih lpan dengan sedikit tuf, agl, lava and augit dan basalt
20	PCkq	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Bawah	Kuarsit dan batupasir kuarsa dengan sisipan-sisipan filit, batusabak terkarsikan, serpih, batuan gunung api, tuf klorit, konglomerat dan rijang coklat.
21	PCka	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih	Serpih dan filit kemerahan-coklat, sekisan, sisipan batusabak, qzt, blanau, rijang abu tua dan lava and basalt. Menjadi sekis, genes dan batutanduk pada ktk dengan batu intrusi.
22	PCKl	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Batugamping	Batugamping pejal berongga, berwarna putih, abu-abu dan kemerah-merahan. Mengandung sisipan-sisipan tipis batusabak, filit, serpih terkarsikan dan kuarsit.

Sumber : Peta Geologi Regional Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut

Gambar 2-6 Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.8. Hidrogeologi

Berdasarkan Peta Hidrogeologi, Peta Geologi dan Peta Pola Aliran Sungai Kabupaten Dhamasraya, kondisi hidrogeologi Kabupaten Dhamasraya terdiri dari :

1. Akifer dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir (*Aquifers in which flow is intergranular*)

- Akifer produktif dengan penyebaran luas (extensive, productive aquifers)
- Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 5 meter dari muka air tanah. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 10 liter/detik.
- Akifer produktivitas sedang, dengan penyebaran luas (extensive, moderately productive aquifers)
- Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang sampai rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 14 meter dari muka air tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 25 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 5 liter/detik.
- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang (locally, moderately productive aquifers)
- Akifer terutama pasir lempungan, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan, kurang dari 10 meter dari muka tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

2. Akifer dengan Aliran Melalui Celahan dan Ruang Antar Butir (*aquifers in which flow is both through fissures and interstices*)

- Akifer produktif dengan penyebaran luas (extensive, productive aquifers)
- Akifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air tanah beragam. Debit mata air umumnya kurang dari 200 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai lebih dari 5 liter/detik.
- Akifer produktivitas sedang, dengan sebaran luas (extensive, moderately productive)
- Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas umumnya dalam. Debit mata air kurang dari 100 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.
- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang (locally, moderately productive aquifers)
- Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedudukan muka air tanah bebasnya dalam. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik.

3. Akifer Dengan Aliran Melalui Celahan, Rekahan dan Saluran (*aquifers in which flow is through fissures, fractures and channels*)

- Akifer produktif tinggi sampai sedang (highly to moderately productive aquifers)
- Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan. Debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran yang besar, debit mata air kurang dari 1 sampai 400 liter/detik

4. Akifer Bercelah atau Sarang Produktif Kecil dan Daerah Air Tanah Langka (*aquifers fissured or porous of poor productivity and regions without exploitable groundwater*)

- Akifer dengan produktivitas kecil, setempat (poorly productive aquifers of local importance)
- Berada pada zona pelapukan, air tanah dangkal dalam jumlah terbatas masih dapat diperoleh. Kedalaman muka air tanah bebas dekat permukaan sampai 11 meter dari muka tanah setempat. Pemunculan mata air di zona rekahan kurang dari 2 liter/detik.

- Daerah air tanah langka (regions without exploitable groundwater)
- Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada catchment area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi discharge air di bawah permukaan. Secara hidrogeologi Dharmasraya sebagian wilayahnya tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (aquifer) setempat dan pada rekahan (joint) umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis aquifer dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (aquifer) yang tinggi, hal ini disebabkan arah aliran air dibawah permukaan mengalir dari dataran tinggi/pegunungan ke daerah yang rendah.

2.2. Aspek Pelayanan Umum

2.2.1. Fasilitas Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Pendidikan juga merupakan elemen penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan. Dengan pendidikan masyarakat akan mampu menerima pesan-pesan serta informasi yang bermanfaat. Dalam rangka pemenuhan pendidikan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Pendidikan pada tahap awal ada yang dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) ataupun Pendidikan Anak Usia Dini Pencapaian dalam bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Selama tahun 2023, jumlah sekolah TK sebanyak 171 (TK dan RA) SD di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 166 unit sekolah (SD dan MI) dengan jumlah SLTP (SMP dan MTs) sebanyak 58 unit sekolah dan SLTA (SMU/MA/SMK) sebanyak 28 unit sekolah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-7 Jumlah Fasilitas Pendidikan TK, RA, SD, dan MI di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	TK		RA	SD		MI		SLTP	
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Sungai Rumbai	3	25		12	1		1	3	1
2	Koto Besar	1	29	3	13	3	1	1	3	2
3	Asam Jujuhan	1	11		7	2			1	
4	Koto Baru	2	41		17	1		1	4	1
5	Koto Salak		25	1	9	4	1		3	
6	Tiumang	2	19	1	11	1		1	1	
7	Padang Laweh		9	3	6				1	
8	Sitiung	2	33	5	19	4		1	3	
9	Tmpeh	1	25	2	11	1		1	4	1
10	Pulau Punjung	3	36	12	27	3		1	7	2
11	Sembilan Koto	1	18	7	11	4			3	
Jumlah		16	121	34	143	14	2	7	33	7

Sumber : Dharmasraya dalam Angka 2024

Tabel 2-8 Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SLTP di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	MTS		MTs	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Sungai Rumbai	3	1		2
2	Koto Besar	3	2		1
3	Asam Jujuhan	1			
4	Koto Baru	4	1	1	4
5	Koto Salak	3			
6	Tiumang	1			1
7	Padang Laweh	1			
8	Sitiung	3			4
9	Tmpeh	4	1		1
10	Pulau Punjung	7	2		4
11	Sembilan Koto	3			
Jumlah		33	7	1	17

Sumber : Dharmasraya dalam Angka 2024

Tabel 2-9 Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SLTA di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SLTA		SMK		MA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Sungai Rumbai	2		1			
2	Koto Besar	1		1			
3	Asam Jujuhan	1					
4	Koto Baru	3		1	1	1	1
5	Koto Salak	1					
6	Tiumang	1					
7	Padang Laweh			1			
8	Sitiung	2	1	1			
9	Tmpeh	1		1			
10	Pulau Punjung	3		2			
11	Sembilan Koto	1					
Jumlah		16	1	8	1	1	1

Sumber : Dharmasraya dalam Angka 2024

Tabel 2-10 Perguruan Tinggi di Kabupaten Dharmasraya

No	Perguruan Tinggi	Status	Mahasiswa	Dosen Tetap	Dosen Tidak Tetap	Lulusan
1	Universitas Andalas	Negeri	374	12	20	
2	Universitas Dharmas Indonesia	Swasta	1.954	99		2.862
3	STITNU Sakinah Dharmasraya	Swasta	342	26		224

Sumber : Dharmasraya dalam Angka 2024

2.2.2. Fasilitas Kesehatan

Kabupaten Dharmasraya memiliki dua buah RSUD, 15 Puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan di Dharmasraya, 30 Puskesmas Pembantu, 12 poliklinik dan 15 apotek yang juga tersebar di seluruh kecamatan di Dharmasraya. Dari segi tenaga kesehatannya, terdapat 81 dokter, 372 perawat, dan 30 bidan. Dari jumlah dokter, kebanyakan adalah dokter umum dan banyak bertugas di Puskesmas. Sementara semua dokter spesialis bertugas di RSUD.

Tabel 2-11 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	RSUD	Poli	Puskesmas	Pustu	Apotek	Dokter	Perawat	Bidan
1	Sungai Rumbai	1	2	1	2	2	10	46	5
2	Koto Besar		3	2	5	3	3	4	1
3	Asam Jujuhan		2	1		1	2	6	
4	Koto Baru		1	1	4	1	6	18	1
5	Koto Salak		1	1	4	1	3	6	2
6	Tiumang			1	4		4	8	2
7	Padang Laweh			1	2		1	8	1
8	Sitiung			2	2	2	8	27	4
9	Timpeh			2	3		3	11	7
10	Pulau Punjung	1	3	2	2	5	39	230	3
11	Sembilan Koto			1	2		2	8	4
Jumlah		2	12	15	30	15	81	372	30

Sumber : Dharmasraya dalam Angka 2024

Pada tahun 2023 jumlah puskesmas di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 15 unit, dan jumlah puskesmas yang akan penilaian pasca akreditasi sebanyak 10 puskesmas, yaitu, Puskesmas Gunung Medan, Puskesmas Sialang, Puskesmas Koto Baru, Puskesmas Koto Besar, Puskesmas Tiumang, Puskesmas Silago, Puskesmas Timpeh, Puskesmas Padang Laweh, Puskesmas Sungai Limau dan Puskesmas Sungai Rumbai.

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi dan akan dinilai kembali setiap 3 tahun sekali. Tujuan utama akreditasi adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko.

Akreditasi Puskesmas terbagi menjadi 5 tingkatan akreditasi yaitu;

1. Tidak Akreditasi
2. Terakreditasi dasar
3. Terakreditasi madya
4. Terakreditasi utama, dan
5. Terakreditasi paripurna

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan rujukan merupakan dasar peningkatan jumlah UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2016, UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya hanya UPT RSUD Sungai Dareh dan telah terakreditasi, di tahun 2017 terdapat penambahan UPT RSUD Sungai Rumbai. RSUD Sungai Rumbai mulai beroperasi sejak tahun 2017, dan dalam tahap pengembangan, peningkatan sarana serta prasarana untuk memenuhi mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2023, UPT RSUD Sungai Rumbai sudah terakreditasi.

Tabel 2-12 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	persen	7,14	7,14	7,14	21,40	21,43
Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	unit	1	1	1	3	3
Jumlah Puskesmas	unit	14	14	14	14	14

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Tabel 2-13 Persentase UPT RSUD Terakreditasi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	50	50	100	50	100
Jumlah RSUD terakreditasi	unit	1	1	2	1	2
Jumlah RSUD seluruhnya	unit	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Dengan ada 2 RSUD yang sudah terakreditasi, maka hal ini juga memberikan peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh RSUD Sungai Dareh maupun RSUD Sungai Rumbai.

2.2.3. Fasilitas Peribadatan

Pada umumnya kehidupan beragama berjalan cukup baik, Perkembangan yang banyak disorot adalah perkembangan dan aktifitas dari penduduk agama Islam. Mengingat sebagian besar penduduk Kabupaten Dharmasraya beragama Islam.

Pada tahun 2023 tercatat jumlah masjid di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 235 masjid dan mushola sebanyak 811. Jumlah masjid terbanyak di Kawasan Sitiung sebanyak 34 Masjid dan jumlah mushola terbanyak di Kawasan Koto Baru sebanyak 163 Mushalla. Sedangkan tempat ibadah agama lain belum ada di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk Dharmasraya menganut agama Islam yaitu sebanyak 205.661 jiwa sementara itu sebanyak 1.834 jiwa beragama protestan, dan 376 jiwa beragama katolik.

Di Dharmasraya, pada tahun 2023 terdapat 122 ulama, 349 khatib dan 762 mubaligh. Dari sejumlah tokoh agama tersebut, mayoritas terdapat di kecamatan sekitar Koto Baru, Pulau Punjung, Sitiung dan Sungai Rumbai.

Tabel 2-14 Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Masjid	Mushalla	Gereja	Pura	Vihara
1	Sungai Rumbai	18	75	-	-	-
2	Koto Besar	23	98	-	-	-
3	Asam Jujuhan	9	11	-	-	-
4	Koto Baru	31	163	-	-	-
5	Koto Salak	28	57	-	-	-
6	Tiumang	16	26	-	-	-
7	Padang Laweh	9	14	-	-	-
8	Sitiung	34	92	-	-	-
9	Tmpeh	28	60	-	-	-
10	Pulau Punjung	27	150	-	-	-
11	Sembilan Koto	12	65	-	-	-
Jumlah		235	811		-	-

Sumber : Dharmasraya dalam Angka 2024

Tabel 2-15 Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Islam	Protestan	katolik	Hindu	Buda	Lainnya
1	Sungai Rumbai	22.617	548	105	-	-	4
2	Koto Besar	28.171	337	50	-	-	12
3	Asam Jujuhan	7.981	581	71	-	-	-
4	Koto Baru	33.175	142	30	-	-	-
5	Koto Salak	19.819	15	14	-	-	-
6	Tiumang	13.521	3	20	-	-	-
7	Padang Laweh	6.361	156	15	-	-	-
8	Sitiung	28.171	220	18	-	-	1
9	Tmpeh	17.925	218	18	-	-	1
10	Pulau Punjung	46.718	346	47	-	-	3
11	Sembilan Koto	9.642	8	-	-	-	22
Jumlah		232.101	2.574		-	-	43

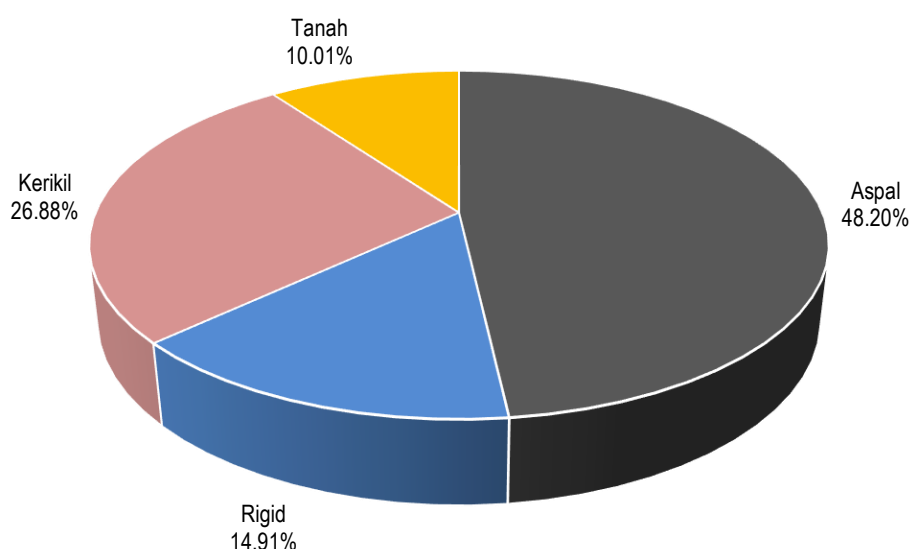
Sumber : Dharmasraya dalam Angka 2024

2.2.4. Fasilitas Prasarana Jalan

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki luas daerah 3.025,99 km², pada tahun 2017 dihubungkan oleh jalan sepanjang 1.208,27 km, terdiri dari 60,62 km jalan negara, 70,50 Km jalan provinsi dan sepanjang 1.052,66 km jalan kabupaten.

Dilihat dari permukaannya, jalan yang diaspal mencapai 485,50 Km, jalan tidak diaspal yaitu berupa rigid, kerikil dan tanah sepanjang 557,35 Km. Sekalipun setiap tahunnya ada peningkatan panjang jalan dan penambahan jalan aspal namun untuk Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih harus menambah jalan maupun mengaspal jalan yang masih kerikil dan jalan tanah demi kelancaran transportasi dan ekonomi masyarakat karena peningkatan pembangunan jalan masih belum begitu signifikan.

Gambar 2-7 Jenis Permukaan Jalan



Tabel 2-16 Status Kewenangan Jaringan Jalan dalam per Kecamatan

No	Kecamatan	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
1	Sungai Rumbai	7.30	0.00	88.75	96.05
2	Koto Besar	0.00	0.00	152.48	152.48
3	Asam Jujuhan	0.00	0.00	97.63	97.63
4	Koto Baru	15.00	24.00	102.63	141.63
5	Koto Salak	0.00	5.90	57.68	63.58
6	Tiumang	0.00	0.00	90.70	90.70
7	Padang Laweh	0.00	0.00	53.15	53.15
8	Sitiung	13.00	29.00	97.17	139.17
9	Timpeh	0.00	0.00	110.78	110.78
10	Pulau Punjung	25.32	11.60	110.87	145.79
11	Sembilan Koto	0.00	0.00	90.83	90.83
Kabupaten Dharmasraya		60.62	70.50	1,052.66	1,181.78

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas Kabupaten/Kota, serta kecamatan hingga nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan dimana berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/469/KPTS-BUP/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penetapan Status Jalan diketahui bahwa total panjang jalan Kabupaten Dharmasraya adalah 1.042,87 km.

Mengingat jalan sebagai infrastruktur dasar, maka perlu diketahui kondisi kemandapan jalan kabupaten di Kabupaten Dharmasraya. Kondisi kemandapan jalan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 berdasarkan data capaian proporsi panjang mantap di Kabupaten Dharmasraya. Secara umum pemerintah daerah terus melakukan penyesuaian data dan definisi operasional terhadap pengertian jalan dengan kondisi baik.

Proporsi jalan mantap meningkat menjadi 58,16% pada tahun 2023 dimana pada tahun 2019 tercatat sebesar 49,19% dimana dari tahun ke tahun terus ditingkatkan baik dalam melalui

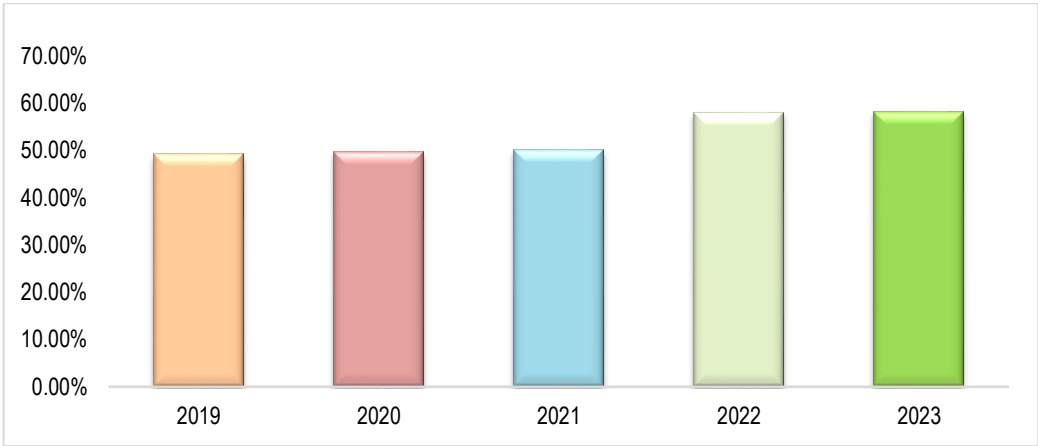
peningkatan kualitas jalan dan pemeliharaan periodic maupun berkala terhadap jaringan jalan yang ada. Untuk lebih jelasnya proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-17 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	49.19%	49.75%	50.20%	58.09%	58.16%
Panjang jalan kondisi baik	Km	517.99	523.89	523.49	611.49	612.21
Panjang Jalan (Km)	km	1,053.13	1,053.13	1,042.87	1,052.66	1,052.66

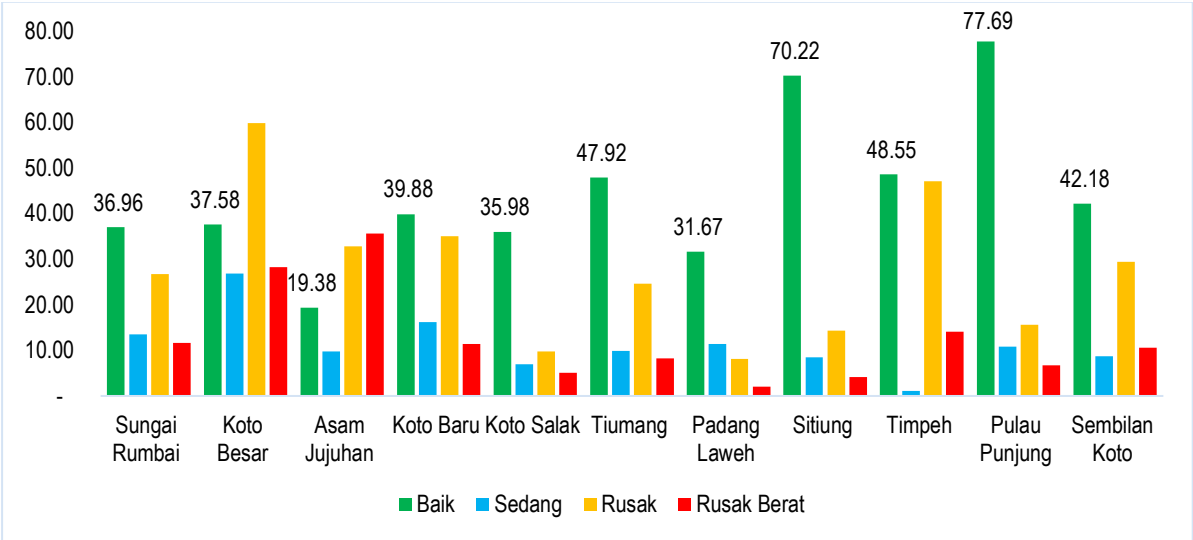
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Gambar 2-8 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Tabel 2-18 Kondisi jaringan Jalan per Kecamatan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, secara keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yaitu sepanjang 1.052,66 Km, dimana panjang jalan dalam kondisi baik yaitu sepanjang 612,21 Km atau ketercapaian panjang jaringan jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 58,16% dari total panjang jalan kewenangan kabupaten.

Terjadinya penurunan fluktuasi proporsi jalan mantap di kabupaten Dharmasraya disebabkan beberapa hal :

1. beban yang melewatinya terus menerus melampaui batas maksimum. Kendaraan-kendaraan yang lewat, sering kali beratnya melampaui batas (over load).
2. pemahaman dalam penanganan jalan hanya membangun dan membangun tetapi fokus pada pemeliharaan.
3. Kondisi covid-19 yang menyebabkan pengalihan alokasi anggaran infrastruktur untuk penanganan pandemic pada tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir bahwa jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 188 unit jembatan sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/469/KPTS-BUP/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penetapan Status Jembatan di Kabupaten Dharmasraya. Dari jumlah jembatan tersebut, jembatan dalam kondisi baik sebanyak 128 unit atau 68,09% dari jumlah jembatan secara keseluruhan.

Tabel 2-19 Persentase jembatan dalam Kondisi Baik

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase jembatan dalam Kondisi Baik	persen	55,35	34,16	34,82	70,21	70,40
Jumlah jembatan dalam Kondisi Baik	unit	122	124	124	128	128
Jumlah Jembatan seluruhnya	unit	188	188	188	188	188

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Berdasarkan data, capaian persentase jembatan dalam kondisi baik yang tertera pada tabel di atas mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 persentase jembatan dalam Kondisi Baik adalah sebesar 64,89% dan tahun 2021 adalah sebesar 68,09%. Rata-rata dalam kurun 5 tahun tidak ada penambahan jembatan baru penekanan lebih ditekankan pada pemeliharaan jembatan.

2.2.5. Wilayah Rawan Bencana

Ancaman bencana di Sumatera Barat diantaranya gempabumi, tsunami, gunungapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca esktrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2022 Provinsi Sumatera Barat memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 144,39. Namun untuk nilai indeks risiko bencana Kabupaten Dharmasraya berada di bawah angka Sumatera Barat, yaitu sebesar 137,69 yang dikategorikan sedang.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi Kabupaten Dharmasraya meliputi: kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana longsor atau rawan gerakan tanah.

Kawasan rawan banjir tersebar di beberapa kecamatan, terutama disepanjang jalan lintas sumatera dan wilayah dataran rendah atau cekungan dengan potensi mulai dari rendah, sedang dan tinggi, sedangkan kawasan rawan bencana gerakan tanah di Kabupaten Dharmasraya pada umumnya memiliki potensi rendah, dan sebagian kecil memiliki potensi tinggi berada pada bagian ujung daerah perbatasan dengan kabupaten lain.

2.2.5.1. Potensi Gerakan Tanah/Longsor

Bencana Gerakan Tanah/longsor gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsor yang terjadi Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor : Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Potensi gerakan tanah dijumpai pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit, Formasi Barisan (Pb) dan serpih Formasi kuantan (Pckl) dan batuan vulkanik (Qd) . Umumnya gerakan tanah berupa longsor bahan rombakan dan nendatan berdimensi panjang antara 1-2 m, lebar antara 0,5-1 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40-50 %. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsor bahan rombakan dan batu.

Bencana Gerakan Tanah/Longsor pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana-prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana Gerakan Tanah/Longsor tersebut dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan Tanah/Longsor di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan, dan kegempaan. Dari analisis parameter-parameter tersebut secara umum di Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok.

Tabel 2-20 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
1	Tinggi	Kelompok Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan (PCks), Batuan Intrusi Granit (g), Andesit (Qatg), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).	Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuhannya ataupun tumbang, lereng > 25%, kekar dan sesar.	Zona ini terdapat pada bagian Barat, meliputi Kecamatan Silago, Sialang, Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung
2	Sedang	Kelompok Batuan Anggota Batu Gamping Formasi Kuantan (PCks), Anggota Formasi Kasai (QTpu) Anggota Filit Serpih Formasi Kuantan, Batuan Intrusi (g), Andesit (Qatg), dan bahan vulkanik tak terpisahkan.	Gelinciran – Seluncuran (bidang lapisan, kekar dan sesar).	Zona ini terdapat pada bagian Tengah dan Timur Laut meliputi wilayah Kecamatan Kota Baru dan Ampalu
3	Rendah	Kelompok Bantuan Anggota Batugamping Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (Pcks), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas Aluvium (Qf) dan Endapan Aluvium (Qaf).	Gelinciran – Luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar).	Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara, selatan dan Timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Kec. Koto Salak, Sungai Rumbai.
4	Sangat Rendah	Batuan penyusunan zona ini terdiri dari bahan vulkanik (Qv), Kipas Aluvium dan Endapan Aluvium (Qal).	Erosi tebing sungai (litologi bersifat lepas-lepas).	Sebaran zona ini terletak di bagian tengah dan timur daerah telitian

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2021

Secara umum bencana Gerakan Tanah/Longsor di Kabupaten Dharmasraya terjadi di Kecamatan Sembilan Koto. Terutama di Nagari Banai, Silago dan Empat Koto Dibawah. Pada tahun 2022 tidak ada terjadi bencana longsor. Untuk lebih jelasnya bencana longsor di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**

Tabel 2-21 Bencana Longsor di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dan 2021

No	Kecamatan	Nagari	Jorong	Jenis Bencana	Ket
1	Sembilan Koto	Banai	Banai	Longsor	Rumah Tertimbun (2020)
2	Sembilan Koto	Banai	Padang Hilalang	Longsor	Rumah Tertimbun (2020)
3	Sembilan Koto	Silago	Moring	Longsor	Jalan Putus (2020)
4	Sembilan Koto	Silago	Pakani	Longsor	Jalan Putus (2020)
5	Sembilan Koto	Banai	Padang Ilalang	Longsor	Jalan Putus (2020)
6	Sembilan Koto	Silago	Durian Simpai	Longsor	Jalan Putus (2020)
7	Sembilan Koto	Empat Koto Dibawah	Pulau Anjolai	Longsor	Jalan Putus (2021)
8	Sembilan Koto	Empat Koto Dibawah	Koto Baru	Longsor	Jalan Putus (2021)
9	Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	durian simpai	Longsor	Jalan Putus (2021)

Sumber : BPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor dari hasil analisis skoring terhadap parameter penentu kerawanan longsor klasifikasi berupa kelerengan, ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah maka Diperoleh kelas kerentanan yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang, kerawanan tinggi. Hasil dari analisis skoring dengan metode tabular dan overlay diperoleh gambaran tentang area rawan yang hanya sebagian kecil saja kawasan longsor yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.

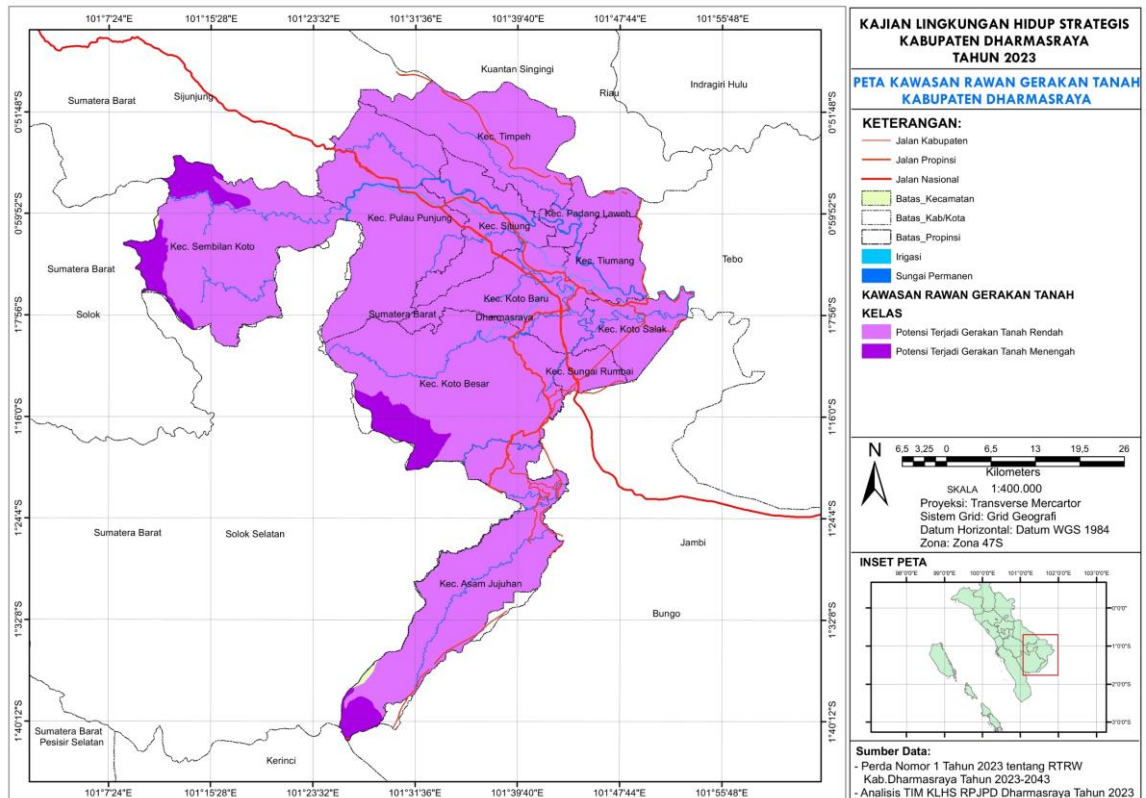
Tabel 2-22 Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawananan

Kriteria Kerentanan Bahaya Longsor	Luas (Ha)			
	Non Permukiman	Permukiman	Total	%
Tidak Berisiko	160,462.43	7,142.26	167,604.69	57.39%
Rendah	109,786.75	264.43	110,100.19	37.67%
Sedang	8,800.09	11.29	8,792.29	3.02%
Tinggi	5,622.74	-	5,622.84	1.92%
Luas Lahan	284,672.01	7,417.99	292,120.00	

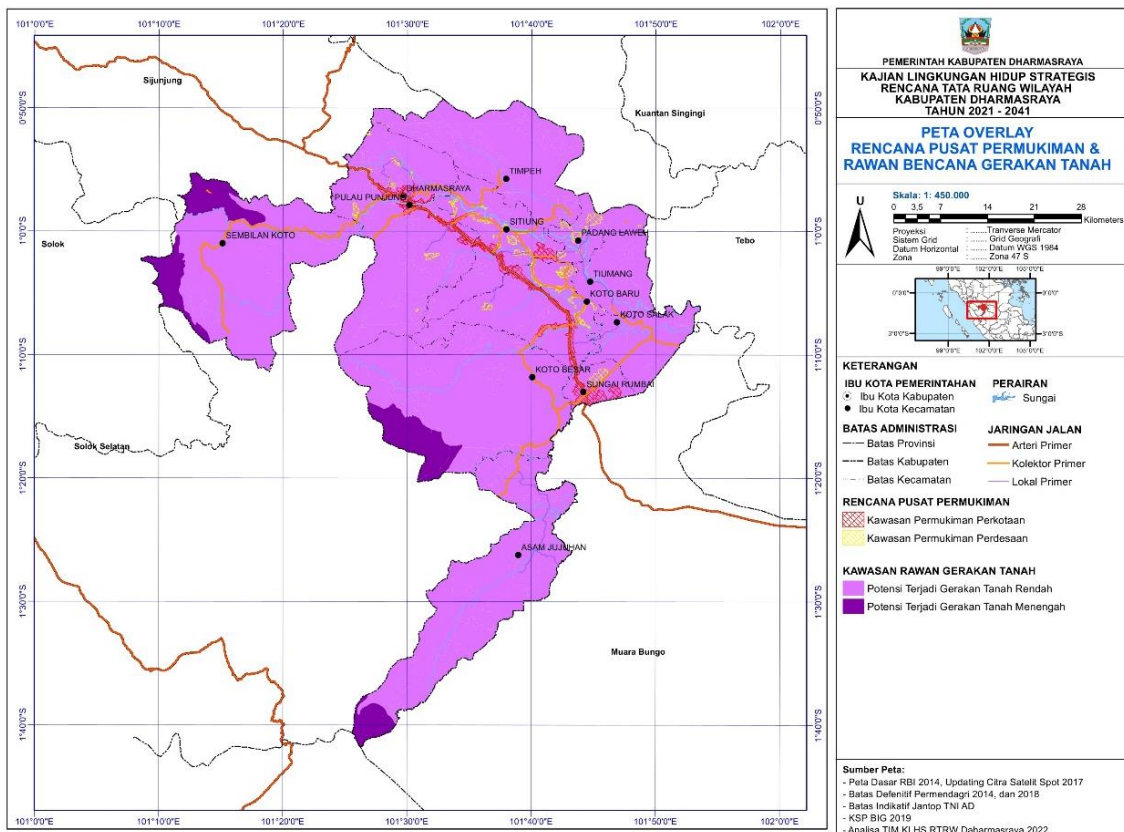
Sumber : Hasil analisis

Peta Overlay Rawan Bencana Gerakan Tanah/Longsor terlihat pada **Error! Not a valid bookmark self-reference.**, Gambar 2-10 dan Gambar 2-11, bahwa rencana kegiatan peruntukan Permukiman berada pada kawasan tingkat bahaya rendah dan sedang, begitu juga kawasan peruntukan jaringan jalan umumnya berada pada kawasan tingkat bahaya rendah dan sedang.

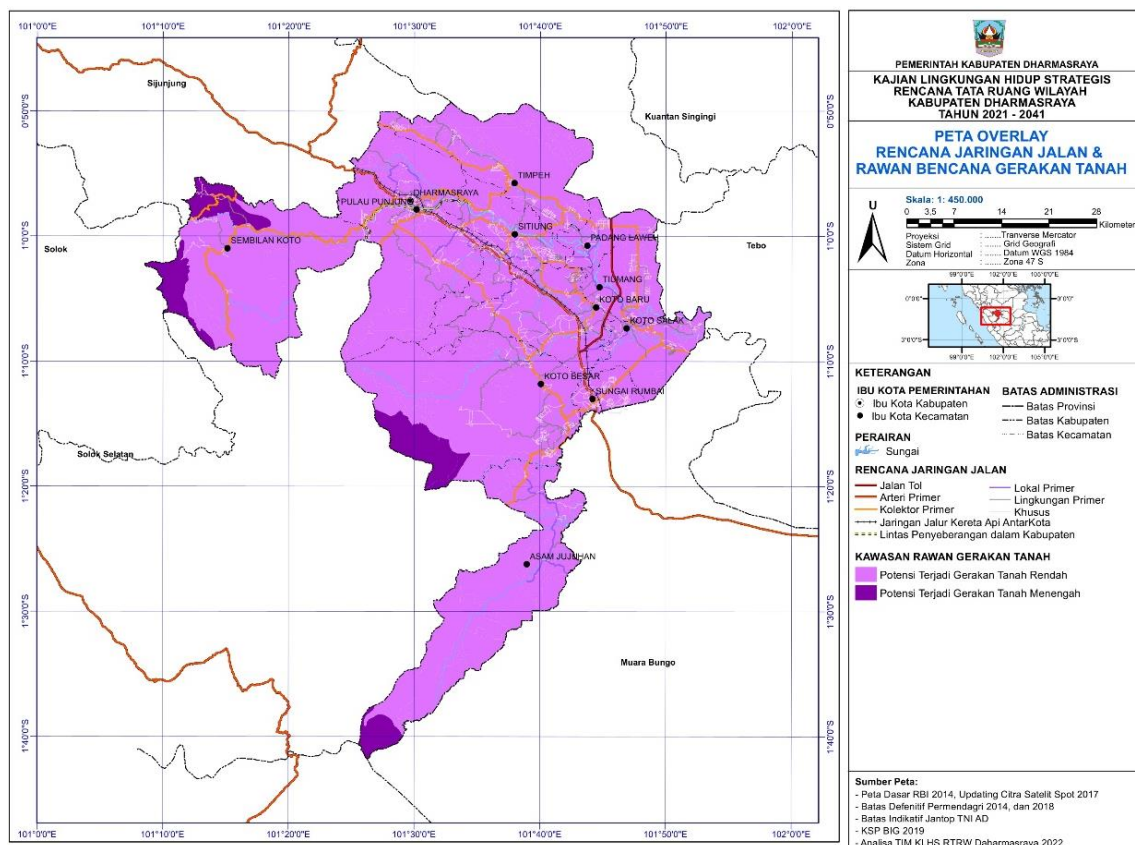
Gambar 2-9 Peta Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Dharmasraya



Gambar 2-10 Peta Overlay Rencana Pusat Permukiman Terhadap Rawan Bencana Gerakan Tanah



Gambar 2-11 Peta Overlay Rencana Jaringan Jalan Terhadap Rawan Bencana Gerakan Tanah



2.2.5.2. Bencana Banjir

Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan: dataran limpah banjir yang terbentuk oleh teras-teras sungai yang terbentuk pada masa lampau, pertemuan dua sungai besar, meander sungai, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampaui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir.

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh sebagaimana disajikan pada

Gambar 2-12.

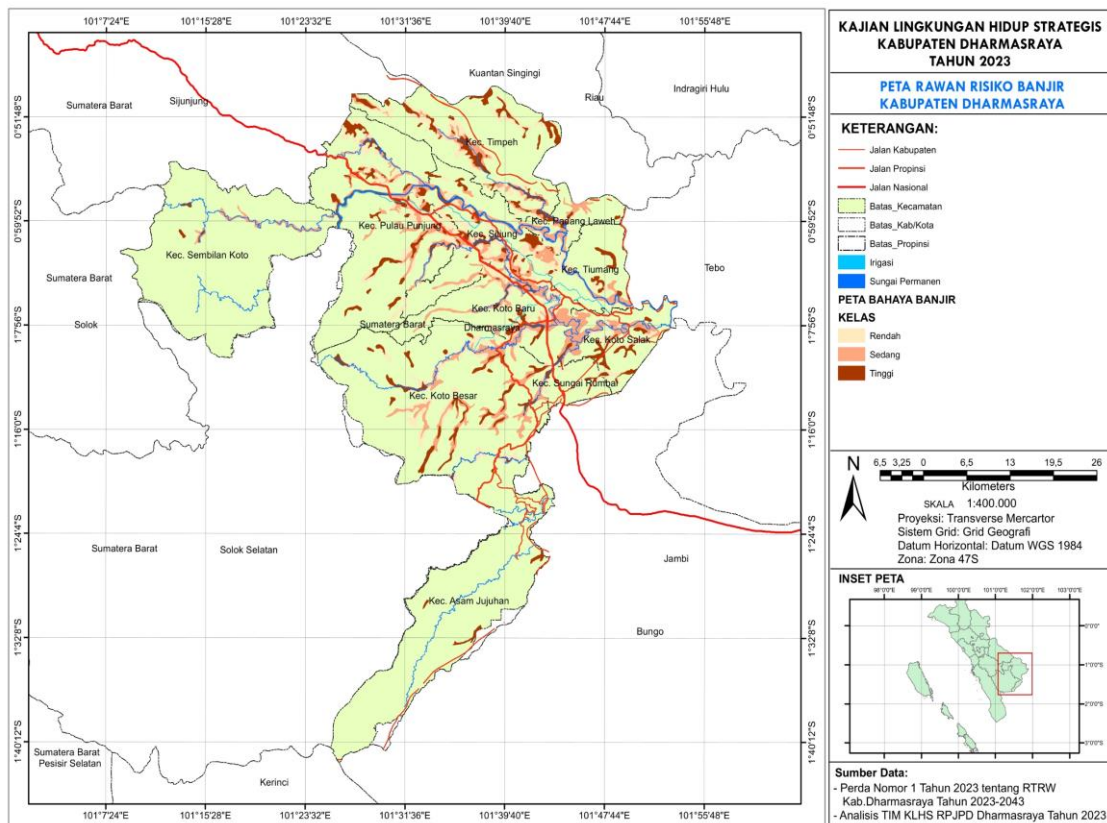
Permasalahan banjir di Kabupaten Dharmasraya pada umumnya ini disebabkan oleh terjadinya genangan baik dikarenakan oleh kapasitas air yang berlebih maupun tidak adanya jaringan drainase. Berikut merupakan data lokasi genangan di Kabupaten Dharmasraya, dapat dilihat pada Tabel 2-23.

Tabel 2-23 Rekapitulasi Lokasi Genangan di Kecamatan dan Klasifikasi Perkotaan

No	Kecamatan / Nagari	Luas	Tinggi	Lama	Kondisi Keterangan
A	Pulau Punjung				
	Pulau Punjung	37,16	30-70	2-4	Permukiman Genangan Tidak ada saluran primer
B	Sitiung				
	Sungai Duo	35,49	5-8	0,5 - 0,7	Permukiman Potensi Genangan Tidak ada saluran primer
	Sitiung	43,11	7-10	0,5	Permukiman Potensi Genangan Tidak ada saluran primer
C	Koto Baru				
	Koto Padang	36,15	5-8	0,8	Permukiman Potensi Genangan Tidak ada saluran primer
D	Koto Salak				
	Samalidu	14,47	8-10	0,6	Permukiman Potensi Genangan Tidak ada saluran primer
	Pulau Mainan	16,47	5-7	0,5	Permukiman Potensi Genangan Tidak ada saluran primer
	Padukuhan	7,52	5-10	0,5	Permukiman Potensi Genangan Tidak ada saluran primer
	Koto Salak	5,45	6-11	0,7	Permukiman Potensi Genangan Tidak ada saluran primer
E	Padang Laweh				
	Batu Rijal	8,72	7-10	0,6	Permukiman Potensi Genangan Tidak ada saluran primer
	Muaro Sopan	2,1	8-10	0,7	Permukiman Potensi Genangan Tidak ada saluran primer
	Padang Laweh	3,76	7	0,7	Permukiman Potensi Genangan Tidak ada saluran primer
F	Koto Besar				
	Koto Tinggi	41,75	10	0,6	Permukiman Potensi Genangan Tidak ada saluran primer
	Koto Gadang	17,71	8	0,7	Permukiman Potensi Genangan Tidak ada saluran primer

Sumber : BPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Gambar 2-12 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Tabel 2-24 Luas Daerah Risiko Banjir Berdasarkan Tingkat Kerawanan

Kriteria Kerentanan Risiko Banjir	Non Permukiman	Permukiman	% Luas Permukiman terdampak	Grand Total	%
Tidak Berisiko	240,415.33	4,621.78	62,05%	245,037.11	83,88%
Rendah	2,300.41	252.68	3,39%	2,553.09	0,87%
Sedang	22,543.40	1,656.39	22,24%	24,199.79	8,28%
Tinggi	19,412.98	917.14	12,31%	20,330.12	6,96%
Grand Total	284,672.11	7,447.99		292,120.10	

Sumber : Hasil analisis

Berdasarkan data bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dan Tahun 2022, banjir terjadi di Kecamatan Asam Jujuhan, Pulau Punjung, Timpeh, sembilan Koto, Sitiung, Padang Laweh, Tiumang, Koto Besar, Koto Baru dan Koto Salak, serta Sungai Rumbai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2-25.

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh.

Tabel 2-25 Bencana Banjir Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dan 2022

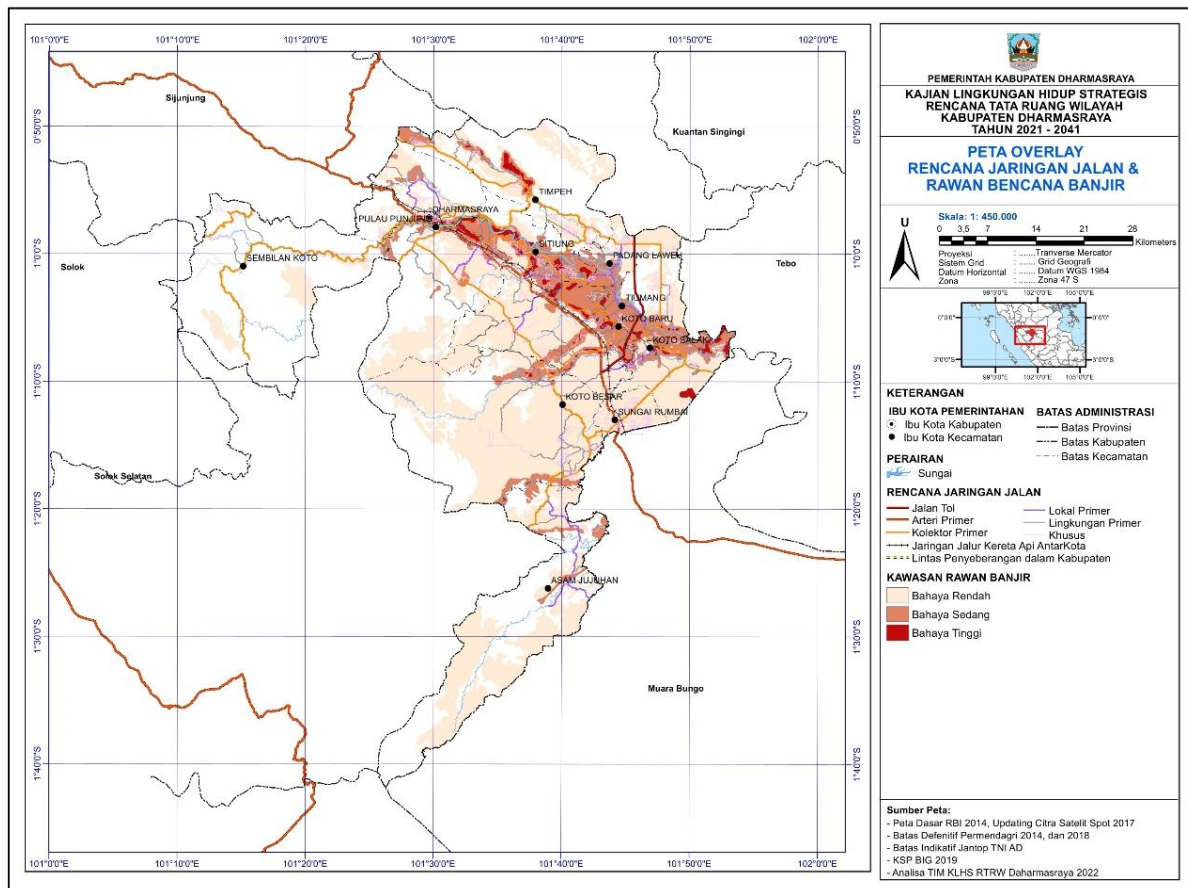
No	Kecamatan	Nagari	Jorong	Jenis Bencana	Ket
1	Asam Jujuhan	Tanjung Alam		Banjir	akses Jalan (2021)
2	Pulau Punjung	Gunung Selasih		Banjir	akses Jalan (2021) Rumah warga 14 KK (2022)
		Sungai Kambut	Jorong Sungai Nili	Banjir	Rumah 15 unit
		Sikabau	Kapalo Koto	Banjir	Rumah 30 unit
		Tebing Tinggi	Ranah Lintas	Banjir	Rumah 1 Unit
3	Timpeh	Taratak Tinggi	Marga Makmur	Banjir	Rumah Warga (2021)
4	Sembilan Koto	Banai	Padang Ilalang,	Banjir Bandang	Rumah Warga (2021)
5	Sitiung	Sungai Duo	Marga Mulyo	Banjir	Rumah Warga (2021)
		Gunug Medan		Banjir	Rumah Warga (2021)
6	Padang Laweh	Sopan Jaya	Sopan Jaya	Banjir	Rumah Warga (2021) Rumah Warga 15 KK (2022)
7	Tiumang	Tiumang	SP3 Jrng Bukik Harapan	Banjir	Rumah Warga (2021)
8	Koto Besar	Abai Siat	9 Jorong	Banjir	Rumah Warga (2021)
		Bonjol	Pasir Mayang	Banjir	Rumah Warga (2021)
		Abai Siat	9 Jorong dan Ranah Baru	Banjir	Rumah Warga (2021)
9	Koto Baru	Ampang Kuranji	Sungai Sau	Banjir	Rumah Warga (2021)
10	Koto Salak	Koto Salak	Lubuk Harto	Banjir	Rumah Warga (2021)
11	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai		Banjir	Rumah warga 16 KK (2022)

Sumber : BPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

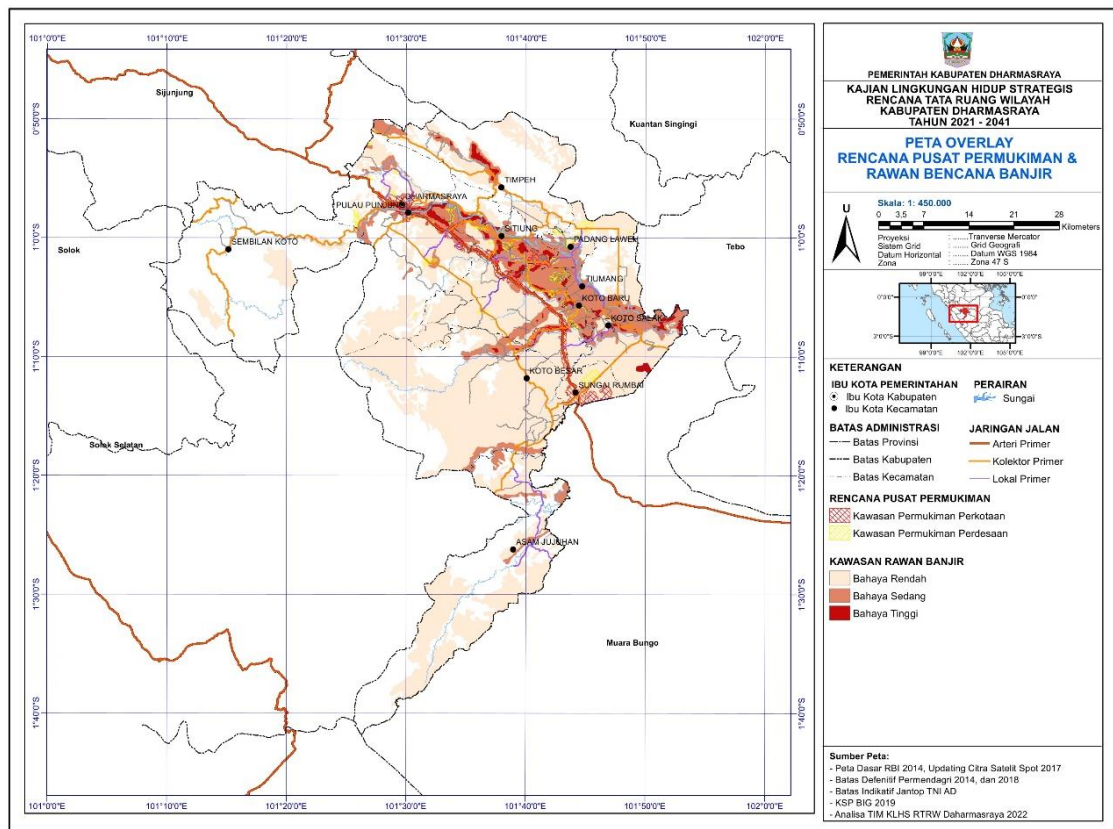
Berdasarkan Gambar 2-13 terlihat bahwa kawasan peruntukan Permukiman berada pada kawasan tingkat bahaya rendah dan sedang, beberapa yang berada di sekitar kawasan sungai memiliki tingkat bahaya tinggi terhadap resiko bahaya banjir. Sementara itu pada

Gambar 2-14 menunjukkan bahwa peruntukan jaringan jalan umumnya berada pada kawasan tingkat bahaya rendah dan sedang dimana jaringan jalan yang melewati beberapa kawasan sungai memiliki tingkat bahaya tinggi terhadap resiko bahaya banjir.

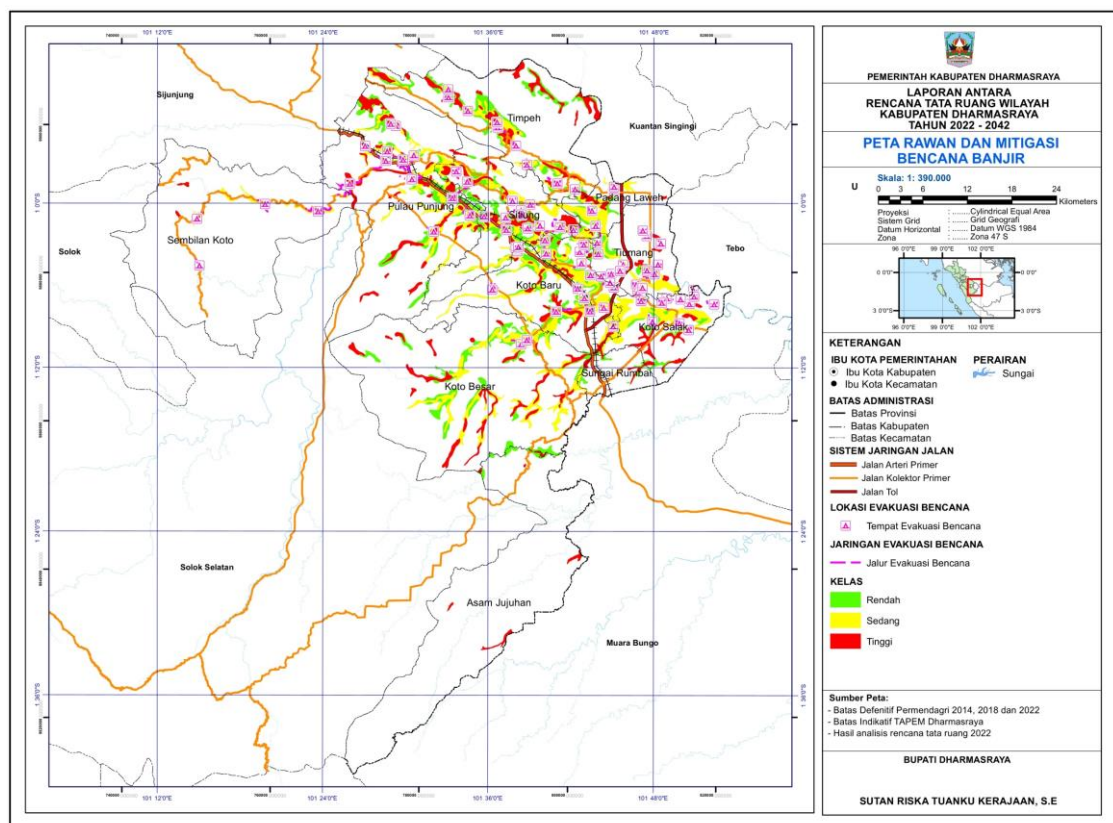
Gambar 2-13 Peta Overlay Rencana Pusat Permukiman Terhadap Rawan Bencana Banjir



Gambar 2-14 Peta Overlay Rencana Pusat Permukiman Terhadap Rawan Bencana Banjir



Gambar 2-15 Peta Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya



2.3. Kondisi Demografis

Kondisi demografi Kabupaten Dharmasraya terkait dengan karakter kependudukan yang disajikan dalam bentuk data jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk.

2.3.1. Perkembangan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya jumlah, dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-26 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sungai Rumbai	20.487	21.650	22.591	22.720	23.586
2	Koto Besar	24.404	26.373	27.387	27.457	28.214
3	Asam Jujuhan	9.285	7.787	8.295	8.493	9.120
4	Koto Baru	29.331	30.269	32.208	32.729	33.869
5	Koto Salak	16.747	17.217	17.729	17.771	18.267
6	Tiumang	11.217	12.813	13.193	13.295	13.733
7	Padang Laweh	8.207	6.003	6.335	6.472	6.877
8	Sitiung	26.511	27.107	28.139	28.523	29.515
9	Timpeh	15.359	16.293	17.252	17.457	18.102
10	Pulau Punjung	39.167	41.953	43.993	44.559	46.790
11	Sembilan Koto	13.577	8.737	9.143	9.325	9.651
Jumlah		214.292	216.202	226.265	228.801	237.724
Pertumbuhan		2,69	0,89	4,65	1,12	3,90

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2023 mencapai 228.801 jiwa. Dilihat berdasarkan distribusi penduduk, maka dapat diranking 3 (tiga) besar kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 46.790 jiwa atau 19,68 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Baru sebanyak 33.869 jiwa atau 14,25 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, dan di Kecamatan Sitiung sebanyak 29.515 jiwa atau 12,39 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 6.877 jiwa atau hanya 2,89 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

2.3.2. Kepadatan Penduduk

Sebaran penduduk saat ini terkonsentrasi pada kawasan permukiman khususnya di sekitar koridor Jalan Lintas Sumatera. Kecamatan yang padat penduduk terdapat di Kecamatan Pulau Punjung. Sungai Rumbai. Koto Baru dan Sitiung. Kecamatan yang akan meningkat tinggi kepadatan penduduknya yaitu kecamatan Sungai Rumbai.

Sementara dilihat berdasarkan kepadatan penduduk brutto atau kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Pada tahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 81 jiwa/km².

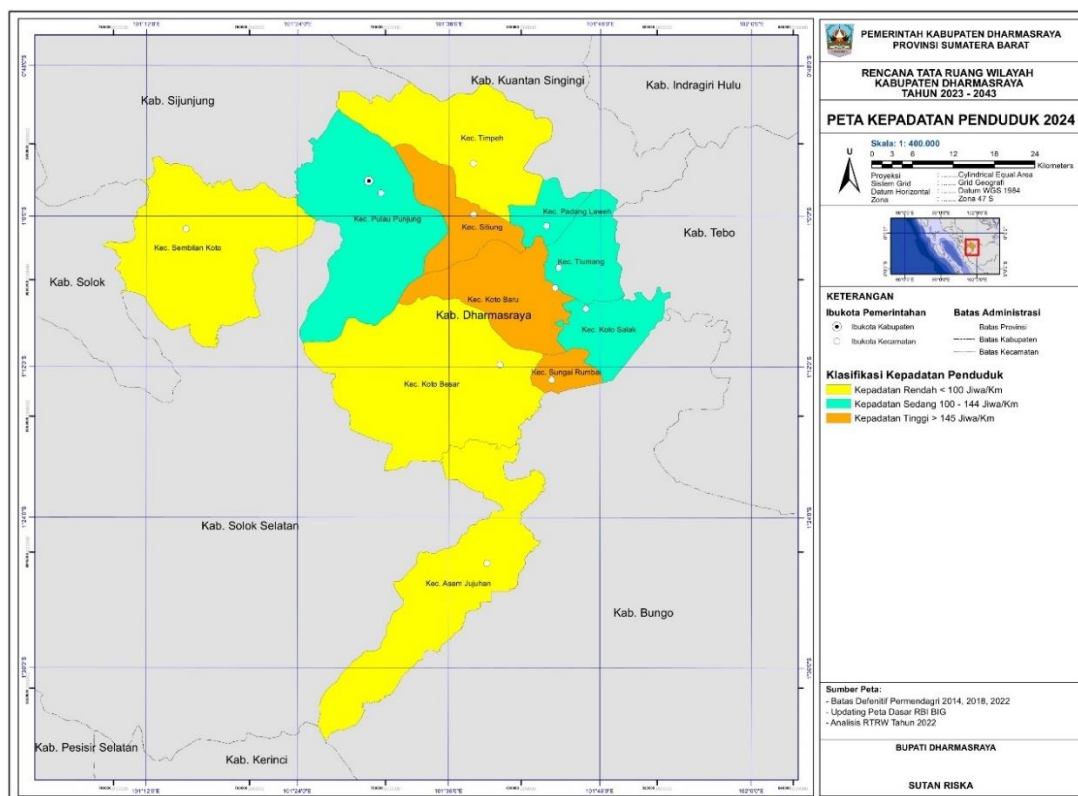
Kecamatan Sungai Rumbai memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 476 jiwa/km². Kecamatan Sungai Rumbai merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan IX Koto yaitu 21 jiwa/km². Kepadatan penduduk menurut kecamatan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2-27 Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Brutto
		(Ha)	(Jiwa)	(Jiwa/Ha)
1	Sungai Rumbai	4.950	23.586	4,76
2	Koto Besar	53.780	28.214	0,52
3	Asam Jujuhan	43.280	9.120	0,21
4	Koto Baru	21.813	33.869	1,55
5	Koto Salak	12.212	18.267	1,50
6	Tiumang	11.243	13.733	1,22
7	Padang Laweh	7.184	6.877	0,96
8	Sitiung	18.459	29.515	1,60
9	Timpeh	28.711	18.102	0,63
10	Pulau Punjung	43.835	46.790	1,07
11	Sembilan Koto	46655	9.651	0,21
Jumlah		292.120	237.724	0.81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024, data diolah

Gambar 2-16 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan



Sumber : Hasil Analisis

2.3.3. Rasio Penduduk

Apabila dilihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 102,97, sedangkan rasio jenis kelamin tertinggi ada pada kelompok umur 50-54 tahun dan 55-59 tahun.

Gambar 2-17 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Tabel 2-28 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No.	Kelompok umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Rasio
		Pria	Wanita		
1	0-4	9.025	8.235	17.260	109,59
2	5-9	11.322	10.700	22.022	105,81
3	10-14	11.690	11.059	22.749	105,71
4	15-19	10.050	9.747	19.797	103,11
5	20-24	10.499	10.362	20.861	101,32
6	25-29	9.347	8.963	18.310	104,28
7	30-34	8.524	8.797	17.321	96,90
8	35-39	9.299	9.541	18.840	97,46
9	40-44	9.728	9.498	19.226	102,42
10	45-49	8.359	7.970	16.329	104,88
11	50-54	6.958	6.481	13.439	107,36
12	55-59	5.317	4.995	10.312	106,45
13	60-64	4.018	3.789	7.807	106,04
14	65-69	2.925	2.970	5.895	98,48
15	70-74	1.780	1.775	3.555	100,28
16	75+	1.761	2.240	4.001	78,62
Jumlah		120.602	117.122	237.724	102,97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hasil analisis, Tahun 2023

Berdasarkan piramida penduduk seperti gambar di atas, terlihat bahwa semakin tinggi kelompok umur maka jumlah penduduknya semakin sedikit. Dan jumlah penduduk terbanyak ada pada kelompok usia 10-14 dan 5-9 tahun masing-masing sebesar 22.749 orang dan 22.022 orang.

2.4. Kondisi Sosial Ekonomi

2.4.1. Kondisi Sosial

2.4.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

- Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
- Pengetahuan (knowledge)
- Standar hidup layak (decent standard of living)

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

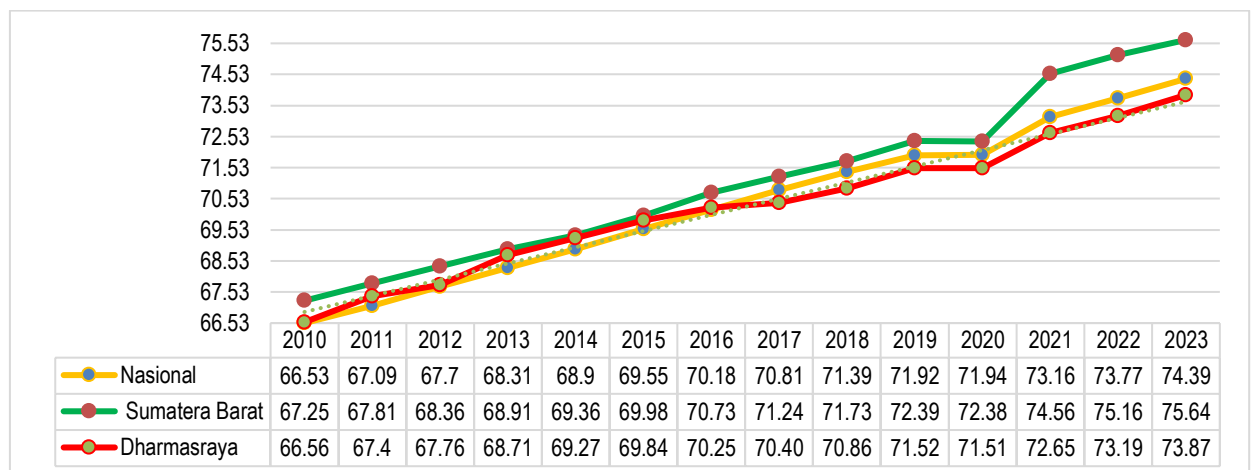
Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$;
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$;
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$;
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$.

Gambar 2-18 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2023 (indeks)



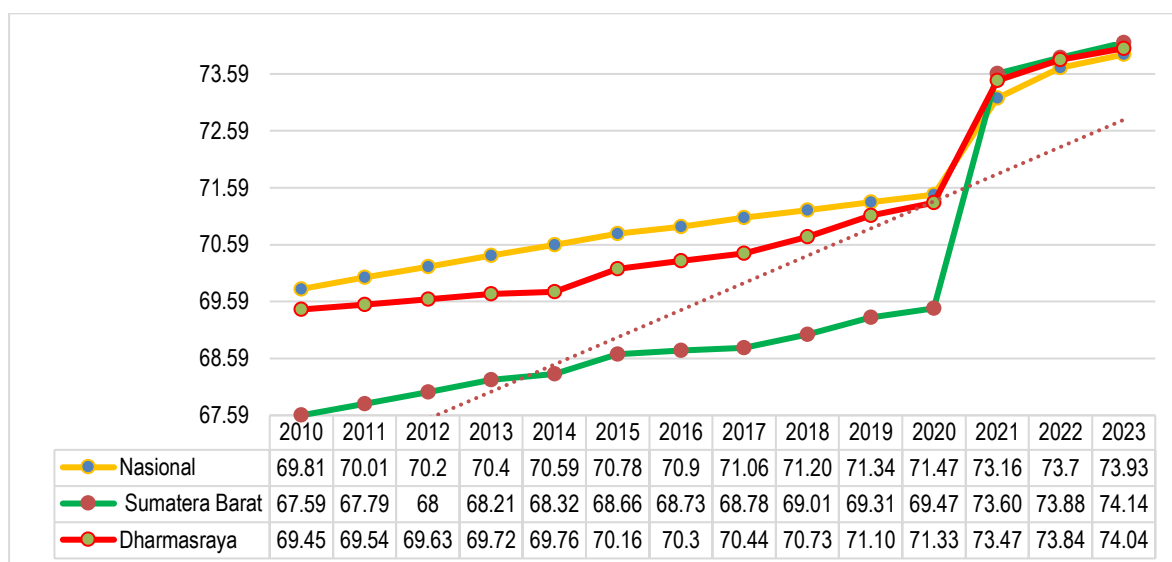
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Dari sisi relevansi, kecenderungan perkembangan Kabupaten Dharmasraya sejalan dengan perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Dimana perkembangan ketiga wilayah tersebut dari tahun 2010 hingga tahun 2015 tergolong pada kategori sedang. Dan mulai tahun 2016 hingga tahun 2023 secara bersamaan juga beralih menjadi kategori tinggi. Namun demikian IPM Dharnasraya hingga tahun 2015 masih berada di atas Provinsi, namun di tahun 2016 sudah berada di bawah Provinsi Sumatera Barat.

2.4.1.2. Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH merupakan Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Idealnya UHH dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Gambar 2-19 Usia Harapan Hidup Tahun 2010-2023 (Tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

UHH Kabupaten Dharmasraya meningkat seiring dengan perkembangan UHH Provinsi Sumatera Barat. Disini dapat dilihat UHH Dharmasraya dari tahun 2010 hingga 2020 lebih baik dibandingkan dengan Provinsi atau rata-rata selisih lebih tinggi sekitar 2 tahun. Namun setelah adanya perhitungan Usia Harapan Hidup Long Form Sensus Penduduk 2020 (UHH LF SP2020) terdapat penyesuaian perhitungan, sehingga UHH Dharmasraya sedikit di bawah Provinsi Sumbar namun tetap berada di atas nasional.

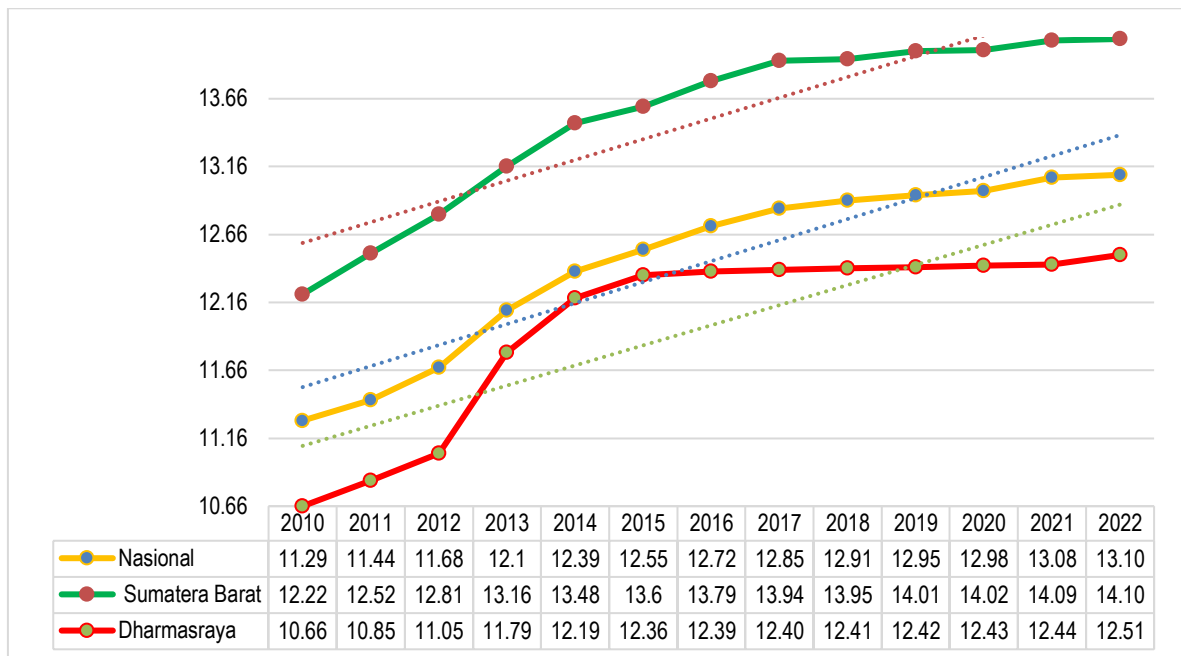
dengan Hal ini menandakan status kesehatan masyarakat Dharmasraya sudah lebih baik dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

2.4.1.3. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu.

Gambar 2-20 Indeks Pembangunan Gender Dharmastraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Dharmastraya, tahun 2024

HLS Dharmastraya masih berada capaian nasional dan Provinsi Sumatera Barat, yaitu berada di 12,51 tahun. Ini dapat diartikan bahwa HLS Dharmastraya tahun 2023 rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,51 tahun, atau sudah menamatkan pendidikan SMA/MA/SMK namun belum menamatkan pendidikan D1. Sedangkan di tingkat nasional sudah menamatkan pendidikan setara D1, dan untuk Provinsi Sumatera Barat sudah setara menamatkan D2 atau kuliah di tahun kedua universitas.

2.4.2. Kondisi Ekonomi

2.4.2.1. Pertumbuhan PDRB

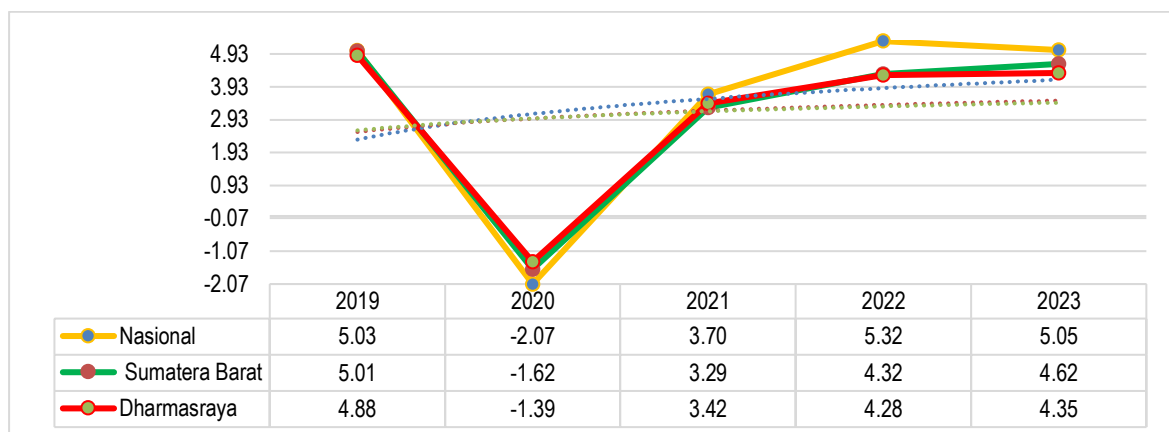
Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah.

Pertumbuhan PDRB/PDB secara nasional, Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan sedikit perkembangan positif, meskipun sempat berkontraksi di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun di tahun 2021 kembali tumbuh positif. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 berada di bawah nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Dilihat dari tren perkembangan PDRB Tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terlihat adanya perubahan kontribusi sektor yang cukup signifikan dalam membentuk nilai PDRB. Salah satu sektor dengan kontribusi turun yaitu sektor pertambangan, kontribusinya dari 11,5 persen di tahun 2010 turun menjadi 5,75 persen di tahun 2023. Begitu juga dengan sektor industri pengolahan yang juga menunjukkan penurunan dalam pembentukan kontribusi nilai PDRB dari 6,68 persen menjadi 5,38 persen.

Dilihat dari Gambar 2-21, dapat dilihat bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor terbesar dalam pembentukan nilai PDRB, yaitu sebesar 28,22 persen. Selanjutnya sektor kedua terbesar di tahun 2023 dalam pembentukan nilai PDRB adalah sektor perdagangan sebesar 14,66 dan diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 13,18 persen.

Gambar 2-21 Pertumbuhan PDRB (persen)



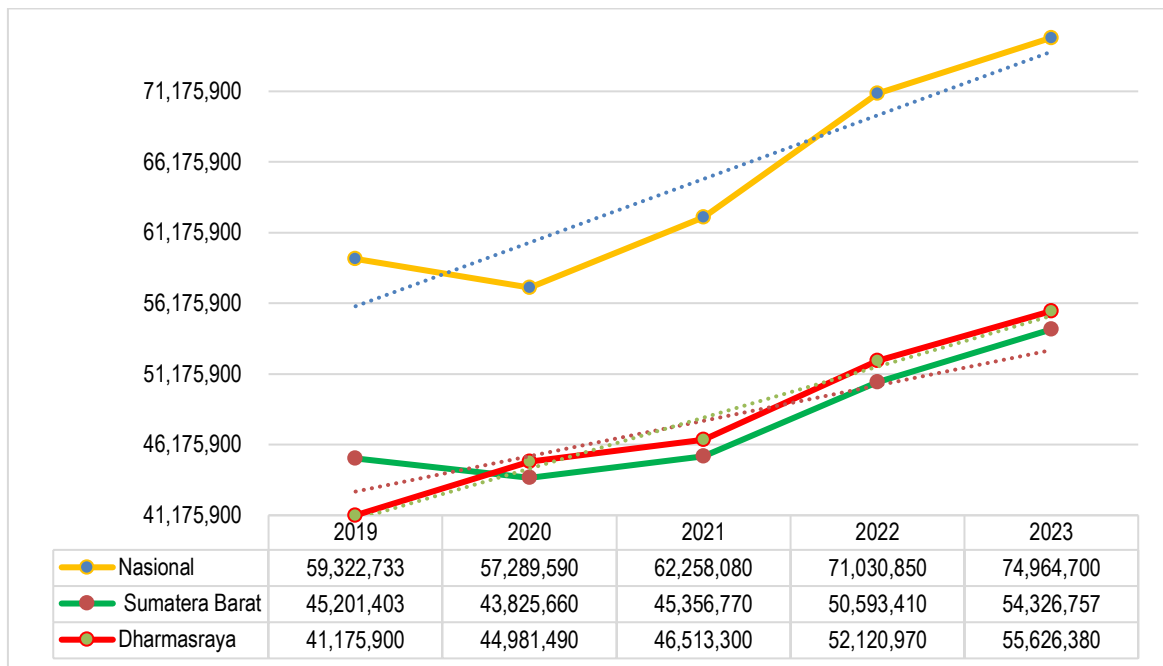
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Sektor yang cukup meningkat kontribusinya diantaranya ada pada sektor konstruksi, dan sektor perdagangan sebagai sektor utama pembentuk nilai PDRB, masing-masing meningkat dari 10,97 persen menjadi 13,18 persen di tahun 2023 untuk sektor konstruksi, dan untuk sektor perdagangan juga meningkat dari 12,16 persen menjadi 14,66 persen. Adapun sektor yang cukup meningkat pesat yaitu sektor Informasi dan Komunikasi dimana di tahun 2010 hanya berkontribusi sebesar 5,4 persen, naik menjadi 9,5 persen di tahun 2023. Sedangkan sektor lainnya cenderung tidak memperlihatkan perubahan kontribusi yang cukup signifikan.

2.4.2.2. PDRB perkapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.

Gambar 2-22 PDRB Perkapita (rupiah)



PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya terlihat sudah berada di atas PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat. Namun masih berada di bawah PDRB perkapita nasional

2.4.2.3. Tingkat kemiskinan

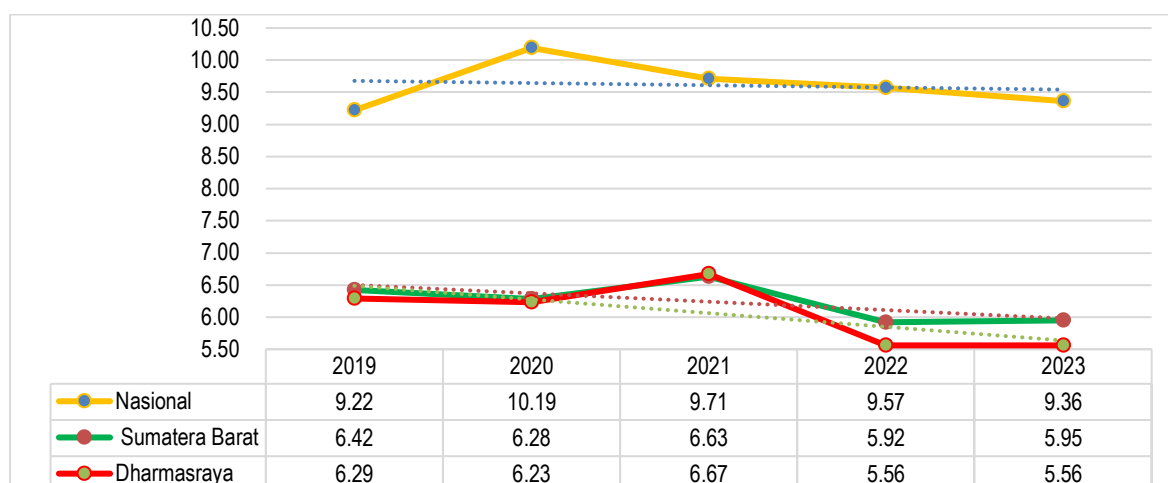
Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kondisi kemiskinan dikatakan membaik apabila tingkat kemiskinan semakin lama semakin menurun atau mendekati nol.

Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM).

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis kemiskinan (GK) pada Maret 2023 sebesar Rp. 477.580 per kapita per bulan. Artinya jika rata-rata satu orang memiliki pendapat perkapita di bawah garis kemiskinan maka tergolong pada kelompok miskin

Gambar 2-23 Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2023 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Tingkat kemiskinan Dharmasraya sedikit berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, dan cukup rendah dibandingkan capaian nasional. Meskipun begitu tingkat kemiskinan ini, dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan angka kemiskinan Kabupaten Dharmasraya pada periode 2019-2023 sejalan dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

2.4.2.4. Rasio Gini

Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.

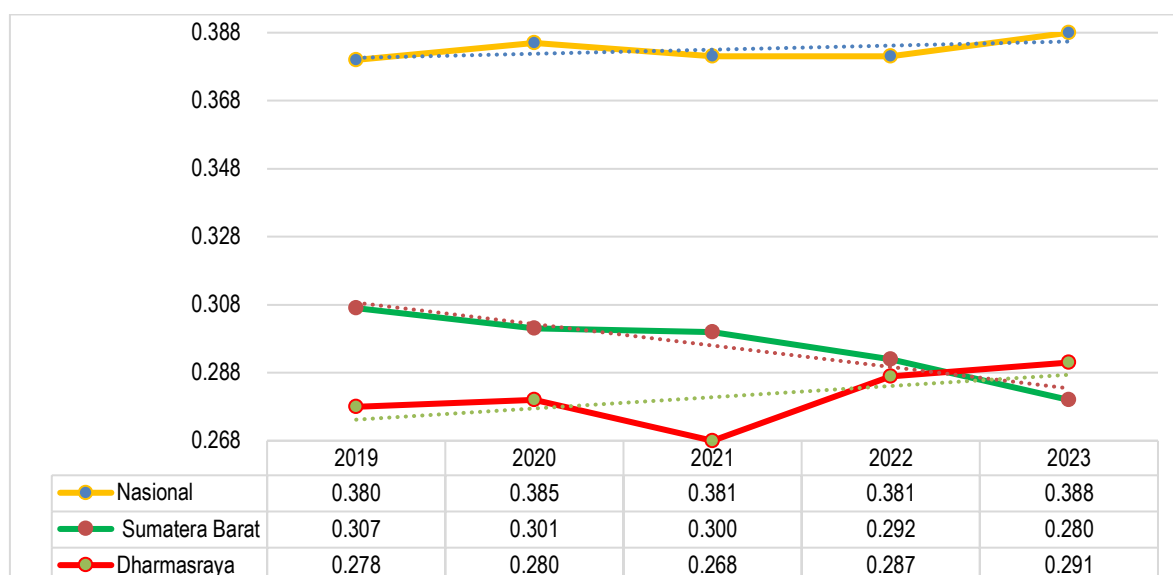
Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna).

Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:

1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.
3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.

Rasio Gini Dharmasraya maupun Provinsi Sumatera Barat tergolong pada ketimpangan rendah sehingga disini dipandang bahwa pemerataan pendapatan di masyarakatnya Berbeda dengan capaian nasional yang tergolong pada ketimpangan sedang.

Gambar 2-24 Rasio Gini Tahun 2019-2023 (indeks)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

2.4.2.5. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah kabupaten tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Terhitung sejak Januari 2024, perhitungan inflasi Sumatera Barat terdapat penambahan kabupaten/kota sampel IHK, dimana sebelumnya hanya dilakukan di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan saat ini terdapat penambahan di Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga kabupaten/kota sampel IHK saat ini sudah berjumlah 4 daerah. Penambahan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat dilakukan pasca penyesuaian diagram timbang tahun dasar perhitungan inflasi menggunakan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sejalan dengan hal tersebut, tracking inflasi Provinsi Sumatera Barat ke depan akan memperhitungkan kondisi dan risiko yang bersumber dari 2 (dua) kabupaten tambahan tersebut.

Tabel 2-29 Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota sampel inflasi pada Januari 2024 (persen)

Indikator	Sumatera Barat	Padang	Bukittinggi	Dharmasraya	Pasaman Barat
% mtm	-0,32	-0,09	-0,27	-0,25	-0,19
% ytd	-0,32	-0,09	-0,27	-0,25	-0,19
% yoy	2,57	2,43	1,38	2,28	3,73

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Sumatera Barat, Tahun 2024

Pada Januari 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Dharmasraya sebesar 2,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,72.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,30 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,34 persen; kelompok transportasi sebesar 0,78 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,38 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,58 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,57 persen. Sementara itu dua indeks kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,77 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen;

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Dharmasraya bulan Januari 2024 masing-masing sebesar 0,25 persen.

2.5. Sejarah Kejadian Bencana

2.5.1. Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Dharmasraya

Dengan karakteristik daerah yang memiliki banyak aliran sungai terutama daerah aliran sungai Batanghari, serta kontur daerah yang agak landai, pada musim hujan sering terjadi banjir pada beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Pulau Punjung (Jorong Kampung Surau dan Pelayangan), beberapa jorong di Kecamatan Timpeh serta di Kecamatan Padang Laweh. Bencana kebakaran lahan seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu diiringi oleh kabut asap yang menyelimuti seluruh kecamatan, dampaknya juga pada masalah kekeringan di sejumlah wilayah, hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan air bersih, hal ini terjadi Kecamatan Koto Salak dan Kecamatan Timpeh. Sedangkan daerah potensi bencana longsor/pergerakan tanah sering terjadi di Kecamatan Silago, dan Kecamatan Pulau Punjung (Sialang dan Kampung Surau).

Berdasarkan sejarahnya, kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Bencana yang sifatnya kombinasi antara bencana hidrometeorologi dan geologi seperti Tanah longsor sebanyak 2 kali disusul banjir sebanyak 25 kali; cuaca ekstrim berupa pohon tumbang sebanyak 20 kali; gelombang ekstrim berupa kekeringan dengan 25 kali. Selama tahun 2023 telah terjadi bencana yang ditangani oleh BPBD tercatat sebanyak 78 kejadian, dimana

1. Cuaca ekstrim berupa angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang mencapai 20 kejadian,
2. Tanah longsor 2 kejadian,,
3. Banjir 25 kejadian,
4. Kekeringan 25 Kejadian, dan
5. Kasus orang hanyut sebanyak 6 kejadian.

2021 bencana yang terjadi tercatat sebanyak 427 kejadian, bencana hidrometeorologi menduduki urutan pertama (240 kejadian), diikuti tanah longsor (155 kejadian), banjir genangan akibat luapan sungai (31 kejadian) dan gelombang ekstrim/abrasi yang merupakan dampak ikutan badai tropis (1 kejadian).

Tabel 2-30 Sejarah Kejadian Bencana 2023

No	Bencana	Kasus	Fasilitas Terdampak								
			KK	Jiwa	Rumah	Faskes	Rumah Ibadah	Sekolah	Jalan/Jembatan	Kolam Ikan	Lahan (Ha)
1	Banjir	25	1.845	6.277	1.846	6	13	13	4 Km / 4 Unit	5	310
2	Longsor	2	24	96	24						
3	Kekeringan	25	782	0	763						
4	Pohon Tumbang	20	1	0	9		1				
5	Orang Hanyut	6		6							
Total		78	2.658	6.379	2.642	6	14	13	4	5	310

Sumber : BPBD Kabupaten Dharmasraya, 2024

2.5.2. Potensi Bencana di Kabupaten Dharmasraya

Potensi bencana di Kabupaten Dharmasraya diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana dan data hasil kajian bencana serta kejadian bencana yang sedang berlangsung dan tidak tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya. Dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Dharmasraya yang berdasarkan dari catatan kejadian bencana DIBI, diketahui bahwa wilayah Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi terjadi 6 jenis bencana. Potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana meliputi 6 (Enam) jenis bencana yaitu :

Tabel 2-31 Potensi Bencana di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Bencana
1	Banjir
2	Kebakaran Hutan dan Lahan
3	Kekeringan
4	Angin Puting Beliung (Cuaca Ekstrem)
5	Banjir Bandang
6	Tanah Longsor

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

BAB 3. PENILAIAN RISIKO BENCANA

Risiko bencana dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Dengan dilakukannya penilaian risiko bencana kita dapat mengidentifikasi potensi risiko bencana di suatu daerah.

Hasil dari penilaian risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain itu, hasil dari pengkajian risiko bencana ini juga dapat dituangkan dalam peta risiko bencana untuk setiap jenis bencana dan juga peta risiko multi bahaya.

Komponen pengkajian risiko bencana pada dasarnya disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang berasal dari kementerian/lembaga di tingkat nasional. Pengkajian risiko bencana didasarkan pada komponen yang digunakan terdiri dari ancaman, kerentanan dan kapasitas di Kabupaten Dharmasraya.

Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Selain tingkat risiko, kajian diharapkan mampu menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Di tingkat masyarakat hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana.

3.1. Ancaman

Pengkajian ancaman (bahaya) dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur bahaya yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.

Berdasarkan hasil kajian bahaya di Kabupaten Dharmasraya yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2026, maka diketahui kelas dan luas bahaya untuk masing-masing bencana, seperti diuraikan pada sub-bab berikut.

3.1.1. Ancaman Bencana Banjir

Hasil Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2026 terhadap potensi luas dari risiko banjir menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya dikategorikan memiliki potensi tinggi akan risiko banjir dengan total luas terdampak mencapai 478 Km². Berdasarkan kajian tersebut juga diketahui bahwa 6 (enam) Kecamatan memiliki potensi tinggi terhadap risiko banjir, 1 (satu) Kecamatan dengan risiko sedang, dan 4 (empat) Kecamatan dengan risiko rendah. Lebih rinci terkait gambaran luas dan kecamatan yang memiliki potensi risiko banjir di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 3-1 berikut.

Tabel 3-1 Luas Bencana Banjir

No	Kecamatan	Risiko Banjir				
		Luas (Km2)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Sungai Rumbai	-	1,14	3,19	4,33	Rendah
2	Koto Besar	22,7	0,01	49,7	72,41	Tinggi
3	Asam Jujuhan	0,01	9,2	16,8	26,01	Rendah
4	Koto Baru	0,5	29,7	44,2	74,4	Tinggi
5	Koto Salak	0,09	15,7	28,9	44,69	Rendah
6	Tiumang	0,1	9,8	15,4	25,3	Tinggi
7	Padang Laweh	0,4	7,5	13,2	21,1	Sedang
8	Sitiung	0,9	18,5	39,9	59,3	Tinggi
9	Timpeh	0,06	14,5	46,7	61,26	Tinggi
10	Pulau Pujung	0,7	25,4	52,4	78,5	Tinggi
11	Sembilan Koto	-	2,7	8,7	11,4	Rendah
Kab. Dharmasraya		25,46	133,01	315,9	478,7	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Tabel di atas diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya banjir dengan tingkat risiko banjir yang bervariasi. Secara keseluruhan, bahaya banjir memberikan dampak luasan bahaya di Kabupaten Dharmasraya dengan kelas bahaya tinggi.

Kecamatan dengan risiko banjir tertinggi adalah Koto Besar, Koto Baru, Tiumang, Sitiung, Timpeh, dan Pulau Pujung. Kecamatan-kecamatan ini memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan sebagian besar wilayahnya berada dalam kategori risiko banjir tinggi. Misalnya, Kecamatan Pulau Pujung memiliki 52,4 km² berada dalam kategori risiko banjir tinggi.

Di sisi lain, terdapat kecamatan dengan risiko banjir rendah seperti Sungai Rumbai, Asam Jujuhan, Koto Salak, dan Sembilan Koto. Kecamatan Asam Jujuhan dan Koto Salak juga memiliki sebagian besar wilayahnya dalam kategori risiko banjir rendah. Kecamatan Padang Laweh memiliki risiko banjir sedang dengan luas wilayah 21,1 km², di mana sebagian besar wilayahnya berada dalam kategori risiko banjir sedang dan tinggi.

Secara keseluruhan, Kabupaten Dharmasraya memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan variasi tingkat risiko banjir di setiap kecamatannya. Kecamatan-kecamatan dengan risiko banjir tinggi perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya mitigasi dan penanggulangan banjir untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

3.1.2. Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dari kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan parameter – parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, memberikan output besaran potensi luas dan kelas bahaya di setiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut:

Tabel 3-2 Luas bencana kebakaran hutan dan lahan

No	Kecamatan	Bahaya				
		Luas (Km²)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Sungai Rumbai	2.1	28.1	9.7	39.9	Rendah
2	Koto Besar	29.4	123.9	375.1	528.4	Tinggi
3	Asam Jujuhan	37.6	279.5	111.9	429	Tinggi
4	Koto Baru	4.7	64.3	128.9	197.9	Tinggi
5	Koto Salak	17.9	36.7	52.5	107.1	Tinggi
6	Tiumang	12	41.5	68.8	122.3	Tinggi
7	Padang Laweh	5.07	31.6	10.1	46.77	Sedang
8	Sitiung	57.6	56.4	47.6	161.6	Tinggi
9	Timpeh	56.2	150.5	64	270.7	Sedang
10	Pulau Pujung	108.2	125.1	197.5	430.8	Tinggi
11	Sembilan Koto	339.9	76.9	30.6	370.5	Rendah
Kab. Dharmasraya		670.67	937.6	1096.7	2704.97	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Tabel di atas diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya Kebakaran hutan dan lahan dengan total luas wilayah berisiko seluas 2.704,97 km² yang terbagi ke dalam beberapa kecamatan dengan tingkat bahaya yang bervariasi.

Kecamatan dengan tingkat bahaya tertinggi adalah Koto Besar, Asam Jujuhan, Koto Baru, Koto Salak, Tiumang, Sitiung, dan Pulau Punjung. Kecamatan-kecamatan ini memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan sebagian besar wilayahnya berada dalam kategori bahaya tinggi. Misalnya, Kecamatan Koto Besar terindikasi 375,1 km² lahannya berada dalam kategori bahaya tinggi Karhutla.

Di sisi lain, terdapat kecamatan dengan tingkat bahaya rendah seperti Sungai Rumbai dan Sembilan Koto. Kecamatan Sungai Rumbai dengan sebagian besar wilayahnya berada dalam kategori bahaya sedang dan tinggi, namun secara keseluruhan masih dikategorikan sebagai bahaya rendah. Kecamatan Sembilan Koto memiliki luas wilayah yang cukup besar namun sebagian besar wilayahnya berada dalam kategori bahaya rendah. Kecamatan Padang Laweh dan Timpeh memiliki tingkat bahaya sedang. Kecamatan Padang Laweh sebagian besar wilayahnya berada dalam kategori bahaya sedang dan tinggi, begitu juga dengan Kecamatan Timpeh yang sebagian besar wilayahnya berada dalam kategori bahaya sedang.

Secara keseluruhan, Kabupaten Dharmasraya memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan variasi tingkat bahaya di setiap kecamatannya. Kecamatan-kecamatan dengan tingkat bahaya tinggi perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bahaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Apalagi bahaya kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak luasan bahaya di Kabupaten Dharmasraya dengan kelas bahaya tinggi

3.1.3. Ancaman Bencana Banjir Bandang

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dari Banjir Bandang dengan menggunakan parameter – parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, memerikan output besaran potensi luas dan kelas bahaya di setiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut.

Tabel 3-3 Luas bencana Banjir Bandang

No	Kecamatan	Bahaya				
		Luas (Km ²)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Sungai Rumbai	-	-	-	-	Rendah
2	Koto Besar	-	-	-	-	Rendah
3	Asam Jujuhan	-	-	7,1	7,1	Rendah
4	Koto Baru	-	-	-	-	Rendah
5	Koto Salak	-	-	6,9	6,9	Rendah
6	Tiumang	-	-	18,5	18,5	Tinggi
7	Padang Laweh	-	-	11,2	11,2	Tinggi
8	Sitiung	-	-	23,6	23,6	Tinggi
9	Timpeh	-	-	1,1	1,1	Rendah
10	Pulau Punjung	-	-	33,5	33,5	Tinggi
11	Sembilan Koto	-	-	94,3	94,3	Tinggi
Kab. Dharmasraya		-	-	196,2	196,2	Rendah

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya banjir bandang. Secara keseluruhan, bahaya banjir bandang luas wilayah yang terkena dampak bahaya banjir bandang di Kabupaten Dharmasraya sebesar 196,2 km², yang dikategorikan dalam kelas bahaya rendah. Terkait pembagian kategori maka Kecamatan-kecamatan dikategorikan ke dalam tiga kelas bahaya: rendah, sedang, dan tinggi yaitu :

1. Sungai Rumbai, Koto Besar, Koto Baru, dan Timpeh tidak memiliki wilayah yang terkena dampak bahaya, sehingga dikategorikan dalam kelas bahaya rendah.
2. Asam Jujuhan dan Koto Salak memiliki wilayah yang terkena dampak bahaya sebesar 7,1 km² dan 6,9 km², dan keduanya dikategorikan dalam kelas bahaya rendah.
3. Tiumang, Padang Laweh, Sitiung, Pulau Punjung, dan Sembilan Koto memiliki wilayah yang terkena dampak bahaya yang lebih besar, dengan luas masing-masing 18,5 km², 11,2 km², 23,6 km², 33,5 km², dan 94,3 km². Oleh karena itu, mereka dikategorikan dalam kelas bahaya tinggi.

3.1.4. Ancaman Bencana Tanah Longsor

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dari longsor menunjukkan klasifikasi bahaya di berbagai kecamatan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan luas wilayah yang terkena dampak. Kecamatan Sungai Rumbai hanya terdampak seluas 0,6 km² yang dikategorikan sebagai bahaya sedang. Kecamatan Koto Besar terdampak seluas 324,7 km² dengan klasifikasi bahaya sedang, di mana 11,6 km² termasuk dalam kategori rendah, 262,6 km² dalam kategori sedang, dan 50,5 km² dalam kategori tinggi.

Tabel 3-4 Luas bencana Longsor

No	Kecamatan	Bahaya				
		Luas (Km ²)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Sungai Rumbai	-	0,6	-	0,6	Rendah
2	Koto Besar	11,6	262,6	50,5	324,7	Sedang
3	Asam Jujuhan	11,6	262,6	25	299,2	Sedang
4	Koto Baru	2,6	23,9	-	26,5	Rendah
5	Koto Salak	-	-	-	0	Rendah
6	Tiumang	2	54,3	-	56,3	Rendah
7	Padang Laweh	0,6	13,3	-	13,9	Rendah
8	Sitiung	1,8	61,2	-	63	Rendah
9	Timpeh	4	256,3	-	260,3	Rendah
10	Pulau Punjung	14	402,3	-	416,3	Rendah
11	Sembilan Koto	15	354	85	454	Sedang
Kab. Dharmasraya		37,4	1141,4	160,5	1914,8	Rendah

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Kecamatan Asam Jujuhan juga memiliki klasifikasi bahaya sedang dengan total terdampak seluas 299,2 km², terdiri dari 11,6 km² bahaya rendah, 262,6 km² bahaya sedang, dan 25 km² bahaya tinggi. Kecamatan Koto Baru memiliki luas terdampak 26,5 km² yang sebagian besar dikategorikan sebagai bahaya rendah dengan 2,6 km² bahaya rendah dan 23,9 km² bahaya sedang.

Kecamatan Koto Salak tidak memiliki data luas wilayah yang terkena bahaya, sehingga dikategorikan sebagai bahaya rendah. Kecamatan Tiumang memiliki luas terdampak 56,3 km² dengan 2 km² bahaya rendah dan 54,3 km² bahaya sedang. Kecamatan Padang Laweh memiliki luas terdampak 13,9 km² yang seluruhnya dikategorikan sebagai bahaya rendah.

Kecamatan Sitiung memiliki luas terdampak 63 km² dengan 1,8 km² bahaya rendah dan 61,2 km² bahaya sedang. Kecamatan Timpeh memiliki luas terdampak 260,3 km² yang sebagian besar dikategorikan sebagai bahaya sedang dengan 4 km² bahaya rendah dan 256,3 km² bahaya sedang. Kecamatan Pulau Punjung memiliki luas terdampak 416,3 km² yang seluruhnya dikategorikan sebagai bahaya rendah dengan 14 km² bahaya rendah dan 402,3 km² bahaya sedang.

Kecamatan Sembilan Koto memiliki total luas terdampak 454 km² dengan klasifikasi bahaya sedang, terdiri dari 15 km² bahaya rendah, 354 km² bahaya sedang, dan 85 km² bahaya tinggi. Secara keseluruhan, Kabupaten Dharmasraya memiliki total luas terdampak 1.914,8 km² dengan 37,4 km² bahaya rendah, 1141,4 km² bahaya sedang, dan 160,5 km² bahaya tinggi, yang dikategorikan sebagai bahaya rendah.

3.1.5. Ancaman Bencana Kekeringan

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana tahun 2022 potensi luas dari bencana kekeringan menunjukkan klasifikasi bahaya di berbagai kecamatan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan luas wilayah yang terkena dampak sebagaimana disajikan pada Tabel 3-5 menunjukkan klasifikasi bahaya kekeringan di berbagai kecamatan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan luas wilayah yang terkena dampak.

Kecamatan Sungai Rumbai memiliki luas terdampak 51,7 km² yang dikategorikan sebagai bahaya rendah. Kecamatan Koto Besar memiliki total luas terdampak 543,4 km² dengan klasifikasi bahaya rendah, di mana 479,1 km² termasuk dalam kategori rendah dan 64,3 km² dalam kategori tinggi.

Kecamatan Asam Jujuhan memiliki klasifikasi bahaya tinggi dengan total luas terdampak 464,3 km² yang seluruhnya termasuk dalam kategori tinggi. Kecamatan Koto Baru memiliki luas terdampak 549,1 km² yang sebagian besar dikategorikan sebagai bahaya rendah dengan 149,3 km² bahaya rendah dan 70 km² bahaya tinggi.

Kecamatan Koto Salak memiliki total luas terdampak 121,8 km² dengan klasifikasi bahaya sedang, terdiri dari 90 km² bahaya rendah dan 31,8 km² bahaya sedang. Kecamatan Tiumang memiliki luas terdampak 135,2 km² yang seluruhnya dikategorikan sebagai bahaya rendah.

Kecamatan Padang Laweh memiliki luas terdampak 53 km² yang seluruhnya dikategorikan sebagai bahaya rendah. Kecamatan Sitiung memiliki luas terdampak 184,5 km² dengan 177,9 km² bahaya rendah dan 6,6 km² bahaya sedang. Kecamatan Timpeh memiliki luas wilayah 283,3 km² yang seluruhnya dikategorikan sebagai bahaya rendah.

Kecamatan Pulau Punjung memiliki luas terdampak 458,7 km² yang sebagian besar dikategorikan sebagai bahaya rendah dengan 385,9 km² bahaya rendah dan 72,8 km² bahaya sedang. Kecamatan Sembilan Koto memiliki total luas terdampak 491,8 km² dengan klasifikasi bahaya sedang, terdiri dari 170,1 km² bahaya rendah dan 321,7 km² bahaya sedang.

Tabel 3-5 Luas bencana kekeringan

No	Kecamatan	Bahaya				
		Luas (Km ²)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Sungai Rumbai	51,7	-	-	51,7	Rendah
2	Koto Besar	479,1	-	64,3	543,4	Rendah
3	Asam Jujuhan	-	-	464,3	464,3	Tinggi
4	Koto Baru	149,3	-	70	549,1	Rendah
5	Koto Salak	90	31,8	-	121,8	Sedang
6	Tiumang	135,2	-	-	135,2	Rendah
7	Padang Laweh	53	-	-	53	Rendah
8	Sitiung	177,9	6,6	-	184,5	Rendah
9	Timpeh	283,3	-	-	283,3	Rendah
10	Pulau Pujung	385,9	72,8	-	458,7	Rendah
11	Sembilan Koto	170,1	321,7	-	491,8	Sedang
Kab. Dharmasrava		1975.5	432.9	598.6	3.007	Rendah

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Secara keseluruhan, Kabupaten Dharmasraya memiliki total luas terdampak 3.007 km² dengan 1.975,5 km² bahaya rendah, 432,9 km² bahaya sedang, dan 598,6 km² bahaya tinggi, yang dikategorikan sebagai bahaya rendah.

3.1.6. Ancaman Bencana Cuaca Ekstrem

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana tahun 2022 potensi luas dari bencana cuaca ekstrim secara keseluruhan, Kabupaten Dharmasraya memiliki total luas terdampak 2.661,34 km² dengan 1.836,72 km² bahaya rendah, 7,92 km² bahaya sedang, dan 816,7 km² bahaya tinggi, yang dikategorikan sebagai bahaya tinggi.

Tabel 3-6 Luas bencana Angin Puting Beliung

No	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (Km²)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Sungai Rumbai	12,21	0	39,6	51,81	Tinggi
2	Koto Besar	458,1	0,1	84,7	542,9	Sedang
3	Asam Jujuhan	392,8	0,7	70,6	464,1	Sedang
4	Koto Baru	90,4	0,04	128,8	210,24	Tinggi
5	Koto Salak	18,4	0	103,5	121,9	Tinggi
6	Tiumang	76,01	0,03	59,2	135,24	Tinggi
7	Padang Laweh	19,4	0,02	33,5	52,92	Sedang
8	Sitiung	72,9	0.04	106,5	179,4	Tinggi
9	Timpeh	157,7	4,6	76,5	238,8	Tinggi
10	Pulau Pujung	304,1	0,4	111,4	415,9	Tinggi
11	Sembilan Koto	234,7	2,03	2,4	239,13	Rendah
Kab. Dharmasraya		1.836,72	7,92	816,7	2.661,34	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Berdasarkan Tabel 3-6 menunjukkan klasifikasi bahaya di berbagai kecamatan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan luas wilayah yang terkena dampak. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki luas terdampak 51,81 km² yang dikategorikan sebagai bahaya tinggi, dengan 12,21 km² termasuk dalam kategori rendah dan 39,6 km² dalam kategori tinggi.

Kecamatan Koto Besar memiliki total luas terdampak 542,9 km² dengan klasifikasi bahaya sedang, di mana 458,1 km² termasuk dalam kategori rendah, 0,1 km² dalam kategori sedang, dan 84,7 km² dalam kategori tinggi. Kecamatan Asam Jujuhan juga memiliki klasifikasi bahaya sedang dengan total luas terdampak 464,1 km², terdiri dari 392,8 km² bahaya rendah, 0,7 km² bahaya sedang, dan 70,6 km² bahaya tinggi.

Kecamatan Koto Baru memiliki luas terdampak 210,24 km² yang dikategorikan sebagai bahaya tinggi, dengan 90,4 km² bahaya rendah dan 128,8 km² bahaya tinggi. Kecamatan Koto Salak memiliki total luas terdampak 121,9 km² yang seluruhnya dikategorikan sebagai bahaya tinggi, terdiri dari 18,4 km² bahaya rendah dan 103,5 km² bahaya tinggi.

Kecamatan Tiumang memiliki luas terdampak 135,24 km² yang seluruhnya dikategorikan sebagai bahaya tinggi, dengan 76,01 km² bahaya rendah dan 59,2 km² bahaya tinggi. Kecamatan Padang Laweh memiliki luas terdampak 52,92 km² yang dikategorikan sebagai bahaya sedang, dengan 19,4 km² bahaya rendah dan 33,5 km² bahaya tinggi.

Kecamatan Sitiung memiliki luas terdampak 179,4 km² yang dikategorikan sebagai bahaya tinggi, dengan 72,9 km² bahaya rendah dan 106,5 km² bahaya tinggi. Kecamatan Timpeh terdampak luas wilayah 238,8 km² yang dikategorikan sebagai bahaya tinggi, dengan 157,7 km² bahaya rendah, 4,6 km² bahaya sedang, dan 76,5 km² bahaya tinggi.

Kecamatan Pulau Punjung memiliki luas terdampak 415,9 km² yang dikategorikan sebagai bahaya tinggi, dengan 304,1 km² bahaya rendah, 0,4 km² bahaya sedang, dan 111,4 km² bahaya tinggi. Kecamatan Sembilan Koto memiliki total luas terdampak 239,13 km² yang dikategorikan sebagai bahaya rendah, terdiri dari 234,7 km² bahaya rendah, 2,03 km² bahaya sedang, dan 2,4 km² bahaya tinggi.

3.1.7. Rekapitulasi Bahaya

Penjabaran kajian bahaya setiap potensi bencana memperhatikan hasil yang berbeda-beda. Rangkuman hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya di Kabupaten Dharmasraya untuk setiap bencana sebagai berikut.

Tabel 3-7 Rekapitulasi bencana

No	Jenis Bencana	Luas(Km ²)	Kelas
1	Banjir	478.7	Tinggi
2	Kebakaran	2,704.9	Tinggi
3	Kekeringan	2,961.13	Rendah
4	Cuaca Ekstrem	2,661.34	Tinggi
5	Tanah Longsor	1,914.8	Rendah
6	Banjir Bandang	196.2	Rendah

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Berdasarkan Tabel 3-7 menunjukkan berbagai jenis bencana yang terjadi di wilayah tertentu beserta luas wilayah yang terkena dampak dan klasifikasi tingkat bahayanya.

Bencana banjir mencakup luas wilayah sebesar 478,7 km² dan dikategorikan sebagai bahaya tinggi. Kebakaran memiliki dampak yang paling luas dengan 2.704,9 km² dan juga dikategorikan sebagai bahaya tinggi. Kekeringan, meskipun mencakup wilayah yang lebih luas yaitu 2.961,13 km², dikategorikan sebagai bahaya rendah.

Cuaca ekstrem mempengaruhi wilayah seluas 2.661,34 km² dan dikategorikan sebagai bahaya tinggi. Tanah longsor mencakup wilayah seluas 1.914,8 km² dan dikategorikan sebagai bahaya rendah. Terakhir, banjir bandang mempengaruhi wilayah seluas 196,2 km² dan dikategorikan sebagai bahaya rendah.

Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran tentang luas wilayah yang terkena dampak oleh berbagai jenis bencana dan tingkat bahayanya, dengan kebakaran dan cuaca ekstrem menjadi bencana yang paling luas dan berbahaya.

3.2. Kerentanan

Kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman. Komponen – komponen sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan menjadi dasar penentuan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian fisik untuk menghasilkan potensi penduduk terpapar dan

potensi kerugian. Penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian menghasilkan kelas kerentanan di Kabupaten Dharmasraya.

3.2.1. Kerentanan terhadap Bencana Banjir

Kerentanan banjir adalah memperkirakan daerah-daerah yang mungkin menjadi sasaran banjir. Wilayah-wilayah yang rentan banjir biasanya terletak pada daerah datar, dekat dengan sungai, berada di daerah cekungan dan di daerah pasang surut air laut. Kerentanan banjir mengukur tingkat kerentanan suatu wilayah, infrastruktur, atau ekosistem terhadap banjir. Kerentanan banjir mempertimbangkan geografi, penggunaan lahan, ketahanan infrastruktur, dan kesiapan masyarakat

Tabel 3-8 Kerentanan bencana banjir

No	Kecamatan	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Asam Jujuhan	3,147	2,196	342	7	Rendah
2	Koto Baru	24,009	4,841	1,551	4	Tinggi
3	Koto Besar	12,494	3,026	765	3	Tinggi
4	Koto Salak	7,473	2,784	400	4	Tinggi
5	Padang Laweh	5,491	5,334	252	27	Tinggi
6	Pulau Punjung	34,957	4,972	2,816	3	Tinggi
7	Sembilan Koto	6,193	429	1,846	5	Sedang
8	Sitiung	18,079	4,148	1,292	3	Tinggi
9	Sungai Rumbai	3,806	11	176	3	Rendah
10	Timpeh	14,052	54	540	9	Tinggi
11	Tiumang	7,857	3,683	290	-	Sedang
Kab Dharmasraya		137,557	41,774	1,027	68	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Tabel di atas menggambarkan potensi penduduk yang terpapar di berbagai kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, serta klasifikasi tingkat risiko berdasarkan jumlah penduduk terpapar dan kelompok rentan.

1. Kecamatan Asam Jujuhan memiliki 3.147 jiwa penduduk terpapar, dengan 2.196 di antaranya merupakan penduduk usia rentan, 342 penduduk miskin, dan 7 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah rendah.
2. Kecamatan Koto Baru terdapat 24.009 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 4.841 penduduk usia rentan, 1.551 penduduk miskin, dan 4 penduduk disabilitas. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko tinggi.
3. Kecamatan Koto Besar memiliki 12.494 jiwa penduduk terpapar, dengan 3.026 penduduk usia rentan, 765 penduduk miskin, dan 3 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah tinggi.
4. Kecamatan Koto Salak terdapat 7.473 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 2.784 penduduk usia rentan, 400 penduduk miskin, dan 4 penduduk disabilitas. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko tinggi.
5. Kecamatan Padang Laweh memiliki 5.491 jiwa penduduk terpapar, dengan 5.334 penduduk usia rentan, 252 penduduk miskin, dan 27 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah tinggi.

6. Kecamatan Pulau Punjung terdapat 34.957 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 4.972 penduduk usia rentan, 2.816 penduduk miskin, dan 3 penduduk disabilitas. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko tinggi.
7. Kecamatan Sembilan Koto memiliki 6.193 jiwa penduduk terpapar, dengan 429 penduduk usia rentan, 1.846 penduduk miskin, dan 5 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah sedang.
8. Kecamatan Sitiung terdapat 18.079 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 4.148 penduduk usia rentan, 1.292 penduduk miskin, dan 3 penduduk disabilitas. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko tinggi.
9. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki 3.806 jiwa penduduk terpapar, dengan 11 penduduk usia rentan, 176 penduduk miskin, dan 3 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah rendah.
10. Kecamatan Timpeh terdapat 14.052 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 54 penduduk usia rentan, 540 penduduk miskin, dan 9 penduduk disabilitas. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko tinggi.
11. Kecamatan Tiumang memiliki 7.857 jiwa penduduk terpapar, dengan 3.683 penduduk usia rentan, 290 penduduk miskin, dan tidak ada penduduk disabilitas yang tercatat. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah sedang.

Secara keseluruhan, Kabupaten Dharmasraya memiliki 137.557 jiwa penduduk terpapar, dengan 41.774 penduduk usia rentan, 1.027 penduduk miskin, dan 68 penduduk disabilitas. Kabupaten ini dikategorikan dalam **kelas risiko tinggi**.

Tabel 3-9 Kerugian dan Kerentanan Lingkungan bencana banjir

No	Kecamatan	Kerugian (Juta Rupiah)			Kerusakan Lingkungan (Ha)		
		Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
1	Sungai Rumbai	221.164	5.311	226.476	Tinggi	0	Rendah
2	Koto Besar	234.583	55.662	235.352	Tinggi	27	Sedang
3	Asam Jujuhan	81.563	47.649	83.395	Tinggi	61	Tinggi
4	Koto Baru	721.919	22.477	722.221	Tinggi	86	Tinggi
5	Koto Salak	529.568	12.514	529.848	Tinggi	539	Tinggi
6	Tiumang	140.469	13.869	141.017	Tinggi	2.067	Tinggi
7	Padang Laweh	483.663	5.441	483.921	Tinggi	511	Tinggi
8	Sitiung	372.426	18.917	372.745	Tinggi	388	Tinggi
9	Timpeh	4.034.977	29.062	4.035.452	Tinggi	0	Rendah
10	Pulau Punjung	613.732	47.036	614.331	Tinggi	969	Tinggi
11	IX Koto	252.343	50.445	256.768	Tinggi	0	Rendah
Kab. Dharmasraya		7.686.412	308.388	7.697.445	Tinggi	4.648	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Potensi kerugian pada tabel di atas memperlihatkan kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terpapar bencana banjir. Secara keseluruhan, potensi kerugian fisik dan ekonomi bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya berada pada kelas tinggi, sedangkan potensi kerusakan lingkungan dominan berada pada kelas tinggi.

3.2.2. Kerentanan terhadap Bencana Banjir Bandang

Banjir bandang merupakan banjir yang datang secara tiba-tiba dengan jumlah debit air yang sangat besar yang bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor seperti hujan yang ekstrem, tipologi daerah aliran sungai (DAS) serta alur-alur sungai yang rawan banjir bandang, adanya bendungan air akibat dari sampah vegetasi atau bekas longsor yang menutupi aliran sungai, jebolnya bendungan atau tanggul dan kembalinya alur sungai setelah diluruskan, dan atau bertemunya puncak banjir pada muara dua alur sungai juga menjadi salah satu penyebab dari banjir bandang.. Hal tersebut biasanya terjadi karena adanya bendungan air pada aliran sungai. banjir bandang.

Tabel 3-10 Kerentanan Banjir Bandang

No	Kecamatan	Potensi Penduduk Terpapar(Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Asam Jujuhan	0	0	0	0	Rendah
2	Koto Baru	0	0	0	0	Rendah
3	Koto Besar	0	0	0	0	Rendah
4	Koto Salak	1.401	522	75	0	Rendah
5	Padang Laweh	0	0	0	0	Rendah
6	Pulau Punjung	794	1.130	640	0	Rendah
7	Sembilan Koto	6.668	4.620	1.988	5	Tinggi
8	Sitiung	2.658	610	190	0	Rendah
9	Sungai Rumbai	0	0	0	0	Rendah
10	Timpeh	0	0	0	0	Rendah
11	Tiumang	1.041	508	40	0	Rendah
Kab. Dharmasraya		10.367	7.390	2.933	5	Rendah

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Tabel di atas menggambarkan potensi penduduk yang terpapar di berbagai kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, serta klasifikasi tingkat risiko berdasarkan jumlah penduduk terpapar dan kelompok rentan.

1. Kecamatan Asam Jujuhan, Koto Baru, Koto Besar, Padang Laweh, Sungai Rumbai, dan Timpeh ini tidak memiliki penduduk yang terpapar, sehingga dikategorikan dalam kelas risiko rendah.
2. Kecamatan Koto Salak memiliki 1.401 jiwa penduduk terpapar, dengan 522 di antaranya merupakan penduduk usia rentan dan 75 penduduk miskin. Tidak ada penduduk disabilitas yang tercatat. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah rendah.
3. Kecamatan Pulau Punjung terdapat 794 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 1.130 penduduk usia rentan dan 640 penduduk miskin. Tidak ada penduduk disabilitas yang tercatat. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko rendah.
4. Kecamatan Sembilan Koto memiliki 6.668 jiwa penduduk terpapar, dengan 4.620 penduduk usia rentan, 1.988 penduduk miskin, dan 5 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah tinggi.

5. Kecamatan Sitiung terdapat 2.658 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 610 penduduk usia rentan dan 190 penduduk miskin. Tidak ada penduduk disabilitas yang tercatat. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko rendah.
6. Kecamatan Tiumang memiliki 1.041 jiwa penduduk terpapar, dengan 508 penduduk usia rentan dan 40 penduduk miskin. Tidak ada penduduk disabilitas yang tercatat. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah rendah.

Secara keseluruhan, Kabupaten Dharmasraya memiliki 10.367 jiwa penduduk terpapar, dengan 7.390 penduduk usia rentan, 2.933 penduduk miskin, dan 5 penduduk disabilitas. Kabupaten ini dikategorikan dalam kelas risiko rendah.

Tabel 3-11 Kerugian dan Kerentanan Lingkungan Banjir Bandang

No	Kecamatan	Kerugian (Juta Rupiah)			Kerusakan Lingkungan (Ha)		
		Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
1	Sungai Rumbai	0	0	0	Rendah	303	Rendah
2	Koto Besar	0	0	0	Rendah	0	Rendah
3	Asam Jujuhan	0	47,694	47,694	Rendah	0	Rendah
4	Koto Baru	0	0	0	Rendah	0	Rendah
5	Koto Salak	6,079	1,252	60,923	Rendah	0	Rendah
6	Tiumang	354	13,870	14,224	Rendah	101	Rendah
7	Padang Laweh	0	0	0	Rendah	8,996	Tinggi
8	Sitiung	1,293	18,926	20,219	Rendah	0	Rendah
9	Timpeh	0	0	0	Rendah	0	Rendah
10	Pulau Punjung	999	47,053	48,052	Rendah	0	Rendah
11	IX Koto	388	50,449	50,837	Rendah	0	Rendah
Kab. Dharmasraya			190,521	187,121	Rendah	9,400	Rendah

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Potensi kerugian pada tabel di atas memperlihatkan kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terpapar bencana Banjir Bandang. Secara keseluruhan, total potensi kerugian (fisik dan ekonomi) dan potensi kerusakan lingkungan bencana Banjir Bandang di Kabupaten Dharmasraya berada pada kelas Rendah. Penentuan kelas tersebut diperoleh dari kelas maksimal per kecamatan.

3.2.3. Kerentanan terhadap Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak kebawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor diawali oleh air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Parameter parameter sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan menjadi dasar penentuan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian fisik untuk menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Pengabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian menghasilkan kelas kerentanan di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 3-12 Kerentanan longsor

Potensi Penduduk Terpapar(Jiwa)						
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
			Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Asam Jujuhan	3,146	2196	342	7	Tinggi
2	Koto Baru	510	103	33	0	Rendah
3	Koto Besar	734	178	45	0	Rendah
4	Koto Salak	0	0	0	0	Rendah
5	Padang Laweh	261	254	12	1	Rendah
6	Pulau Punjung	397	565	320	0	Rendah
7	Sembilan Koto	3.810	2.640	1.136	3	Tinggi
8	Sitiung	531	122	38	0	Rendah
9	Sungai Rumbai	0	0	0	0	Rendah
10	Timpeh	312	120	12	0	Rendah
11	Tiumang	260	127	10	0	Rendah
Kab. Dharmasraya		6.818	6.305	1.948	11	Rendah

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Tabel Tabel 3-12 menggambarkan potensi penduduk yang terpapar di berbagai kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, serta klasifikasi tingkat risiko berdasarkan jumlah penduduk terpapar dan kelompok rentan.

1. Kecamatan Asam Jujuhan ini memiliki 3.146 jiwa penduduk terpapar, dengan 2.196 di antaranya merupakan penduduk usia rentan, 342 penduduk miskin, dan 7 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah tinggi.
2. Kecamatan Koto Baruterhadap 510 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 103 penduduk usia rentan dan 33 penduduk miskin. Tidak ada penduduk disabilitas yang tercatat. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko rendah.
3. Kecamatan Koto Besar memiliki 734 jiwa penduduk terpapar, dengan 178 penduduk usia rentan dan 45 penduduk miskin. Tidak ada penduduk disabilitas yang tercatat. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah rendah.
4. Kecamatan Koto Salak tidak memiliki penduduk yang terpapar, sehingga dikategorikan dalam kelas risiko rendah.
5. Kecamatan Padang Laweh memiliki 261 jiwa penduduk terpapar, dengan 254 di antaranya merupakan penduduk usia rentan, 12 penduduk miskin, dan 1 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah rendah.
6. Kecamatan Pulau Punjungterhadap 397 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 565 penduduk usia rentan dan 320 penduduk miskin. Tidak ada penduduk disabilitas yang tercatat. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko rendah.
7. Kecamatan Sembilan Koto memiliki 3.810 jiwa penduduk terpapar, dengan 2.640 penduduk usia rentan, 1.136 penduduk miskin, dan 3 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah tinggi.
8. Kecamatan Sitiungterhadap 531 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 122 penduduk usia rentan dan 38 penduduk miskin. Tidak ada penduduk disabilitas yang tercatat. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko rendah.

9. Kecamatan Sungai Rumbai tidak memiliki penduduk yang terpapar, sehingga dikategorikan dalam kelas risiko rendah.
10. Kecamatan Timpeh memiliki 312 jiwa penduduk terpapar, dengan 120 di antaranya merupakan penduduk usia rentan dan 12 penduduk miskin. Tidak ada penduduk disabilitas yang tercatat. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah rendah.
11. Kecamatan Tiumang memiliki 260 jiwa penduduk terpapar, dengan 127 penduduk usia rentan dan 10 penduduk miskin. Tidak ada penduduk disabilitas yang tercatat. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah rendah.

Secara keseluruhan, Kabupaten Dharmasraya memiliki 6.818 jiwa penduduk terpapar, dengan 6.305 penduduk usia rentan, 1.948 penduduk miskin, dan 11 penduduk disabilitas. Kabupaten ini dikategorikan dalam kelas risiko rendah.

Tabel 3-13 Kerentanan Lingkungan dan Kerugian Longsor

No	Kecamatan	Kerugian (Juta Rupiah)			Kerusakan Lingkungan (Ha)		
		Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
1	Sungai Rumbai	0	0	0	0	39,074	Tinggi
2	Koto Besar	3,161	139,351	142,513	Rendah	797	Rendah
3	Asam Jujuhan	19,739	119,190	138,929	Rendah	0	Rendah
4	Koto Baru	12,951	56,449	69,400	Rendah	0	Rendah
5	Koto Salak	0	0	0	0	0	Rendah
6	Tiumang	3,376	34,721	38,098	Rendah	0	Rendah
7	Padang Laweh	9,444	13,705	23,149	Rendah	0	Rendah
8	Sitiung	5,155	47,469	52,624	Sedang	2,087	Rendah
9	Timpeh	745	72,707	73,452	Tinggi	0	Rendah
10	Pulau Punjung	5,131	117,764	122,896	Tinggi	0	Rendah
11	IX Koto	8,653	126,201	134,855	Tinggi	0	Rendah
Kab. Dharmasraya		68.355	727,560	795,921	Rendah	41,958	Rendah

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Potensi kerugian pada tabel di atas memperlihatkan kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terpapar bencana tanah longsor. Secara keseluruhan, total potensi kerugian (fisik dan ekonomi) dan potensi kerusakan lingkungan bencana tanah longsor di Kabupaten Dharmasraya berada pada kelas Rendah. Penentuan kelas tersebut diperoleh dari kelas maksimal per kecamatan

3.2.4. Kerentanan terhadap Bencana Kekeringan

Kekeringan biasanya suatu peristiwa yang terjadi pada musim kemarau, apalagi ketika musim kemarau panjang melanda. Definisi kekeringan secara umum adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Parameter parameter sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan menjadi dasar penentuan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian fisik untuk menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Pengabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian menghasilkan kelas kerentanan di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 3-14 Kerentanan bencana kekeringan

Potensi Penduduk Terpapar(Jiwa)						
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
			Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Asam Jujuhan	9,441	9,53	6,11	21	Rendah
2	Koto Baru	32,693	2,75	12,43	6	Tinggi
3	Koto Besar	27,193	3,31	9,85	7	Tinggi
4	Koto Salak	17,749	5,07	5,61	11	Sedang
5	Padang Laweh	6,537	13,76	1,78	32	Rendah
6	Pulau Punjung	46,08	1,95	22,04	4	Tinggi
7	Sembilan Koto	5,24	5,19	9,25	4	Rendah
8	Sitiung	28,713	3,13	12,29	5	Tinggi
9	Sungai Rumbai	22,833	3,94	6,29	21	Tinggi
10	Timpeh	17,175	5,24	3,87	11	Sedang
11	Tiumang	13,818	7,05	3,04	0	Sedang
Kab. Dharmasraya		227,471	60,93	92,55	122	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Tabel Tabel 3-14 menggambarkan potensi penduduk yang terpapar di berbagai kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, serta klasifikasi tingkat risiko berdasarkan jumlah penduduk terpapar dan kelompok rentan.

1. Kecamatan Asam Jujuhan memiliki 9.441 jiwa penduduk terpapar, dengan 9,53% di antaranya merupakan penduduk usia rentan, 6,11% penduduk miskin, dan 21 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah rendah.
2. Kecamatan Koto Baru terdapat 32.693 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 2,75% penduduk usia rentan, 12,43% penduduk miskin, dan 6 penduduk disabilitas. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko tinggi.
3. Kecamatan Koto Besar memiliki 27.193 jiwa penduduk terpapar, dengan 3,31% penduduk usia rentan, 9,85% penduduk miskin, dan 7 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah tinggi.
4. Kecamatan Koto Salak memiliki 17.749 jiwa penduduk terpapar, dengan 5,07% di antaranya merupakan penduduk usia rentan, 5,61% penduduk miskin, dan 11 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah sedang.
5. Kecamatan Padang Laweh memiliki 6.537 jiwa penduduk terpapar, dengan 13,76% di antaranya merupakan penduduk usia rentan, 1,78% penduduk miskin, dan 32 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah rendah.
6. Kecamatan Pulau Punjung terdapat 46.080 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 1,95% penduduk usia rentan, 22,04% penduduk miskin, dan 4 penduduk disabilitas. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko tinggi.
7. Kecamatan Sembilan Koto memiliki 5.240 jiwa penduduk terpapar, dengan 5,19% di antaranya merupakan penduduk usia rentan, 9,25% penduduk miskin, dan 4 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah rendah.
8. Kecamatan Sitiung terdapat 28.713 jiwa penduduk terpapar di kecamatan ini, dengan 3,13% penduduk usia rentan, 12,29% penduduk miskin, dan 5 penduduk disabilitas. Kecamatan ini dikategorikan dalam kelas risiko tinggi.

9. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki 22.833 jiwa penduduk terpapar, dengan 3,94% di antaranya merupakan penduduk usia rentan, 6,29% penduduk miskin, dan 21 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah tinggi.
10. Kecamatan Timpeh memiliki 17.175 jiwa penduduk terpapar, dengan 5,24% di antaranya merupakan penduduk usia rentan, 3,87% penduduk miskin, dan 11 penduduk disabilitas. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah sedang.
11. Kecamatan Tiumang memiliki 13.818 jiwa penduduk terpapar, dengan 7,05% di antaranya merupakan penduduk usia rentan, 3,04% penduduk miskin, dan tidak ada penduduk disabilitas yang tercatat. Kelas risiko untuk kecamatan ini adalah sedang.

Secara keseluruhan, Kabupaten Dharmasraya memiliki 227.471 jiwa penduduk terpapar, dengan 60,93% penduduk usia rentan, 92,55% penduduk miskin, dan 122 penduduk disabilitas. Kabupaten ini dikategorikan dalam kelas risiko tinggi.

Tabel 3-15 Kerugian bencana kekeringan

No	Kecamatan	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
1	Sungai Rumbai	0	5,315	5,315	Rendah	513	Tinggi
2	Koto Besar	0	55,779	55,779	Tinggi	195	Rendah
3	Asam Jujuhan	0	47,692	47,692	Tinggi	651	Tinggi
4	Koto Baru	0	22,490	22,490	Rendah	0	Rendah
5	Koto Salak	0	12,533	12,533	Rendah	591	Tinggi
6	Tiumang	0	13,889	13,889	Rendah	10.915	Tinggi
7	Padang Laweh	0	5,466	5,466	Rendah	7.513	Tinggi
8	Sitiung	0	18,977	18,977	Rendah	3.399	Tinggi
9	Timpeh	0	28,113	28,113	Rendah	0	Rendah
10	Pulau Punjung	0	47,194	47,194	Tinggi	13.053	Tinggi
11	IX Koto	0	50,594	50,594	Tinggi	0	Rendah
Kab. Dharmasraya		0	309,889	309,889	Rendah	36.830	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Potensi kerugian pada tabel di atas memperlihatkan kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terpapar bencana kekeringan. Secara keseluruhan, potensi kerugian fisik dan ekonomi bencana kekeringan di Kabupaten Dharmasraya berada pada kelas tinggi, sedangkan potensi kerusakan lingkungan dominan berada pada kelas tinggi.

3.2.5. Kerentanan terhadap Bencana Cuaca Ekstrem

cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim yang ditandai dengan kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian, khususnya terhadap keselamatan jiwa dan harta. Contoh peristiwa cuaca dan iklim ekstrem antara lain, tetapi tidak terbatas pada, gelombang panas, gelombang dingin, curah hujan lebat, kekeringan, tornado, dan siklon tropis . Dampak buruk dari peristiwa cuaca dan iklim ekstrem diperkuat oleh meningkatnya intensitas, durasi, dan jangkauan spasialnya. Untuk Kabupaten Dharmasraya cuaca ekstrim ini biasanya berupa angin kencang / puting beliung yang berakibat tumbang pohon ataupun kerusakan pada bangunan seperti atap atau kerusakan bangunan lainnya.

Tabel 3-16 Kerentanan bencana Angin Puting Beliung

Potensi Penduduk Terpapar(Jiwa)						
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
			Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Asam Jujuhan	9.441	6.588	532	21	Sedang
2	Koto Baru	32.693	6.592	726	6	Tinggi
3	Koto Besar	27.193	6.586	720	7	Tinggi
4	Koto Salak	17.749	6.612	700	11	Tinggi
5	Padang Laweh	6.537	6.350	48	32	Sedang
6	Pulau Punjung	46.08	6.554	1.216	4	Tinggi
7	Sembilan Koto	9.527	6.600	1.846	8	Sedang
8	Sitiung	28.713	6.588	836	5	Tinggi
9	Sungai Rumbai	22.833	6.600	616	21	Tinggi
10	Timpeh	17.175	6.600	240	11	Tinggi
11	Tiumang	13.818	6.477	300	0	Sedang
Kab. Dharmasraya		185.679	72.147	7.780	126	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan potensi penduduk terpapar bencana angin puting beliung berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan luasan bahaya dan jumlah penduduk yang tinggal dan beraktivitas di area rentan bahaya angin puting beliung. Secara keseluruhan, potensi penduduk terpapar bencana angin puting beliung di Kabupaten Dharmasraya berada pada kelas Sedang. Sementara itu, hasil pengkajian potensi kerugian (rupiah dan lingkungan) bencana angin puting beliung untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-17 Kerugian Angin Puting Beliung

No	Kecamatan	Kerugian (Juta Rupiah)					Kerusakan Lingkungan (Ha)
		Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
1	Sungai Rumbai	666,184	5,312	671,496	Tinggi	0	Rendah
2	Koto Besar	104,953	55,799	160,752	Tinggi	0	Rendah
3	Asam Jujuhan	38,177	48,035	86,212	Rendah	0	Rendah
4	Koto Baru	313,441	22,490	335,932	Tinggi	0	Rendah
5	Koto Salak	326,554	12,525	339,080	Tinggi	0	Rendah
6	Tiumang	215,084	123,880	338,964	Tinggi	0	Rendah
7	Padang Laweh	124,036	5,452	129,488	Tinggi	0	Rendah
8	Sitiung	195,518	18,979	214,497	Tinggi	0	Rendah
9	Timpeh	89,422	29,094	118,516	Sedang	0	Rendah
10	Pulau Punjung	119,163	47,573	166,736	Tinggi	0	Rendah
11	IX Koto	33,885	51,216	85,102	Rendah	0	Rendah
Kab. Dharmasraya		2.226.420	310,359	2.646.780	Tinggi	0	Rendah

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Potensi kerugian pada tabel di atas memperlihatkan kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terpapar bencana angin puting beliung. Secara keseluruhan, potensi kerugian

fisik dan ekonomi bencana angin puting beliung di Kabupaten Dharmasraya berada pada kelas Tinggi.

3.2.6. Kerentanan terhadap Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan ancaman serius yang terus menghantui masyarakat, fenomena ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kerentanan masyarakat terhadap karhutla dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, dan kurangnya kesadaran serta kesiapan dalam menghadapi bencana. Masyarakat yang tinggal di dekat hutan dan lahan gambut sering kali menjadi korban utama, menghadapi risiko kesehatan akibat asap dan kehilangan mata pencaharian karena kerusakan lahan pertanian.

Selain itu, lemahnya kapasitas kelembagaan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran juga memperburuk situasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap karhutla.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan ini, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak buruk kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 3-18 Kerentanan Sosial Bahaya kebakaran hutan dan lahan

Potensi Penduduk Terpapar(Jiwa)						
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
			Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Asam Jujuhan	4.895	3.416	532	11	Rendah
2	Koto Baru	11.238	2.266	726	2	Tinggi
3	Koto Besar	11.759	2.848	720	3	Tinggi
4	Koto Salak	13.078	4.872	700	8	Tinggi
5	Padang Laweh	1.046	1.016	48	5	Rendah
6	Pulau Punjung	15.095	2.147	1.216	1	Tinggi
7	Sembilan Koto	6.193	4.290	1.846	5	Sedang
8	Sitiung	11.698	2.684	836	2	Tinggi
9	Sungai Rumbai	13.319	3.850	616	12	Tinggi
10	Timpeh	6.245	2.400	240	4	Sedang
11	Tiumang	8.128	3.810	300	0	Sedang
Kab. Dharmasraya		102.695	33.599	7.780	53	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan potensi penduduk terpapar bencana kebakaran hutan Rendah, mengacu pada Standar pengkajian risiko bencana dikeluarkan BNPB, bahwasannya kebakaran hutan dan lahan, Tidak dihasilkan dalam komponen sosial budaya dan kerugian fisik karena analisis bahaya idak berada di wilayah permukiman.

Hasil pengkajian potensi kerugian (rupiah dan lingkungan) bencana kebakaran hutan dan lahan untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3-19 Kerugian dan Kerentanan Lingkungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

No	Kecamatan	Kerugian (Juta Rupiah)			Kerusakan Lingkungan (Ha)		
		Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
1	Sungai Rumbai	0	5,317	5,317	Rendah	514	Tinggi
2	Koto Besar	0	55,782	55,782	Tinggi	196	Tinggi
3	Asam Jujuhan	0	47,696	47,696	Tinggi	652	Tinggi
4	Koto Baru	0	22,511	22,511	Rendah	132	Tinggi
5	Koto Salak	0	12,535	12,535	Rendah	1,832	Tinggi
6	Tiumang	0	13,891	13,891	Rendah	1,652	Tinggi
7	Padang Laweh	0	5,469	5,469	Rendah	7,835	Tinggi
8	Sitiung	0	18,984	18,984	Sedang	3,143	Tinggi
9	Timpeh	0	29,155	29,155	Tinggi	0	Rendah
10	Pulau Punjung	0	47,199	47,199	Tinggi	1,325	Tinggi
11	IX Koto	0	50,642	506,428	Tinggi	0	Rendah
Kab. Dharmasraya		0	309,147	309,147	Rendah	17,281	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Dharmasraya 2022-2026

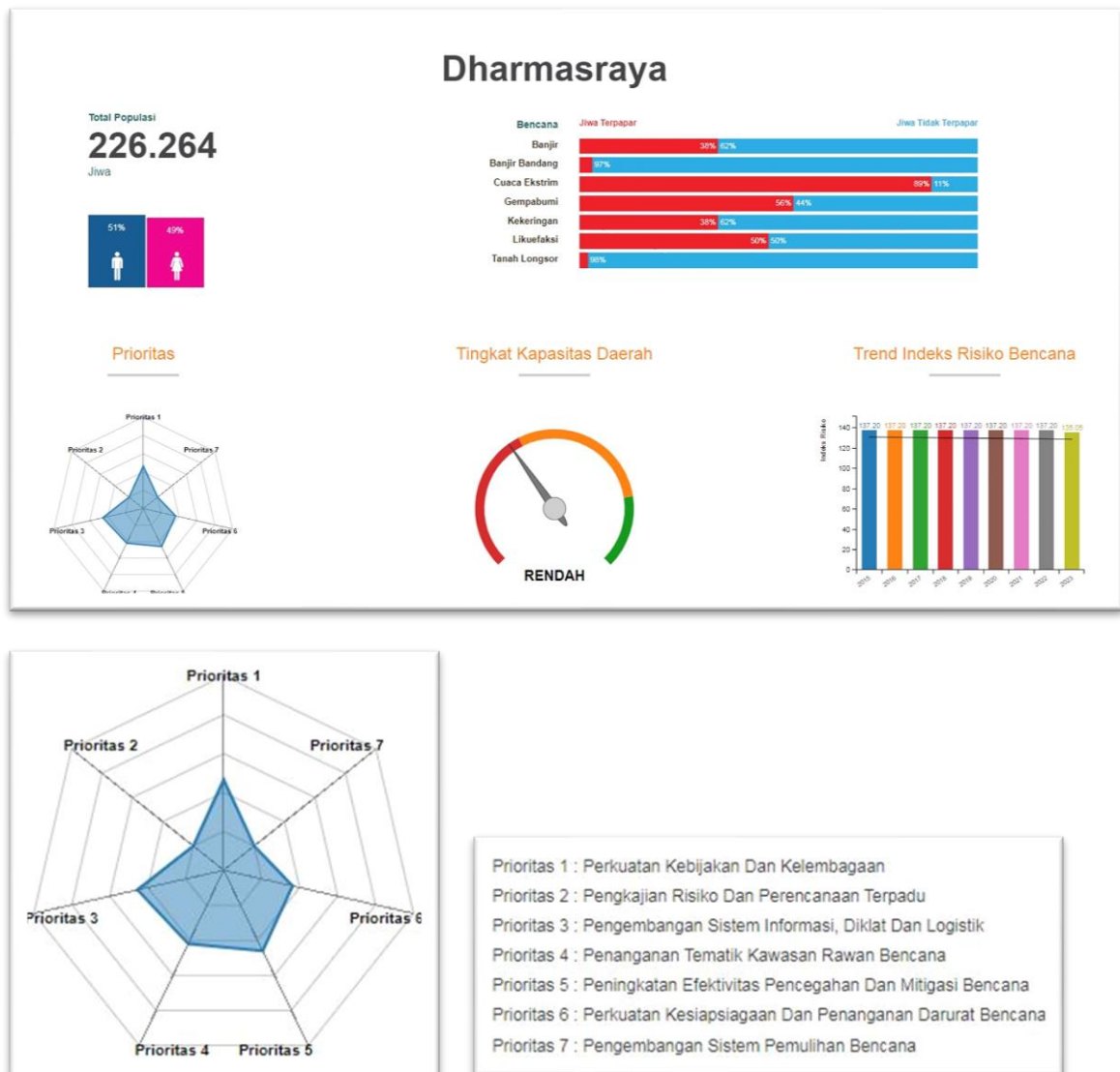
Potensi kerugian pada tabel di atas memperlihatkan kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terpapar bencana kebakaran hutan dan lahan. Secara keseluruhan, potensi kerugian fisik dan ekonomi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Dharmasraya berada pada kelas tinggi, sedangkan potensi kerusakan lingkungan dominan berada pada kelas tinggi.

3.3. Kapasitas

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana pada satu wilayah administrasi, dalam menghadapi potensi bencana di daerahnya. Ketahanan daerah menilai kebijakan maupun program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan daerah Kabupaten Dharmasraya masih rendah sebagaimana terlihat pada Gambar 3-1.

Gambar 2-1 Pencapaian terhadap 7 (tujuh) prioritas ketahanan daerah yaitu: (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik, (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, (6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana, menunjukkan Kabupaten Dharmasraya masih dalam capaian yang belum maksimal.

Gambar 3-1 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Dharmasraya



Berdasarkan Gambar di atas terlihat masih rendahnya tingkat pencapaian terhadap tujuh prioritas penilaian dalam pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Dharmasraya. Terkait dengan tersebut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus lebih menekankan perhatian lebih dan sumber daya tambahan untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui :

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan dalam mendukung penanggulangan bencana salah satunya dengan meningkatkan kelengkapan instrumen kebijakan dan kelembagaan kebencanaan di Kabupaten Dharmasraya.
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu dengan melakukan identifikasi dan analisis risiko bencana yang komprehensif. Perencanaan terpadu mencakup integrasi hasil kajian risiko ke dalam rencana pembangunan daerah untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan.
3. Pengembangan sistem informasi, pelatihan, dan logistik yang mendukung kesiapsiagaan dan respons bencana dan peningkatan efektivitas penanganan khusus di kawasan yang rawan bencana.
4. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan memperhatikan kapasitas lingkungan untuk mengurangi dampak bencana yang lebih besar dan mengukur efektivitas langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang telah diambil.

Tabel 3-20 Kriteria Kerentanan Banjir (Hektar)

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Grand Total	%
Tidak Berisiko	240,415.33	4,621.78	62.05%	245,037.11	83.88%
Rendah	2,300.41	252.68	3.39%	2,553.09	0.87%
Sedang	22,543.40	1,656.39	22.24%	24,199.79	8.28%
Tinggi	19,412.98	917.14	12.31%	20,330.12	6.96%
Grand Total	284,672.11	7,447.99	100.00%	292,120.10	100.00%

Berdasarkan analisa spasial terlihat bahwa di Kabupaten Dharmasraya secara umum luas wilayah terdampak Banjir hanya 16,12% (47.082,99 Ha) dari total luas Kabupaten Dharmasraya. Rekapitulasi luasan kawasan risiko bencana banjir di setiap kecamatan sebagaimana disajikan pada Tabel 3-21

Tabel 3-21 Kerentanan Banjir Berdasarkan Kecamatan (Hektar)

Kriteria Kerentanan per Kecamatan	Non Permukiman	Permukiman	%	Grand Total
Tidak Berisiko	240,415.33	4,621.78	62.05%	245,037.11
Asam Jujuhan	40,701.14	96.95	1.30%	40,798.09
Koto Baru	13,840.63	626.55	8.41%	14,467.18
Koto Besar	46,068.05	562.18	7.55%	46,630.24
Koto Salak	7,363.85	513.46	6.89%	7,877.31
Padang Laweh	4,656.15	98.62	1.32%	4,754.77
Pulau Punjung	35,822.57	584.58	7.85%	36,407.15
Sembilan Koto	45,267.77	221.65	2.98%	45,489.42
Sitiung	11,951.57	595.81	8.00%	12,547.38
Sungai Rumbai	3,846.56	670.68	9.00%	4,517.25
Timpeh	22,428.54	257.08	3.45%	22,685.62
Tiumang	8,468.50	394.20	5.29%	8,862.70
Rendah	2,300.41	252.68	3.39%	2,553.09
Asam Jujuhan	132.59	0.94	0.01%	133.54
Koto Baru	363.77	39.21	0.53%	402.98
Koto Besar	353.86	1.34	0.02%	355.20
Koto Salak	197.73	11.55	0.16%	209.28
Padang Laweh	70.48	45.13	0.61%	115.60
Pulau Punjung	405.99	84.34	1.13%	490.33
Sembilan Koto	20.73	0.24	0.00%	20.97
Sitiung	452.49	52.57	0.71%	505.07
Sungai Rumbai	22.98	0.90	0.01%	23.87
Timpeh	185.32	9.71	0.13%	195.03
Tiumang	94.47	6.75	0.09%	101.21
Sedang	22,543.40	1,656.39	22.24%	24,199.79
Asam Jujuhan	1,384.62	79.31	1.06%	1,463.94
Koto Baru	4,111.46	300.77	4.04%	4,412.24
Koto Besar	3,563.24	133.47	1.79%	3,696.72
Koto Salak	2,518.28	72.12	0.97%	2,590.40
Padang Laweh	1,246.91	73.02	0.98%	1,319.93

Kriteria Kerentanan per Kecamatan	Non Permukiman	Permukiman	%	Grand Total
Pulau Punjung	3,144.47	377.14	5.06%	3,521.61
Sembilan Koto	630.97	64.46	0.87%	695.43
Sitiung	2,272.75	319.67	4.29%	2,592.42
Sungai Rumbai	182.23	0.14	0.00%	182.37
Timpeh	2,202.04	178.44	2.40%	2,380.48
Tiumang	1,286.41	57.84	0.78%	1,344.25
Tinggi	19,412.98	917.14	12.31%	20,330.12
Asam Jujuhan	778.99	25.52	0.34%	804.51
Koto Baru	2,431.55	107.08	1.44%	2,538.63
Koto Besar	3,055.26	57.86	0.78%	3,113.12
Koto Salak	1,531.64	7.77	0.10%	1,539.41
Padang Laweh	931.22	64.21	0.86%	995.43
Pulau Punjung	3,236.95	193.11	2.59%	3,430.06
Sembilan Koto	412.57	51.09	0.69%	463.66
Sitiung	2,737.19	82.31	1.11%	2,819.50
Sungai Rumbai	224.52	4.51	0.06%	229.03
Timpeh	3,226.49	230.25	3.09%	3,456.74
Tiumang	846.60	93.42	1.25%	940.03
Grand Total	284,672.11	7,447.99	100.00%	292,120.10

3.4.2. Risiko Banjir Bandang

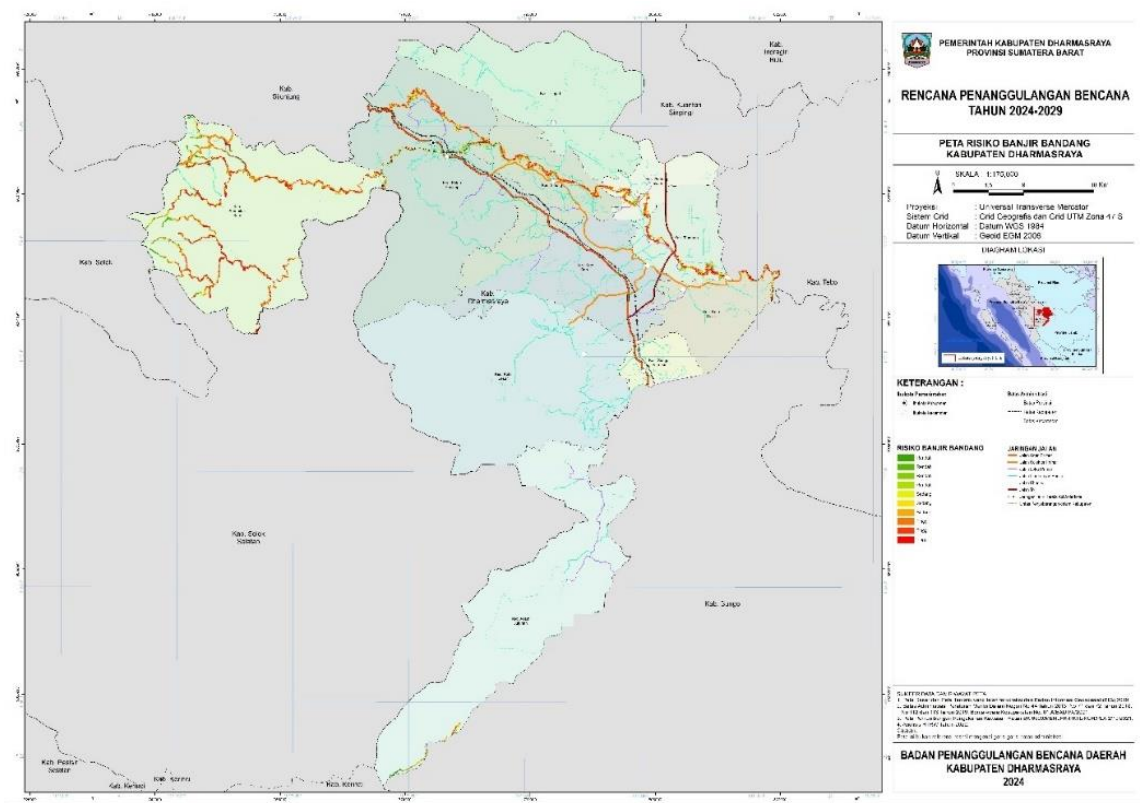
Banjir bandang atau air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar (seperti kayu dan sebagainya). Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Risiko Banjir bandang adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Analisis risiko terhadap banjir bandang menunjukkan bahwa sepanjang aliran Sungai Batanghari, Bbatang Sipotar dan Batang Pangian merupakan daerah yang memiliki risiko Banjir Bandang. Luasan wilayah dampak risiko Banjir Bandang disajikan pada Tabel 3-22 . Untuk sebaran spasial kawasan risiko divisualisasikan melalui peta pada Gambar 3-3

Tabel 3-22 Luasan Wilayah Risiko Banjir Bandang (Hektar)

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
Tidak Berisiko	240,515.33	4,621.78	62.05%	245,137.11	83.92%
Rendah	2,300.41	252.68	3.39%	2,553.09	0.87%
Sedang	22,538.40	1,656.39	22.24%	24,204.79	8.29%
Tinggi	19,317.88	917.14	12.31%	20,344.12	6.96%
Grand Total	284,672.01	7,447.99	100.00%	292,120.00	100.00%

Gambar 3-3 Peta Kawasan Risiko Banjir Bandang



Tabel 3-23 Kerentanan Banjir Bandang Berdasarkan Kecamatan (Hektar)

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
Tidak Berisiko	240,515.33	4,621.78	62.05%	245,137.11	83.92%
Asam Jujuhan	40,801.14	96.95	1.30%	40,898.09	14.00%
Koto Baru	13,840.63	626.55	8.41%	14,467.18	4.95%
Koto Besar	46,068.05	562.18	7.55%	46,630.24	15.96%
Koto Salak	7,363.85	513.46	6.89%	7,877.31	2.70%
Padang Laweh	4,656.15	98.62	1.32%	4,754.77	1.63%
Pulau Punjung	35,822.57	584.58	7.85%	36,407.15	12.46%
Sembilan Koto	45,267.77	221.65	2.98%	45,489.42	15.57%
Sitiung	11,951.57	595.81	8.00%	12,547.38	4.30%
Sungai Rumbai	3,846.56	670.68	9.00%	4,517.25	1.55%
Timpeh	22,428.54	257.08	3.45%	22,685.62	7.77%
Tiumang	8,468.50	394.20	5.29%	8,862.70	3.03%
Rendah	2,300.41	252.68	3.39%	2,553.09	0.87%
Asam Jujuhan	132.59	0.94	0.01%	133.54	0.05%
Koto Baru	363.77	39.21	0.53%	402.98	0.14%
Koto Besar	353.86	1.34	0.02%	355.20	0.12%
Koto Salak	197.73	11.55	0.16%	209.28	0.07%
Padang Laweh	70.48	45.13	0.61%	115.60	0.04%
Pulau Punjung	405.99	84.34	1.13%	490.33	0.17%
Sembilan Koto	20.73	0.24	0.00%	20.97	0.01%
Sitiung	452.49	52.57	0.71%	505.07	0.17%
Sungai Rumbai	22.98	0.90	0.01%	23.87	0.01%

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
Timpeh	185.32	9.71	0.13%	195.03	0.07%
Tiumang	94.47	6.75	0.09%	101.21	0.03%
Sedang	22,538.40	1,656.39	22.24%	24,204.79	8.29%
Asam Jujuhan	1,384.62	79.31	1.06%	1,463.94	0.50%
Koto Baru	4,111.46	300.77	4.04%	4,412.24	1.51%
Koto Besar	3,568.24	133.47	1.79%	3,701.72	1.27%
Koto Salak	2,518.28	72.12	0.97%	2,590.40	0.89%
Padang Laweh	1,246.91	73.02	0.98%	1,319.93	0.45%
Pulau Punjung	3,134.47	377.14	5.06%	3,521.61	1.21%
Sembilan Koto	630.97	64.46	0.87%	695.43	0.24%
Sitiung	2,272.75	319.67	4.29%	2,592.42	0.89%
Sungai Rumbai	182.23	0.14	0.00%	182.37	0.06%
Timpeh	2,202.04	178.44	2.40%	2,380.48	0.81%
Tiumang	1,286.41	57.84	0.78%	1,344.25	0.46%
Tinggi	19,317.88	917.14	12.31%	20,344.12	6.96%
Asam Jujuhan	788.99	25.52	0.34%	814.51	0.28%
Koto Baru	2,421.45	107.08	1.44%	2,538.63	0.87%
Koto Besar	3,039.26	57.86	0.78%	3,117.12	1.07%
Koto Salak	1,531.64	7.77	0.10%	1,539.41	0.53%
Padang Laweh	931.22	64.21	0.86%	995.43	0.34%
Pulau Punjung	3,186.95	193.11	2.59%	3,430.06	1.17%
Sembilan Koto	412.57	51.09	0.69%	463.66	0.16%
Sitiung	2,737.19	82.31	1.11%	2,819.50	0.97%
Sungai Rumbai	215.52	4.51	0.06%	229.03	0.08%
Timpeh	3,206.49	230.25	3.09%	3,456.74	1.18%
Tiumang	846.60	93.42	1.25%	940.03	0.32%
Grand Total	284,672.01	7,447.99	100.00%	292,120.00	100.00%

3.4.3. Risiko Tanah Longsor

Berdasarkan analisis spasial diperoleh distribusi kerentanan terhadap longsor di wilayah permukiman dan non-permukiman. Dari total luas wilayah sebesar 292,120.00 hektar, sebagian besar wilayah (57.40%) berada dalam kategori tidak berisiko terhadap longsor. Wilayah non-permukiman mendominasi kategori ini dengan luas 160,512.43 hektar, sementara wilayah permukiman hanya mencakup 7,172.26 hektar atau 96.30% dari total wilayah permukiman.

Kategori rendah mencakup 37.70% dari total wilayah, dengan luas 110,120.19 hektar. Di sini, wilayah non-permukiman juga mendominasi dengan luas 109,855.75 hektar, sedangkan wilayah permukiman hanya mencakup 264.43 hektar atau 3.55% dari total wilayah permukiman. Untuk kategori sedang, hanya 3.02% dari total wilayah yang termasuk dalam kategori ini, dengan luas 8,811.39 hektar. Wilayah non-permukiman mencakup 8,790.99 hektar, sementara wilayah permukiman hanya 11.29 hektar atau 0.15% dari total wilayah permukiman. Terakhir, kategori tinggi mencakup 1.92% dari total wilayah, dengan luas 5,622.84 hektar. Seluruh wilayah dalam kategori ini adalah non-permukiman dengan luas 5,512.84 hektar, dan tidak ada wilayah permukiman yang termasuk dalam kategori ini.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa wilayah non-permukiman memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap longsor dibandingkan dengan wilayah permukiman. Namun, sebagian besar wilayah, baik permukiman maupun non-permukiman, berada dalam **kategori tidak berisiko atau rendah**.

Luasan wilayah dampak risiko longsor disajikan pada Tabel 3-24 dan Tabel 3-25 sedangkan untuk sebaran spasial kawasan risiko divisualisasikan melalui peta pada Gambar 3-4.

Tabel 3-24 Luasan Wilayah Risiko Longsor

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
Tidak Berisiko	160,512.43	7,172.26	96.30%	167,684.69	57.40%
Rendah	109,855.75	264.43	3.55%	110,120.19	37.70%
Sedang	8,790.99	11.29	0.15%	8,811.39	3.02%
Tinggi	5,512.84		0.00%	5,622.84	1.92%
Grand Total	284,672.01	7,447.99	100.00%	292,120.00	100.00%

Tabel 3-25 Kerentanan Longsor Berdasarkan Kecamatan

Row Labels	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
Tidak Berisiko	160,512.43	7,172.26	96.30%	167,684.69	57.40%
Asam Jujuhan	23,192.72	174.60	2.34%	23,367.31	8.00%
Koto Baru	19,292.18	1,072.74	14.40%	20,364.92	6.97%
Koto Besar	36,171.45	752.73	10.11%	36,924.18	12.64%
Koto Salak	11,611.50	604.90	8.12%	12,216.40	4.18%
Padang Laweh	6,371.98	280.98	3.77%	6,652.95	2.28%
Pulau Punjung	21,968.86	1,190.74	15.99%	23,159.60	7.93%
Sembilan Koto	4,834.84	147.17	1.98%	4,982.02	1.71%
Sitiung	14,192.79	1,048.20	14.07%	15,240.99	5.22%
Sungai Rumbai	4,240.89	676.22	9.08%	4,917.11	1.68%
Timpeh	10,617.84	671.77	9.02%	11,289.61	3.86%
Tiumang	8,017.39	552.21	7.41%	8,569.60	2.93%
Rendah	109,855.75	264.43	3.55%	110,120.19	37.70%
Asam Jujuhan	17,377.54	28.13	0.38%	17,405.67	5.96%
Koto Baru	1,455.23	0.88	0.01%	1,456.11	0.50%
Koto Besar	11,990.57	2.13	0.03%	11,992.70	4.11%
Padang Laweh	532.78		0.00%	532.78	0.18%
Pulau Punjung	20,641.11	48.44	0.65%	20,689.55	7.08%
Sembilan Koto	34,498.75	178.97	2.40%	34,677.72	11.87%
Sitiung	3,221.22	2.17	0.03%	3,223.38	1.10%
Sungai Rumbai	35.41		0.00%	35.41	0.01%
Timpeh	17,424.55	3.72	0.05%	17,428.27	5.97%
Tiumang	2,678.59		0.00%	2,678.59	0.92%
Sedang	8,790.99	11.29	0.15%	8,811.39	3.02%
Asam Jujuhan	581.56		0.00%	581.56	0.20%
Koto Besar	3,650.43		0.00%	3,659.43	1.25%
Sembilan Koto	4,559.01	11.29	0.15%	4,570.40	1.56%
Tinggi	5,512.84		0.00%	5,622.84	1.92%
Asam Jujuhan	1,945.53		0.00%	1,955.53	0.67%
Koto Besar	1,227.97		0.00%	1,227.97	0.42%
Sembilan Koto	2,339.34		0.00%	2,439.34	0.84%
Grand Total	284,672.01	7,447.99	100.00%	292,120.00	100.00%

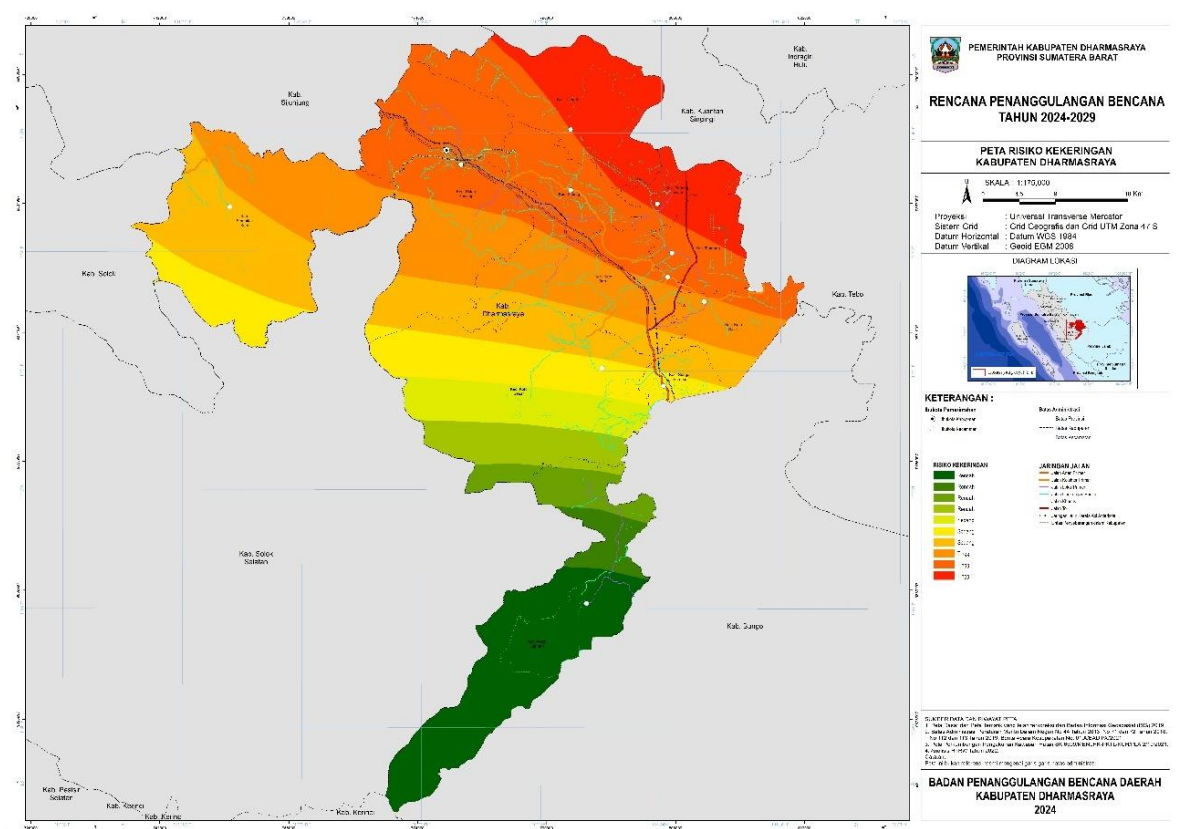
Berdasarkan analisis spasial diperoleh distribusi kerentanan terhadap risiko kekeringan di wilayah permukiman dan non-permukiman. Dari total luas wilayah sebesar 292,120.00 hektar, sebagian besar wilayah (49.74%) berada dalam kategori tinggi terhadap risiko kekeringan. Wilayah non-permukiman mendominasi kategori ini dengan luas 139,782.29 hektar, sementara wilayah permukiman mencakup 5,532.46 hektar atau 74.28% dari total wilayah permukiman.

- Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa wilayah non-permukiman memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko kekeringan dibandingkan dengan wilayah permukiman. Namun, sebagian besar wilayah, baik permukiman maupun non-permukiman, **berada dalam kategori sedang hingga tinggi.**

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
Rendah	56.043.48	428.81	5.76%	56.472.29	19.33%

Sedang	88,846.25	1,486.71	19.96%	90,332.96	30.92%
Tinggi	139,782.29	5,532.46	74.28%	145,314.75	49.74%
Grand Total	284,672.01	7,447.99	100.00%	292,120.00	100.00%

Gambar 3-5 Peta Kawasan Risiko Kekeringan

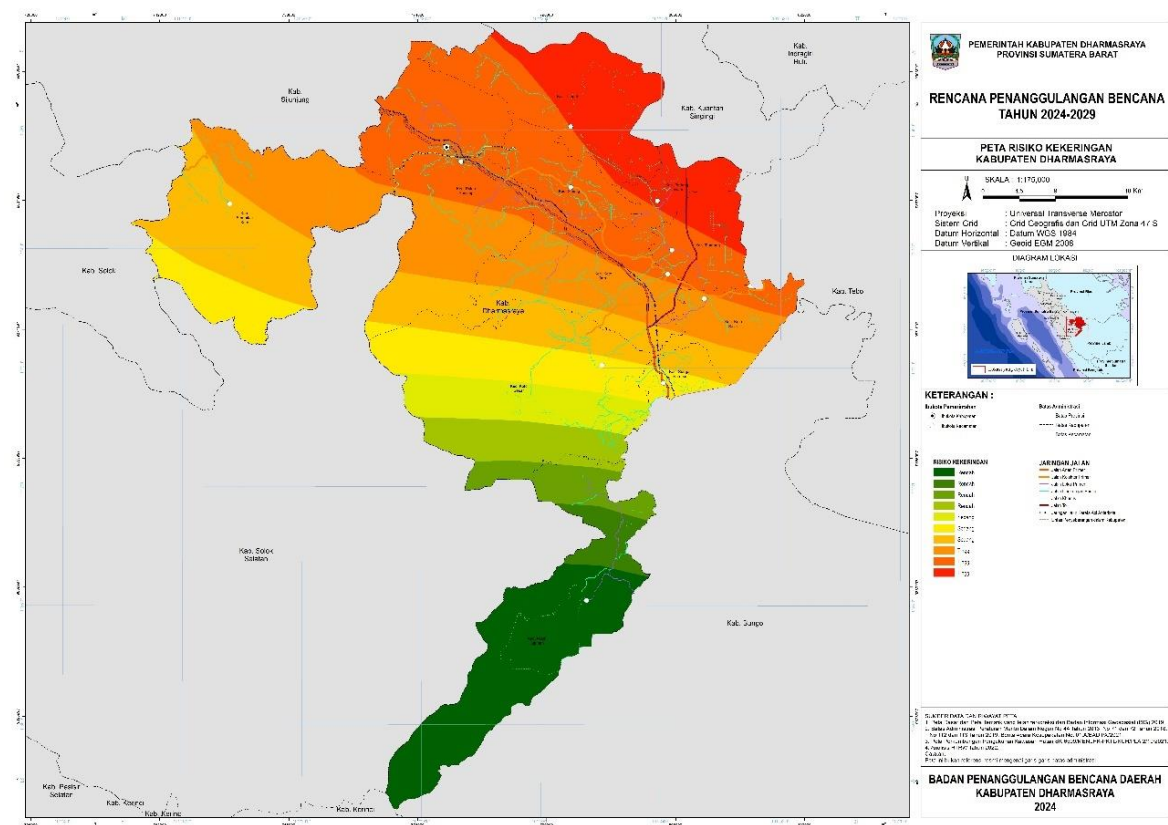


Tabel 3-27Tabel 3-25 sedangkan untuk sebaran spasial kawasan risiko divisualisasikan melalui peta pada Gambar 3-5Gambar 3-4.

Tabel 3-26 Luasan Wilayah Risiko Kekeringan

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
Rendah	56,043.48	428.81	5.76%	56,472.29	19.33%
Sedang	88,846.25	1,486.71	19.96%	90,332.96	30.92%
Tinggi	139,782.29	5,532.46	74.28%	145,314.75	49.74%
Grand Total	284,672.01	7,447.99	100.00%	292,120.00	100.00%

Gambar 3-5 Peta Kawasan Risiko Kekeringan



Tabel 3-27 Kerentanan Kekeringan Berdasarkan Kecamatan

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
Rendah	56,043.48	428.81	5.76%	56,472.29	19.33%
Asam Jujuan	43,107.35	202.73	2.72%	43,310.08	14.83%
Koto Besar	12,936.13	226.09	3.04%	13,162.22	4.51%
Sedang	88,846.25	1,486.71	19.96%	90,332.96	30.92%
Koto Baru	5,663.34	66.94	0.90%	5,730.28	1.96%
Koto Besar	40,113.29	528.77	7.10%	40,642.06	13.91%
Koto Salak	2,673.10		0.00%	2,673.10	0.92%
Pulau Punjung	6,469.97		0.00%	6,469.97	2.21%
Sembilan Koto	29,230.07	214.78	2.88%	29,444.84	10.08%
Sitiung	420.29		0.00%	420.29	0.14%
Sungai Rumbai	4,276.19	676.22	9.08%	4,952.42	1.70%
Tinggi	139,782.29	5,532.46	74.28%	145,314.75	49.74%
Koto Baru	15,084.07	1,006.68	13.52%	16,090.75	5.51%
Koto Salak	8,938.39	604.90	8.12%	9,543.30	3.27%
Padang Laweh	6,904.76	280.98	3.77%	7,185.73	2.46%
Pulau Punjung	36,140.01	1,239.17	16.64%	37,379.18	12.80%
Sembilan Koto	17,101.97	122.66	1.65%	17,224.63	5.90%
Sitiung	16,984.71	1,050.37	14.10%	18,035.08	6.17%
Timpeh	28,032.39	675.48	9.07%	28,707.88	9.83%
Tiumang	10,595.98	552.21	7.41%	11,148.19	3.82%

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
Grand Total	284,672.01	7,447.99	100.00%	292,120.00	100.00%

3.4.5. Risiko Cuaca Ekstrem

Distribusi kerentanan terhadap cuaca ekstrem di wilayah permukiman dan non-permukiman di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan dari total luas wilayah sebesar 292,120.00 hektar, sebagian besar wilayah (65.18%) berada dalam kategori rendah terhadap kerentanan cuaca ekstrem. Wilayah non-permukiman mendominasi kategori ini dengan luas 189,623.04 hektar, sementara wilayah permukiman mencakup 778.54 hektar atau 10.45% dari total wilayah permukiman.

- ✓ Kategori sedang mencakup 12.08% dari total wilayah, dengan luas 35,301.95 hektar. Di sini, wilayah non-permukiman juga mendominasi dengan luas 34,173.55 hektar, sedangkan wilayah permukiman mencakup 1,128.40 hektar atau 15.15% dari total wilayah permukiman.
- ✓ Untuk kategori tinggi, hanya 11.24% dari total wilayah yang termasuk dalam kategori ini, dengan luas 32,834.97 hektar. Wilayah non-permukiman mencakup 27,535.06 hektar, sementara wilayah permukiman mencakup 5,299.92 hektar atau 71.16% dari total wilayah permukiman.
- ✓ Selain itu, terdapat 11.50% dari total wilayah yang tidak memiliki data terkait kerentanan cuaca ekstrem, dengan luas 33,581.50 hektar. Wilayah non-permukiman mencakup 33,340.37 hektar, sementara wilayah permukiman hanya 241.13 hektar atau 3.24% dari total wilayah permukiman.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah, baik permukiman maupun non-permukiman, berada dalam kategori rendah terhadap kerentanan cuaca ekstrem. Namun, **wilayah permukiman memiliki persentase yang lebih tinggi dalam kategori sedang dan tinggi** dibandingkan dengan wilayah non-permukiman.

Luasan wilayah dampak risiko Cuaca Ekstrem disajikan pada Tabel 3-28 dan Tabel 3-29 sedangkan untuk sebaran spasial kawasan risiko bencana divisualisasikan melalui peta pada Gambar 3-6

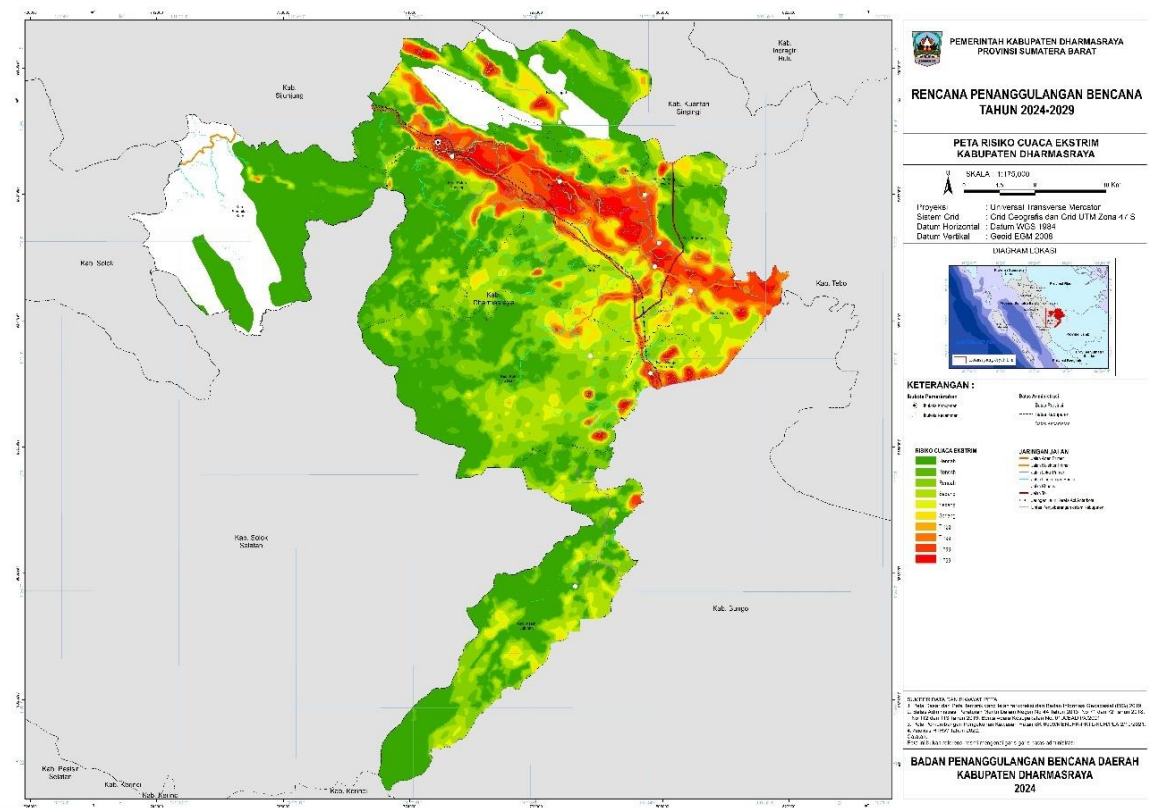
Tabel 3-28 Luasan Wilayah Risiko Cuaca Ekstrem

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
No Data	33,340.37	241.13	3.24%	33,581.50	11.50%
Rendah	189,623.04	778.54	10.45%	190,401.58	65.18%
Sedang	34,173.55	1,128.40	15.15%	35,301.95	12.08%
Tinggi	27,535.06	5,299.92	71.16%	32,834.97	11.24%
Total	284,672.01	7,447.99	100.00%	292,120.00	100.00%

Tabel 3-29 Kerentanan Cuaca Ekstrem Berdasarkan Kecamatan

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
No Data	33,340.37	241.13	3.24%	33,581.50	11.50%
Asam Jujuhan	85.09	7.51	0.10%	92.60	0.03%
Koto Besar	37.18		0.00%	37.18	0.01%
Koto Salak	11.45	0.02	0.00%	11.47	0.00%
Padang Laweh	13.54		0.00%	13.54	0.00%
Pulau Punjung	4,261.93		0.00%	4,261.93	1.46%
Sembilan Koto	23,898.34	232.41	3.12%	24,130.75	8.26%
Sungai Rumbai	7.34	1.20	0.02%	8.54	0.00%
Timpeh	5,012.58		0.00%	5,012.58	1.72%
Tiumang	12.91		0.00%	12.91	0.00%
Rendah	189,623.04	778.54	10.45%	190,401.58	65.18%
Asam Jujuhan	37,838.75	156.12	2.10%	37,994.87	13.01%
Koto Baru	10,839.51	47.43	0.64%	10,886.94	3.73%
Koto Besar	48,404.21	69.24	0.93%	48,473.45	16.59%
Koto Salak	3,692.56		0.00%	3,692.56	1.26%
Padang Laweh	3,485.63	5.35	0.07%	3,490.98	1.20%
Pulau Punjung	29,652.15	166.78	2.24%	29,818.93	10.21%
Sembilan Koto	22,217.71	97.06	1.30%	22,314.77	7.64%
Sitiung	8,096.65	14.69	0.20%	8,111.34	2.78%
Sungai Rumbai	1,778.05	21.89	0.29%	1,799.94	0.62%
Timpeh	17,384.69	85.10	1.14%	17,469.80	5.98%
Tiumang	6,233.14	114.88	1.54%	6,348.02	2.17%
Sedang	34,173.55	1,128.40	15.15%	35,301.95	12.08%
Asam Jujuhan	5,022.16	21.85	0.29%	5,044.02	1.73%
Koto Baru	7,312.35	273.70	3.67%	7,586.05	2.60%
Koto Besar	4,186.45	269.22	3.61%	4,455.67	1.53%
Koto Salak	3,955.54	101.99	1.37%	4,057.53	1.39%
Padang Laweh	1,574.25	52.89	0.71%	1,627.14	0.56%
Pulau Punjung	2,936.60	51.20	0.69%	2,987.80	1.02%
Sembilan Koto	101.67	7.46	0.10%	109.13	0.04%
Sitiung	1,840.59	28.06	0.38%	1,868.66	0.64%
Sungai Rumbai	1,413.89	49.34	0.66%	1,463.23	0.50%
Timpeh	4,603.73	223.37	3.00%	4,827.10	1.65%
Tiumang	1,226.32	49.31	0.66%	1,275.62	0.44%
Tinggi	27,535.06	5,299.92	71.16%	32,834.97	11.24%
Asam Jujuhan	168.35	17.25	0.23%	185.60	0.06%
Koto Baru	2,585.56	752.49	10.10%	3,338.04	1.14%
Koto Besar	421.08	416.40	5.59%	837.48	0.29%
Koto Salak	3,951.85	502.89	6.75%	4,454.74	1.52%
Padang Laweh	1,816.34	222.73	2.99%	2,039.07	0.70%
Pulau Punjung	5,759.10	1,021.19	13.71%	6,780.29	2.32%
Sembilan Koto	14.32	0.51	0.01%	14.83	0.01%
Sitiung	7,476.46	1,007.62	13.53%	8,484.07	2.90%
Sungai Rumbai	1,077.02	603.80	8.11%	1,680.81	0.58%
Timpeh	1,041.39	367.01	4.93%	1,408.40	0.48%
Tiumang	3,223.61	388.03	5.21%	3,611.64	1.24%
Total	284,672.01	7,447.99	100.00%	292,120.00	100.00%

Gambar 3-6 Peta Kawasan Risiko Cuaca Ekstrim



3.4.6. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Hasil analisis terhadap kerentanan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan bahwa dari total luas wilayah sebesar 292,120.00 hektar, sebagian besar wilayah (43.08%) berada dalam kategori sedang terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan. Wilayah non-permukiman mendominasi kategori ini dengan luas 125,249.75 hektar, sementara wilayah permukiman mencakup 584.19 hektar atau 7.84% dari total wilayah permukiman.

Kategori rendah mencakup 30.03% dari total wilayah, dengan luas 87,711.45 hektar. Di sini, wilayah non-permukiman juga mendominasi dengan luas 80,878.15 hektar, sedangkan wilayah permukiman mencakup 6,833.30 hektar atau 91.75% dari total wilayah permukiman. Untuk kategori tinggi, hanya 26.90% dari total wilayah yang termasuk dalam kategori ini, dengan luas 78,574.60 hektar. Wilayah non-permukiman mencakup 78,544.11 hektar, sementara wilayah permukiman hanya 30.50 hektar atau 0.41% dari total wilayah permukiman.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa wilayah non-permukiman memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan dibandingkan dengan wilayah permukiman. Namun, sebagian besar **wilayah permukiman berada dalam kategori rendah**, sementara wilayah non-permukiman tersebar lebih merata di semua kategori.

Luasan wilayah dampak risiko Kebakaran Hutamn dan Lahan disajikan pada Tabel 3-30 dan Tabel 3-31 sedangkan untuk sebaran spasial kawasan risiko bencana divisualisasikan melalui peta pada Gambar 3-7Gambar 3-6

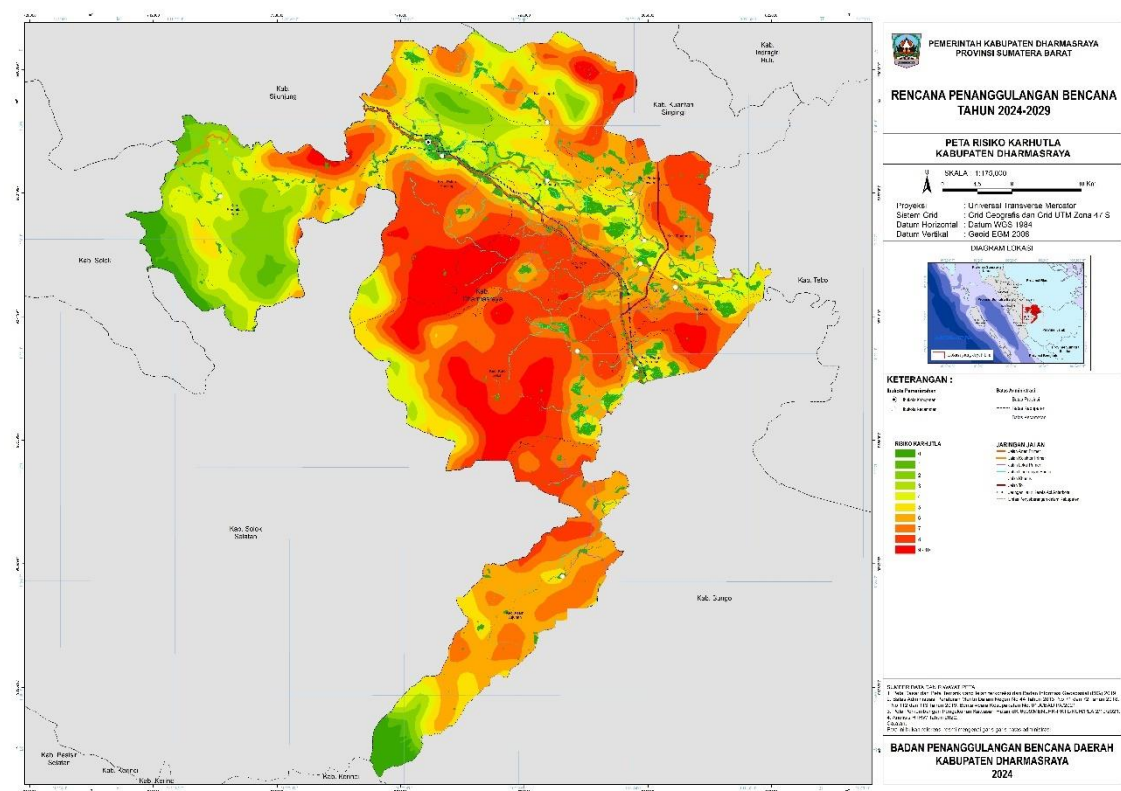
Tabel 3-30 Luasan Wilayah Risiko Cuaca Ekstrim

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
Rendah	80,878.15	6,833.30	91.75%	87,711.45	30.03%
Sedang	125,249.75	584.19	7.84%	125,833.95	43.08%
Tinggi	78,544.11	30.50	0.41%	78,574.60	26.90%
Grand Total	284,672.01	7,447.99	100.00%	292,120.00	100.00%

Tabel 3-31 Kerentanan Cuaca Ekstrim Berdasarkan Kecamatan

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	% Permukiman	Total	%
Rendah	80,878.15	6,833.30	91.75%	87,711.45	30.03%
Asam Jujuhan	6,496.93	168.83	2.27%	6,665.76	2.28%
Koto Baru	1,479.69	961.32	12.91%	2,441.00	0.84%
Koto Besar	3,599.99	717.08	9.63%	4,317.07	1.48%
Koto Salak	2,745.00	565.74	7.60%	3,310.75	1.13%
Padang Laweh	968.12	263.09	3.53%	1,231.21	0.42%
Pulau Punjung	12,266.91	1,181.98	15.87%	13,448.89	4.60%
Sembilan Koto	37,029.37	314.67	4.22%	37,344.04	12.78%
Sitiung	7,062.20	997.41	13.39%	8,059.61	2.76%
Sungai Rumbai	727.40	585.56	7.86%	1,312.95	0.45%
Timpeh	6,427.20	601.76	8.08%	7,028.96	2.41%
Tiumang	2,075.35	475.85	6.39%	2,551.21	0.87%
Sedang	125,249.75	584.19	7.84%	125,833.95	43.08%
Asam Jujuhan	31,512.16	33.90	0.46%	31,546.06	10.80%
Koto Baru	9,930.17	92.10	1.24%	10,022.27	3.43%
Koto Besar	18,572.90	31.15	0.42%	18,604.06	6.37%
Koto Salak	5,005.94	39.16	0.53%	5,045.10	1.73%
Padang Laweh	3,889.83	17.89	0.24%	3,907.72	1.34%
Pulau Punjung	15,674.61	57.19	0.77%	15,731.80	5.39%
Sembilan Koto	7,705.14	22.77	0.31%	7,727.91	2.65%
Sitiung	5,959.33	49.29	0.66%	6,008.62	2.06%
Sungai Rumbai	2,929.09	90.67	1.22%	3,019.75	1.03%
Timpeh	17,768.83	73.73	0.99%	17,842.55	6.11%
Tiumang	6,301.75	76.36	1.03%	6,378.11	2.18%
Tinggi	78,544.11	30.50	0.41%	78,574.60	26.90%
Asam Jujuhan	5,098.26		0.00%	5,098.26	1.75%
Koto Baru	9,337.56	20.20	0.27%	9,357.76	3.20%
Koto Besar	30,874.52	6.63	0.09%	30,881.15	10.57%
Koto Salak	3,860.55		0.00%	3,860.55	1.32%
Padang Laweh	2,043.81		0.00%	2,043.81	0.70%
Pulau Punjung	14,644.46		0.00%	14,644.46	5.01%
Sembilan Koto	1,507.43		0.00%	1,507.43	0.52%
Sitiung	4,392.47	3.67	0.05%	4,396.14	1.50%
Sungai Rumbai	619.81		0.00%	619.81	0.21%
Timpeh	3,846.37		0.00%	3,846.37	1.32%
Tiumang	2,318.88		0.00%	2,318.88	0.79%
Grand Total	284,672.01	7,447.99	100.00%	292,120.00	100.00%

Gambar 3-7 Peta Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan



3.5. Penentuan Bencana Prioritas (Sumber Dokumen Kajian Risiko Bencana)

Pengkajian risiko bencana merupakan dasar pijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Dharmasraya. Tindak lanjut dari pengkajian risiko bencana adalah pemilihan jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana daerah. proses tersebut disusun berdasarkan elaborasi parameter dari hasil analisis terhadap stakeholders penanggulangan bencana,, frekuensi kejadian bencana, dan intensitas dampak bencana. Hasil yang diperoleh berdasarkan triangulasi data dari parameter-parameter tersebut adalah bencana prioritas yang perlu dimitigasi untuk ditanggulangi secara tepat di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-32 Matrik Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani

PRIORITAS RISIKO		RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
Kecenderungan	Menurun	Banjir Bandang		KARHUTLA
	Tetap		Kekeringan	Cuaca Ekstrim
	Meningkat	Longsor		Banjir

Berdasarkan hasil analisis penentuan bencana prioritas, terdapat 5 bencana yang perlu diprioritaskan penanggulangannya di Kabupaten Dharma Raya. Untuk itu Bencana prioritas dalam

rencana penanggulangan bencana Kabupaten Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024-2029 tersebut ditetapkan berdasarkan kecenderungan dan kelas risiko dari setiap jenis ancaman bencana yang ada dan disepakati melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD). Bencana prioritas yang ditangani adalah sebagai berikut: (1) prioritas pertama meliputi: bencana banjir, dan cuaca ekstrim, (2) prioritas kedua meliputi: kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor, (3) prioritas ketiga meliputi: banjir bandang.

Tabel 3-33 Matrik Analisa Penentuan Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani

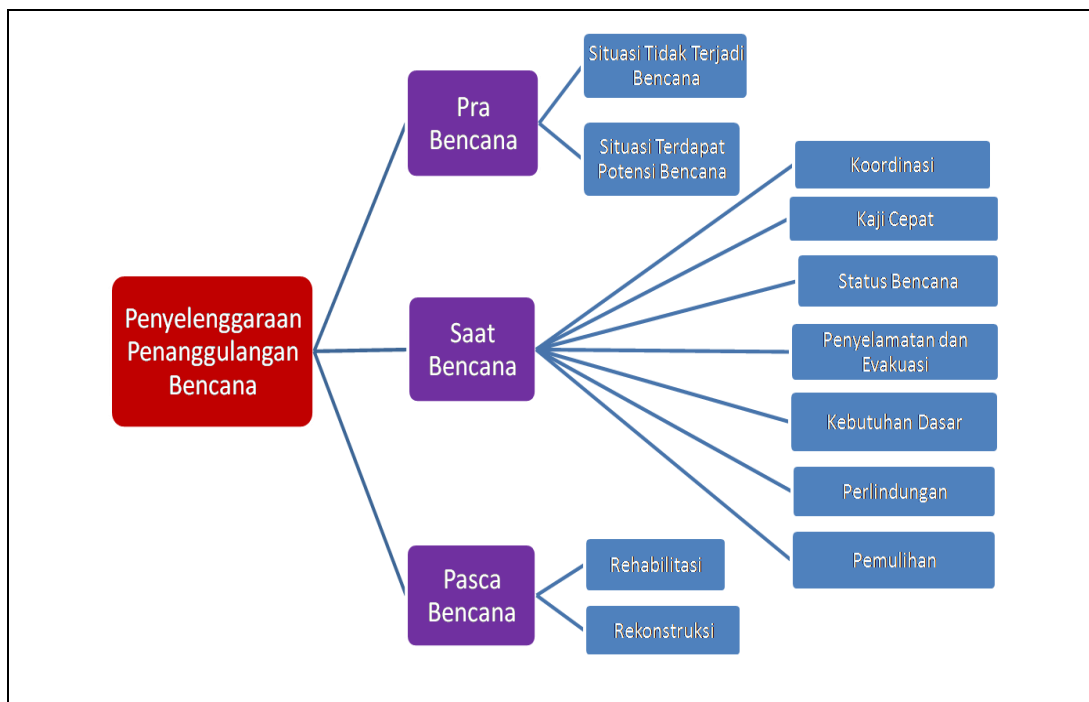
No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Kecenderungan	Dasar
1	Banjir	Tinggi	Meningkat	Dipengaruhi oleh faktor yang kompleks: intensitas curah hujan tinggi, berkurangnya daya tampung saluran alami/buatan, berkurangnya infiltrasi dan meningkatnya run off akibat pembukaan lahan
2	Karhutla	Tinggi	Menurun	Kapasitas deteksi dini semakin baik dari seluruh stakeholders terkait dan sosialisasi serta pembentukan kesadaran masyarakat untuk menghindari aktifitas bakar buka lahan
3	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tetap	Pengaruh perubahan iklim dan masih banyaknya area perkebunan salah satu penyebab fenomena ini tidak terlalu berisiko
4	Kekeringan	Tinggi	Tetap	Adanya upaya untuk pemenuhan infrastruktur dasar penyediaan air seperti upaya yang telah dilakukan oleh multi pihak, UPT SPAM PUPR, PAMSIMAS (untuk pelayanan air bersih), PUPR untuk perbaikan saluran irigasi dan normalisasi sungai.
5	Longsor	Rendah	Meningkat	Dipengaruhi intensitas curah hujan tinggi serta adanya aktifitas masyarakat dan pembukaan lahan yang meningkat di kawasan perbukitan dengan lereng terjal
6	Banjir Bandang	Rendah	Menurun	Tata kelola lahan di kawasan DAS dan keberadaan Irigasi Batang hari memiliki peran penting untuk mencegah Banjir Bandang

BAB 4. PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikategorikan dalam tiga tahap yaitu tahap pra bencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Sedangkan fungsi-fungsi penanggulangan bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat meliputi upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dimulai dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk melihat tingkat ketahanan terhadap risiko bencana dan relevansi pengurangan risiko bencana digunakan empat prioritas dalam Kerangka Kerja Sendai sebagai parameter pencapaian. Secara garis besar kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4-1 Kategori Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



4.1. Tindakan Tahap Pra Bencana

Berdasarkan kejadian bencana di Kabupaten Dharmasraya maka dapat dianalisis masalah penanggulangan bencana pada tahap Pra Bencana sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4-1 Masalah Penanggulangan Bencana Tahap Pra Bencana Kabupaten Dharmasraya

Aspek Pra Bencana	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
Memahami risiko bencana	• Belum lengkapnya aturan dan standar operasional di BPBD dalam penanggulangan bencana
	• Belum adanya dokumen KRB, RPB dan Renkon
	• Kurangnya pengembangan, pembaharuan dan penyebaran secara berkala informasi risiko bencana melalui teknologi informasi geospasial
	• Kurangnya ketersediaan informasi terpilah terkait risiko bencana dan kerugian yang dapat diakses secara memadai
	• Masih kurangnya pengetahuan bagi pejabat pemerintah di semua tingkatan, masyarakat sipil, komunitas dan relawan, serta lembaga usaha
	• Kurangnya dialog dan kerjasama antar komunitas ilmiah dan teknologi, <i>stakeholder</i> yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko bencana
	• Belum memadainya penggabungan pengetahuan risiko bencana seperti halnya dalam pendidikan profesional dan pelatihan
	• Kurangnya penerapan informasi risiko untuk pengembangan dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana
Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana	• Belum memadainya sistem peringatan dini, <i>data base</i> kebencanaan, rencana kontinjensi dan kebijakan operasionalnya
	• Belum memadainya adopsi dan penerapan strategi pengurangan risiko bencana dan perencanaan di daerah
	• Masih lemahnya forum koordinasi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana
	• Belum memadainya pengalokasian sumber daya yang diperlukan di semua tingkat pemerintahan untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana
	• Masih lemahnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terpadu dalam pengurangan risiko bencana
	• Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana di seluruh sektor industri pariwisata

4.1.1. Tindakan Pra Bencana

Tindakan pra bencana meliputi berbagai upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Langkah-langkah ini termasuk:

✓ Pemetaan Risiko Bencana

Mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap bencana melalui analisis data historis dan geospasial. Pemetaan ini membantu dalam menentukan prioritas tindakan dan sumber daya yang diperlukan.

✓ **Penyusunan Rencana Kontingensi**

Membuat rencana tindakan darurat yang dapat diaktifkan saat bencana terjadi. Rencana ini mencakup prosedur evakuasi, alur komunikasi, dan koordinasi antar lembaga.

✓ **Edukasi dan Pelatihan**

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko bencana dan cara menghadapinya. Pelatihan ini mencakup simulasi bencana, penggunaan alat keselamatan, dan teknik pertolongan pertama.

4.1.2. Tindakan Pencegahan dan Mitigasi

Tindakan pencegahan dan mitigasi bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana dan meminimalkan dampaknya. Langkah-langkah ini termasuk:

- ✓ **Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana:** Membangun bangunan dan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti rumah tahan gempa, tanggul penahan banjir, dan sistem drainase yang baik.
- ✓ **Pengelolaan Lingkungan:** Melakukan reboisasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Ini termasuk penanaman pohon di daerah rawan longsor dan pengelolaan daerah aliran sungai.
- ✓ **Regulasi dan Kebijakan:** Menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pencegahan bencana, seperti zonasi wilayah rawan bencana, standar bangunan tahan bencana, dan peraturan pengelolaan lingkungan.

4.1.3. Tindakan Kesiapsiagaan

Tindakan kesiapsiagaan meliputi persiapan yang dilakukan untuk memastikan respons yang cepat dan efektif saat bencana terjadi. Langkah-langkah ini termasuk:

- ✓ **Sistem Peringatan Dini**
Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem peringatan dini untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebelum bencana terjadi. Sistem ini dapat berupa sirene, pesan teks, atau aplikasi mobile.
- ✓ **Latihan dan Simulasi**
Melakukan latihan dan simulasi bencana secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan petugas. Latihan ini mencakup skenario evakuasi, penyelamatan, dan tanggap darurat.
- ✓ **Penyediaan Sumber Daya**
Menyediakan peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk tanggap darurat, seperti alat komunikasi, kendaraan evakuasi, dan stok makanan serta obat-obatan.

4.2. Tindakan Tahap Saat Bencana

Berdasarkan kejadian bencana di Kabupaten Dharmasraya maka dapat dianalisis masalah penanggulangan bencana pada tahap Saat Bencana sebagaimana Tabel 4-2 berikut ini.

Tabel 4-2 Masalah Penanggulangan Bencana Tahap Saat Tanggap Darurat Kabupaten Dharmasraya

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
Koordinasi	• Belum maksimalnya koordinasi antar instansi
Kaji cepat	• Buruknya basis data korban, kerusakan, pengungsi, dan lain-lain.
Penyelamatan dan evakuasi	• Belum optimalnya sumber daya
	• Masih adanya kendala transportasi
	• Masih adanya kendala peralatan
	• Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia kebencanaan
Kebutuhan dasar	• Masih adanya kendala pengelolaan bantuan (petugas, manajemen, gudang)
	• Butuh sumber daya khusus tanggap darurat
Perlindungan	• Masih lemahnya perspektif gender dan kelompok rentan serta pemenuhan hak-hak dan kebutuhan
Pemulihan awal	• Masih terbatasnya pelayanan medis darurat
	• Belum optimalnya keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha

4.2.1. Tindakan Saat Bencana

Tindakan saat bencana meliputi langkah-langkah yang diambil selama bencana berlangsung untuk melindungi nyawa dan harta benda. Langkah-langkah ini termasuk:

✓ Evakuasi

Melakukan evakuasi masyarakat dari daerah berisiko tinggi ke tempat yang lebih aman. Proses evakuasi harus dilakukan dengan cepat dan terorganisir untuk menghindari kepanikan dan memastikan keselamatan semua orang.

✓ Penyelamatan dan Pertolongan

Melakukan operasi penyelamatan dan memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana. Tim penyelamat harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan terlatih dalam teknik penyelamatan.

✓ Komunikasi dan Koordinasi

Memastikan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Penggunaan teknologi komunikasi yang canggih dapat membantu dalam penyebaran informasi yang cepat dan akurat.

4.2.2. Tindakan Tanggap Darurat

Tindakan tanggap darurat meliputi respons cepat yang dilakukan untuk mengatasi dampak langsung dari bencana. Langkah-langkah ini termasuk:

✓ Penyediaan Bantuan Darurat

Menyediakan makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada korban bencana. Bantuan ini harus didistribusikan secara adil dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban.

✓ Pemulihan Infrastruktur Dasar

Memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik yang rusak akibat bencana. Pemulihan ini penting untuk memfasilitasi akses bantuan dan memulihkan aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat.

✓ **Pelayanan Kesehatan**

Memberikan pelayanan kesehatan darurat kepada korban bencana, termasuk perawatan medis, dukungan psikologis, dan pencegahan penyakit menular. Tim medis harus siap menangani berbagai kondisi kesehatan yang mungkin timbul akibat bencana.

4.3. Tahap Pasca Bencana

Berdasarkan kejadian bencana di Kabupaten Dharmasraya maka dapat dianalisis masalah penanggulangan bencana pada tahap Saat Bencana sebagaimana Tabel 4-3 berikut ini.

Tabel 4-3 Masalah Penanggulangan Bencana Tahap Pasca Bencana Kabupaten Dharmasraya

Aspek Pasca Bencana	Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pasca Bencana
Rehabilitasi	• Belum jelasnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rehabilitasi
	• Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
Rekonstruksi	• Belum lengkap dan akuratnya pendataan
	• Belum jelasnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rekonstruksi
	• Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi

4.3.1. Rekonstruksi

Tindakan rekonstruksi meliputi upaya untuk membangun kembali infrastruktur dan fasilitas yang rusak akibat bencana. Langkah-langkah ini termasuk:

- ✓ **Pembangunan Kembali Infrastruktur:** Membangun kembali bangunan, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang rusak. Proses ini harus memperhatikan standar konstruksi yang lebih tahan bencana untuk mengurangi risiko di masa depan.
- ✓ **Rehabilitasi Ekonomi:** Mendukung pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana melalui bantuan keuangan, program pemulihan ekonomi, dan pelatihan keterampilan baru. Ini termasuk bantuan kepada usaha kecil dan menengah untuk memulai kembali operasional mereka.
- ✓ **Pengembangan Kapasitas:** Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana di masa depan melalui pelatihan, edukasi, dan peningkatan kesadaran tentang risiko bencana.

4.3.2. Rehabilitasi

Tindakan rehabilitasi meliputi upaya untuk memulihkan kondisi sosial, dan lingkungan masyarakat yang terdampak bencana. Langkah-langkah ini termasuk:

- ✓ **Pemulihan Psikososial**
Memberikan dukungan psikososial kepada korban bencana untuk membantu mereka pulih dari trauma. Ini bisa berupa konseling, dukungan kelompok, dan kegiatan komunitas yang membantu mengembalikan rasa normalitas.
- ✓ **Pemulihan Lingkungan**
Melakukan upaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat bencana, seperti reboisasi, pembersihan puing-puing, dan restorasi ekosistem. Langkah ini penting untuk mengembalikan fungsi ekosistem dan mencegah bencana lanjutan.
- ✓ **Pemberdayaan Masyarakat**
Melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan pemberdayaan mereka untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan. Ini termasuk pelatihan keterampilan baru, pengembangan komunitas, dan peningkatan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi.

4.3.3. Pemulihan

Tindakan pemulihan dilaksanakan sebagai upaya dalam memulihkan kembali sarana dan prasarana serta pelayanan masyarakat untuk kembali terwujudnya kondusifitas kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat yang terdampak bencana. Langkah-langkah ini termasuk:

- ✓ **Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum**
Memperbaiki fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas air bersih yang rusak. Ini penting untuk memastikan bahwa layanan dasar dapat kembali berfungsi dan mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat.
- ✓ **Pemulihan Fungsi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
Memastikan bahwa fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dapat kembali berjalan dengan normal. Ini termasuk pemulihan administrasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.
- ✓ **Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik**
Mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat bencana, seperti perebutan sumber daya atau ketegangan sosial. Ini bisa dilakukan melalui mediasi, dialog komunitas, dan program rekonsiliasi.
- ✓ **Pemulihan Keamanan dan Ketertiban**
Memastikan keamanan dan ketertiban di daerah terdampak bencana untuk mencegah kejahatan dan kekacauan. Ini termasuk patroli keamanan, penegakan hukum, dan program keamanan komunitas.

BAB 5. MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA

5.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana

5.1.1. Keterkaitan Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Dharmasraya

Sebagai langkah pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana yang konsisten dan komprehensif, maka upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang tertera dalam dokumen perencanaan dilakukan. Adapun dokumen yang diperiksa mencakup rencana pembangunan dan rencana penanggulangan bencana pada level yang berbeda. Rencana pembangunan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Dharmasraya 2017-2022.

Selain itu, pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan spasial yakni Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya 2023-2043. Adapun untuk rencana penanggulangan bencana meliputi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 dan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2021-2025, adapun untuk level Kabupaten Dharmasraya, penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana.

5.1.2. Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya memiliki prevalensi bencana alam yang tidak terlalu tinggi. Meskipun demikian, bencana pada hakikatnya merupakan kejadian yang tidak pernah bisa diprediksikan secara tepat. Dengan demikian, Kabupaten Dharmasraya juga harus selalu berada dalam kondisi siap siaga untuk mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Beberapa kejadian banjir, tanah longsor dan angin puting beliung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya tidak sepenuhnya terhindar dari kejadian bencana. Berdasarkan hal-hal tersebut dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang memadai bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Dharmasraya, disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Dharmasraya dilandasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Secara garis besar beberapa pokok penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.3. Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kabupaten Dharmasraya

Kelembagaan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Dharmasraya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.

BPBD Kabupaten Dharmasraya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;⁶
- c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

5.2. Mekanisme Penanggulangan Bencana Secara Umum

Sesuai dengan Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa mekanisme penanggulangan bencana dilaksanakan dalam tiga tahapan:

- (i) tahap prabencana,
- (ii) tahap darurat bencana, dan
- (iii) tahap pasca bencana.

Pada setiap tahapan tersebut, dijelaskan bagaimana fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dapat memiliki fungsi koordinasi, komando, maupun pelaksana. Pada tahap prabencana, BPBD berfungsi sebagai koordinator dan pelaksana. Sementara pada tahap darurat bencana, BPBD berfungsi sebagai koordinator, pemberi komando dan pelaksana. Sedangkan pada tahap pasca bencana, BPBD berfungsi sebagai koordinator dan pelaksana.

5.2.1. Mekanisme Penanggulangan Bencana Tahap Pra Bencana

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pencegahan dan mitigasi antara lain:

- a. Menerbitkan peta wilayah rawan bencana.
- b. Memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana.
- c. Mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana.
- d. Mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
- e. Membuat bangunan yang berguna untuk mengurangi dampak bencana.
- f. Membentuk pos-pos siaga bencana.
- g. Mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga.
- h. Mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman

Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Pelaksanaan kegiatan

kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk:

- a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. Penyiapan lokasi evakuasi;
- f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemulihan prasarana dan sarana.

Peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan dengan cara:

- a. Mengamati gejala bencana;
- b. Menganalisa data hasil pengamatan;
- c. Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
- d. Menyebarkan hasil keputusan; dan
- e. Mengambil tindakan oleh masyarakat.

Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal. Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini. Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
- b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- c. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

5.2.2. Mekanisme Penanggulangan Bencana Tahap Saat Bencana

Pada saat bencana (tanggap darurat), penyelenggaraan operasi darurat bencana dilaksanakan berdasarkan rencana tanggap darurat (RTD) yang sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 24 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya memiliki kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan. Dalam pelaksanaan fungsi komando, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.

Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana dapat melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan berwenang untuk mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. Adapun mekanisme komando

penanganan darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Mekanisme penanggulangan bencana saat tanggap darurat juga mengikuti tahapan kegiatan yakni :

5.2.2.1. *Pengkajian secara Cepat dan Tepat terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian, dan Sumber Daya*

Penyelenggaraan pengkajian secara cepat dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan kewenangannya.

5.2.2.2. *Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana*

Penentuan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Dharmasraya dilakukan oleh Bupati Dharmasraya dimana Pada saat keadaan darurat, Kepala BPBD Kabupaten Dharmasraya berwenang mengarahkan (meminta, menerima, menggunakan sumber daya manusia, peralatan, maupun logistik dari instansi/lembaga maupun dari masyarakat. Pada fase tanggap darurat, fungsi komando dan pelaksana dilakukan oleh BPBD Kabupaten Dharmasraya.

Dalam hal ini, BPBD juga memiliki kemudahan akses untuk :

- (i) pengerahan sumber daya manusia,
- (ii) pengerahan peralatan,
- (iii) pengerahan logistik,
- (iv) imigrasi, cukai, dan karantina,
- (v) perizinan,
- (vi) pengadaan barang/jasa,
- (vii) pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang,
- (viii) penyelamatan, serta
- (ix) komando untuk memerintahkan instansi maupun lembaga).

Upaya pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan sesuai pada tahapan kaji cepat. Permohonan sumber daya manusia, peralatan maupun logistik ke instansi/lembaga terkait diikuti dengan penunjukan seorang pejabat dari instansi/lembaga terkait yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Apabila sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Kabupaten Dharmasraya yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari kabupaten/kota tetangga yang mengirimkan bantuan.

Apabila sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota tetangga tidak tersedia/tidak memadai, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD Kabupaten Dharmasraya.

Proses pengadaan barang/jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tanggap darurat dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana. Adapun peralatan dan/jasa yang dapat dilakukan proses pengadaannya antara lain meliputi peralatan dan/jasa untuk

pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, maupun tempat penampungan dan hunian sementara.

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dengan persetujuan Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. Dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana, BPBD Kabupaten Dharmasraya dapat menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD Kabupaten Dharmasraya dan ditempatkan dalam anggaran BPBD Kabupaten Dharmasraya.

Adapun ketentuan rinci mengenai sumber dan penggunaan dana siap pakai untuk bencana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana serta Peraturan Kepala BNPB No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.

5.2.2.3. *Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat terkena Bencana;*

Upaya penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana merupakan salah satu aksi dalam tahapan tanggap darurat. Dalam hal ini, Kepala BPBD Kabupaten Dharmasraya memiliki kewenangan dalam konteks pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dengan menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa dan/atau yang dapat mengganggu proses penyelamatan. Selain itu, Kepala BPBD Kabupaten Dharmasraya juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi.

Kepala BPBD sebagai komandan penanggulangan bencana memiliki kewenangan untuk mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi, serta memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada pimpinan instansi/badan terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Upaya pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dapat dihentikan apabila seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi, atau setelah jangka waktu tujuh hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan. Upaya penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana. Detail teknis untuk pencarian, pertolongan dan evakuasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No.13 tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi.

5.2.2.4. *Pemenuhan Kebutuhan Dasar*

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan serta tempat hunian

Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

5.2.2.5. *Perlindungan terhadap Kelompok Rentan*

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

5.2.2.6. *Pemulihan dengan segera Prasarana dan Sarana Vital*

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. Adapun Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 12 tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat.

5.2.3. *Mekanisme Penanggulangan Bencana Tahap Pasca Bencana*

Penyelenggaraan operasi tanggap darurat bencana setelah selesai dilakukan, atau masa tanggap darurat dinyatakan selesai, maka segera dilaksanakan pemulihan sesuai peraturan yang berlaku dari BNPB khususnya dan lembaga terkait yang berwenang atau diberikan kewenangan. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana mengikuti PerKa BNPB No. 17 tahun 2010 tentang pedoman umum penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasca tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai dengan penilaian kerusakan dan kerugian. Penilaian kerusakan melihat pada sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan sektor lain misalnya pemerintahan. Penilaian kerugian mencakup semua perkiraan biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya bencana. Penilaian kerugian dapat meliputi biaya tambahan yang dikeluarkan untuk transpor akibat jalan atau jembatan putus; dan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk sewa rumah karena rumahnya rusak/hancur.

Selain penilaian kerugian dan kerusakan, pada tahap pasca bencana juga dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU Pasna). Pengkajian tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat (total) dari akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata pemerintahan.

Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam JITU Pasna berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengacu pada kebutuhan pemulihan awal adalah rangkaian kegiatan mendesak yang harus dilakukan saat berakhirnya masa tanggap darurat dalam bentuk pemulihan fungsi-fungsi dasar kehidupan bermasyarakat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kebutuhan pemulihan awal ini dapat berupa kebutuhan fisik dan non fisik. Pembangunan yang berkelanjutan menjadi orientasi dalam pemenuhan kebutuhan pemulihan awal, misalnya pemulihan layanan Puskesmas, pasar kebutuhan pokok, dan akses ke layanan publik.

BAB 6. ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA

6.1. Kegiatan Yang Dilakukan

6.1.1. *Rencana Aksi Program Penanggulangan Bencana*

Hasil analisis isu kebencanaan prioritas di Kabupaten Dharmasraya sejalan dengan isu prioritas pada Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 terdiri empat poin utama, yakni :

- (i) masih perlunya penguatan dan harmonisasi sistem, peraturan dan tata kelola kelembagaan bencana ;
- (ii) masih terbatasnya upaya perencanaan penanggulangan bencana terpadu dan sinergis antar pemangku kebijakan;
- (iii) belum mencukupinya upaya pengurangan risiko bencana berbasis penelitian, pendidikan dan pelatihan ; dan
- (iv) terbatasnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu,
- (v) perlunya penanganan tematik kawasan rawan bencana yang disesuaikan dengan ancaman prioritas yang ada di wilayah, yakni banjir, kekeringan, longsor, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan.

Sejalan dengan sistem nasional penanggulangan bencana Indonesia yang memiliki 5 (lima) pilar berupa sub-sistem legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan dan pembangunan kapasitas, strategi penanggulangan bencana Kabupaten Dharmasraya dibangun untuk menjawab permasalahan yang dihadapi saat ini. Adapun strategi penanggulangan bencana Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

- 1) penguatan kerangka regulasi dan kapasitas kelembagaan;
- 2) perencanaan penanggulangan bencana terpadu;
- 3) penguatan penelitian, pendidikan dan pelatihan untuk pengurangan risiko bencana;
- 4) peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lain dalam pengurangan risiko bencana, serta
- 5) strategi penanganan tematik kawasan rawan bencana.

Rencana Aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari Program Penanggulangan Bencana, Fokus, Prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024-2029. Rencana Aksi merupakan komitmen dari Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana. Secara spesifik dan mendalam rencana aksi penanggulangan yang dirumuskan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Ada beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, yaitu:

- 1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana disusun pada tingkat daerah/kota;
- 2. Rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, OPD, yang dikoordinasikan dengan BPBD Kabupaten Dharmasraya.
- 3. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD.

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Rencana aksi disusun dalam suatu kerangka program yang mengedepankan aspek-aspek penting yang perlu segera ditangani. Upaya tersebut tersusun di dalam program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi pengurangan risiko bencana. Program – program tersebut disusun berdasarkan kebijakan strategis dan fokus prioritas yang ada di Kabupaten Dharmasraya terkait pengurangan risiko bencana (Tabel 6.1).

Tabel 6-1 Rencana Aksi

STRATEGI	SASARAN	PROGRAM
• Peningkatan Kapasitas Masyarakat • Mengadakan program edukasi dan pelatihan rutin tentang mitigasi bencana di sekolah, komunitas, dan tempat kerja. • Mengembangkan dan menyebarluaskan sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui aplikasi mobile dan media sosial. • Penguatan Infrastruktur • Membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan bangunan publik agar tahan terhadap gempa, banjir, dan bencana lainnya. • Mengembangkan sistem drainase yang efektif untuk mengurangi risiko banjir, termasuk pembersihan rutin saluran air dan pembangunan kolam retensi. • Pengelolaan Lingkungan • Melakukan reboisasi di daerah rawan longsor dan penghijauan di daerah perkotaan dan pedesaan untuk mengurangi risiko bencana alam. • Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk pengendalian penebangan liar dan pengelolaan lahan pertanian yang ramah lingkungan. • Koordinasi dan Kerjasama • Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan tim koordinasi.	• Masyarakat yang Siap dan Tangguh • Masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi bencana. • Masyarakat memiliki akses ke informasi dan peringatan dini yang akurat dan tepat waktu. • Infrastruktur yang Tahan Bencana • Infrastruktur publik dibangun atau diperbaiki sesuai dengan standar ketahanan bencana. • Sistem drainase yang efektif untuk mengurangi risiko banjir dan genangan air. • Lingkungan yang Terlindungi • Daerah rawan bencana mengalami peningkatan tutupan vegetasi melalui program reboisasi dan penghijauan. • Sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana alam. • Koordinasi yang Efektif • Terjalannya kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. • Dukungan Internasional: Mendapatkan dukungan teknis dan finansial dari pihak internasional untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana.	• Program Pendidikan dan Pelatihan Bencana • Pelatihan untuk masyarakat tentang cara menghadapi bencana, termasuk simulasi evakuasi dan penggunaan alat keselamatan. • Menyediakan materi edukasi tentang risiko bencana di sekolah-sekolah dan melalui media massa. • Program Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana • Pembangunan Jembatan dan Jalan yang tahan terhadap gempa dan banjir, serta memperbaiki infrastruktur yang rusak. • Memperbaiki bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan agar sesuai dengan standar ketahanan bencana. • Program Pengelolaan Lingkungan • Melakukan reboisasi di daerah rawan longsor untuk mengurangi risiko tanah longsor. • Mengembangkan program penghijauan di daerah perkotaan dan pedesaan untuk meningkatkan tutupan vegetasi dan mengurangi risiko bencana. • Program Koordinasi dan Kerjasama • Membentuk tim koordinasi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten yang terdiri dari perwakilan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. • Mengadakan pertemuan rutin dengan lembaga non-pemerintah dan masyarakat untuk membahas strategi penanggulangan bencana dan evaluasi program yang telah berjalan.

Berikut adalah pendekatan yang diimplementasikan dalam strategi penanganan tematik kawasan rawan bencana berdasarkan 5 prioritas bencana di Kabupaten Dharmasraya:

1. Banjir

- **Strategi**
 - Membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti tanggul, kanal, dan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir.
 - Melakukan reboisasi dan penghijauan di sepanjang DAS untuk mengurangi erosi dan meningkatkan kapasitas penyerapan air.
 - Mengembangkan sistem peringatan dini banjir yang dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi mobile dan media sosial.
- **Program**
 - Membangun tanggul dan kanal di daerah rawan banjir.
 - Melakukan reboisasi di sepanjang DAS yang kritis.
 - Mengadakan pelatihan dan simulasi evakuasi banjir untuk masyarakat.

2. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

- **Strategi**
 - **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pembakaran lahan.
 - **Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran:** Meningkatkan kapasitas dan peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan.
 - **Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan lahan.
- **Program**
 - **Patroli dan Pengawasan:** Melakukan patroli rutin di daerah rawan kebakaran.
 - **Pelatihan Pemadam Kebakaran:** Mengadakan pelatihan untuk tim pemadam kebakaran hutan dan lahan.
 - **Kampanye Kesadaran:** Mengadakan kampanye kesadaran tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan.

3. Cuaca Ekstrem

- **Strategi**
 - **Penguatan Infrastruktur:** Memperkuat infrastruktur publik seperti jembatan, jalan, dan bangunan agar tahan terhadap cuaca ekstrem.
 - **Sistem Peringatan Dini:** Mengembangkan sistem peringatan dini cuaca ekstrem yang dapat diakses oleh masyarakat.
 - **Edukasi dan Pelatihan:** Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang cara menghadapi cuaca ekstrem.
- **Program**
 - **Perbaikan Infrastruktur:** Memperbaiki dan memperkuat infrastruktur yang rentan terhadap cuaca ekstrem.
 - **Sistem Peringatan Dini:** Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi peringatan dini cuaca ekstrem.
 - **Pelatihan Masyarakat:** Mengadakan pelatihan tentang cara menghadapi cuaca ekstrem.

4. Tanah Longsor

- **Strategi**
 - **Reboisasi dan Penghijauan:** Melakukan reboisasi di daerah rawan longsor untuk meningkatkan stabilitas tanah.
 - **Pembangunan Infrastruktur Penahan Longsor:** Membangun infrastruktur seperti dinding penahan dan terasering di daerah rawan longsor.
 - **Sistem Peringatan Dini:** Mengembangkan sistem peringatan dini tanah longsor yang dapat diakses oleh masyarakat.
- **Program**
 - **Reboisasi Daerah Rawan Longsor:** Melakukan reboisasi di daerah rawan longsor.
 - **Pembangunan Dinding Penahan:** Membangun dinding penahan di daerah rawan longsor.
 - **Pelatihan dan Simulasi:** Mengadakan pelatihan dan simulasi evakuasi tanah longsor untuk masyarakat.

5. Kekeringan

- **Strategi**
 - **Pengelolaan Sumber Daya Air:** Mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan.
 - **Pembangunan Infrastruktur Penyimpanan Air:** Membangun infrastruktur seperti embung dan waduk untuk menyimpan air.
 - **Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air.
- **Program**
 - **Pembangunan Embung dan Waduk:** Membangun embung dan waduk di daerah rawan kekeringan.
 - **Pengelolaan Air Irigasi:** Mengembangkan sistem irigasi yang efisien.
 - **Kampanye Konservasi Air:** Mengadakan kampanye kesadaran tentang pentingnya konservasi air.

6.1.1.1. Banjir

Strategi penanganan banjir adalah proses keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan untuk menangani air yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai maupun karena pengundulan hutan disepanjang sungai sehingga tidak merusak rumah rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa.

Tabel 6-2 Sasaran dan Program dalam Pencegahan dan Mitigasi Banjir

NO	SASARAN	PROGRAM
	1. Pengurangan Risiko Banjir 2. Mengurangi frekuensi dan dampak banjir di daerah rawan. 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi banjir.	
	Peningkatan Infrastruktur - Membangun dan memperbaiki infrastruktur yang tahan terhadap banjir. - Mengembangkan sistem drainase yang efektif dan efisien.	Program Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur - Pembangunan Tanggul dan Kanal: Membangun tanggul dan kanal di daerah rawan banjir untuk mengendalikan aliran air. - Perbaikan Sistem Drainase: Memperbaiki dan membersihkan saluran drainase secara berkala untuk mencegah penyumbatan. - Pembangunan Embung dan Waduk: Membangun embung dan waduk untuk menyimpan air hujan dan mengurangi risiko banjir.
	Pengelolaan Lingkungan - Meningkatkan tutupan vegetasi di daerah aliran sungai (DAS). - Mengelola tata ruang yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir.	Program Pengelolaan Lingkungan - Reboisasi dan Penghijauan: Melakukan reboisasi di sepanjang DAS dan penghijauan di daerah perkotaan dan pedesaan. - Pengelolaan Tata Ruang: Menetapkan daerah resapan air dan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai serta mengendalikan alih fungsi lahan
	Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan banjir. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi banjir.	Program Edukasi dan Kesadaran Masyarakat - Mengadakan kampanye kesadaran tentang pentingnya pencegahan banjir dan perilaku hidup bersih. - Mengadakan pelatihan dan simulasi evakuasi banjir untuk masyarakat. - Mengembangkan dan menyebarkan sistem peringatan dini banjir yang dapat diakses oleh masyarakat
	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam penanggulangan banjir.	Program Koordinasi dan Kerjasama Mengembangkan kerjasama antar pemerintah dan dengan lembaga donor ataupun perguruan tinggi untuk mendapatkan bantuan teknis dan finansial

6.2. Pelaku Kegiatan

6.2.1. Identifikasi Pelaku Kegiatan

Dalam proses pengurangan Kabupaten Dharmasraya, pelaku kegiatan yang terlibat dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan model Pentahelix, yaitu pemerintah, media massa, lembaga non-pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku bisnis. Kelima kelompok ini diharapkan bisa berinteraksi untuk saling mendukung fungsi masing-masing agar lebih optimal. Permasalahan kebencanaan yang multi-dimensi mengharuskan para pihak untuk saling bekerja sama. Kelompok-kelompok para pihak tersebut dijelaskan dan didetailkan sebagai berikut.

6.2.1.1. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran dan wewenang terbesar dalam PRB. Di samping memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, pemerintah juga memiliki dukungan berbagai sumber daya, yang salah satunya adalah sumber dana. Di samping itu, terdapat personil pemerintah di berbagai sektor dan lembaga juga memiliki keuntungan tersendiri bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam usaha untuk penanggulangan bencana.

Di Kabupaten Dharmasraya, peran institusi pemerintah dibagi ke dalam berbagai lembaga (Organisasi Perangkat Daerah atau OPD) yang fungsi dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dalam usaha penanggulangan risiko bencana, beberapa lembaga pemerintah berikut memiliki fungsi yang besar tidak hanya di dalam fase pra bencana, tetapi juga pada saat terjadinya bencana dan setelahnya. Lembaga tersebut antara lain:

1. Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
2. Badan Keuangan Daerah
3. Badan Kesbangpol
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Pangan dan Perikanan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
16. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian)
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat
20. Kecamatan
21. PLN
22. TNI (KODIM)

23. Polisi (Polres)
24. Badan Pusat Statistik
25. UPT SPAM
26. PT Telkom
27. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya
28. BMKG

6.2.1.2. Media massa

Media massa pada saat ini bergerak utamanya pada bidang diseminasi informasi. Diseminasi bisa berbentuk media cetak, elektronik, dan media internet. Dalam hubungannya dengan PRB, media sangat besar perannya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait berhubungan dengan berbagai hal yang memiliki potensi bencana dan juga pada saat terjadinya bencana. Jadi, dalam hal berkaitan dengan kebencanaan, media massa sangat besar fungsinya untuk membuka kesadaran masyarakat dan pihak terkait akan hal-hal yang berpotensi untuk menjadi bencana yang pada akhirnya akan bisa mengurangi kerusakan dan kerugian, baik kerugian materil maupun non materil, pada saat bencana terjadi. Berkembangnya internet dan sistem informasi membawa dampak baik bagi kemudahan dalam diseminasi berbagai kegiatan dan upaya dalam menghadapi bencana, baik pada pra, saat, dan pasca bencana.

6.2.1.3. Lembaga non pemerintah

Lembaga non-pemerintah dalam hal ini tidak hanya berbentuk Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sudah sejak lama berperan sangat baik dalam usaha penanggulangan bencana. Lembaga tersebut tidak hanya lembaga non-pemerintah yang berasal dari Indonesia, namun juga Lembaga yang sama yang berpusat di luar negeri atau di Indonesia yang berkegiatan di dalam wilayah Indonesia. Sejak beberapa dekade lalu, lembaga non pemerintah sudah menjadi partner pemerintah dalam berbagai upaya pembangunan dan penanganan bencana.

Di samping LSM, perlu juga dipertimbangkan keterlibatan yang besar dari komunitas, baik itu komunitas skala lokal maupun yang lebih besar. Bersama-sama dengan LSM, berbagai komunitas lokal bisa mengambil peran dalam kegiatan volunteerisme dan dukungan kegiatan lainnya. Dukungan tidak hanya dalam bentuk material, namun juga dalam bentuk tenaga maupun ide. Dalam perjalanan penanggulangan bencana, lembaga non pemerintahan maupun komunitas bisa diberdayakan dengan terlebih dahulu mendapatkan pendampingan yang tepat dalam berbagai usaha yang akan dilaksanakan pada setiap tahapan penanggulangan bencana. Beberapa lembaga yang dilibatkan ke dalam PRB adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Kampung Tangguh Bencana, dan lembaga-lembaga filantropi.

6.2.1.4. Perguruan tinggi

Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam kegiatan penanggulangan risiko bencana (PRB) sangat penting khususnya dalam mengembangkan berbagai kegiatan pengembangan keilmuan dan praktis terkait dengan penanggulangan bencana. Sebagai lembaga yang memproduksi ilmu dan berbagai inovasi teknologi, keberadaan perguruan tinggi di dalam PRB diharapkan dapat memperkuat pencapaian usaha PRB di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini menempatkan perguruan tinggi sebagai salah satu kelompok yang harus terlibat dalam PRB. Salah satu lembaga di perguruan tinggi yang dapat dilibatkan ke dalam kegiatan PBK Kabupaten Dharmasraya adalah

6.2.1.5. Pelaku bisnis

Pelaku bisnis memiliki peran besar di dalam penanggulangan bencana. Kemampuan pelaku bisnis dalam mengembangkan teknologi tepat guna yang mungkin berhubungan dengan berbagai jenis bencana di suatu daerah, dan dukungan pendanaan yang cukup untuk mendukung kegiatan masyarakat dan pemerintah merupakan beberapa alasan bahwa keterlibatan pelaku bisnis sangat penting. Keterlibatan pelaku bisnis bisa dalam bentuk skema CSR (Corporate Social Responsibility) atau bantuan lainnya. Selain itu, kerja sama antara pelaku bisnis dan pemerintah daerah tidak jarang memperkuat pencapaian RPB dan sekaligus memperluas keterjangkauan dan kedalaman intervensi kegiatan di berbagai kelompok atau daerah yang potensial terdampak bencana. Beberapa pelaku bisnis yang dapat diidentifikasi di Kabupaten Dharmasraya antara lain adalah Bank Nagari, Bank BRI, dan pelaku bisnis lainnya.

6.2.2. Pembagian Peran

Pembagian peran dalam PRB harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing pihak. Di samping itu, peran yang diemban masing-masing pihak harus dirumuskan secara sistematis agar tidak ada tumpang tindih tanggung jawab dan peran. Selain itu, pembagian peran yang tepat akan meningkatkan ketercapaian target kegiatan dan rencana yang sudah disusun.

6.2.2.1. Pemerintah

Pemerintah merupakan penanggung jawab utama dalam usaha penanggulangan bencana. di Kabupaten Dharmasraya, peran ini diemban oleh BPBD Kabupaten Dharmasraya. Selain pada peran utama tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga berperan untuk:

- a) Menetapkan berbagai indikator, target, dan anggaran dalam usaha penanggulangan bencana
- b) Merencanakan dan melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana daerah
- c) Memproduksi dan mengumpulkan data-data sektoral dan spasial terkait usaha penanggulangan bencana
- d) Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah lintas sektor dan pihak di luar pemerintah yang akan melaksanakan berbagai kegiatan terkait penanggulangan bencana
- e) Mengedukasi masyarakat tentang kebencanaan dan kondisi bencana di Kabupaten Dharmasraya
- f) Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan penanggulangan bencana daerah
- g) Menyiapkan regulasi untuk mendukung kegiatan PRB
- h) Menyiapkan model dan kegiatan berbasis integrasi kegiatan PRB dengan pihak di luar Lembaga pemerintah
- i) Mengidentifikasi dan menyiapkan sumber daya manusia (aparatur) penanggulangan bencana
- j) Menyebarluaskan kegiatan dan usaha PRB kepada semua pihak, termasuk masyarakat

- k) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat.

Selain Pemerintah Kota dan OPD, TNI dan Polri juga berperan penting dalam PRB dalam hal taktis, antara lain membantu pada kondisi darurat dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI dan Polri juga berkoordinasi dengan pemerintah kota dan OPD dalam upaya tanggap darurat bencana atau diseminasi kebencanaan kepada masyarakat.

6.2.2.2. Media massa

Pada era kemudahan informasi saat ini, peran media massa sangat penting dalam membangun opini publik terkait kebencanaan di Kabupaten Dharmasraya. Salah satu peran besar yang bisa dilakukan oleh media massa adalah dengan menyebarkan informasi kebencanaan pada berbagai lokasi dan kajian-kajian akademik terkait dengan kebencanaan secara berkala. Di samping itu, media massa juga bisa berperan di level lokal dengan menyampaikan informasi dan kondisi kebencanaan yang dialami oleh masyarakat.

6.2.3. Lembaga non pemerintah

Peran lembaga non pemerintah atau LSM dalam usaha penanggulangan risiko bencana di daerah sangat krusial. Berbagai kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain kegiatan pendampingan berkala kepada masyarakat lokal, bisa dilaksanakan oleh LSM. Kedekatan LSM dengan masyarakat memberikan nilai lebih pada efektivitas penyampaian informasi kebencanaan yang biasanya tidak optimal dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Beberapa peran lembaga non pemerintah dalam usaha penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan dukungan kepada pemerintah dalam hal penyampaian informasi terkait kebencanaan kepada masyarakat dan pihak luar pemerintah lainnya yang terkait
- b) Melakukan advokasi dan model komunikasi lainnya kepada pemerintah dalam rangka mengoptimalkan fungsi lembaga pemerintah
- c) Menyiapkan berbagai sumber daya (manusia) dalam upaya penanganan bencana di Kabupaten Dharmasraya, baik pada saat fase pra bencana, saat terjadinya bencana, maupun setelah bencana.
- d) Memberikan dukungan praktis terhadap kegiatan-kegiatan lembaga lain dalam upaya penanggulangan bencana.
- e) Bersama-sama dengan pihak lain dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

6.2.3.1. Perguruan tinggi

Perguruan tinggi dan akademisi sudah sejak lama berperan penting dalam upaya penanggulangan bencana di berbagai daerah. Dalam upaya yang sama di Kabupaten Dharmasraya, perguruan tinggi dan akademisi dapat memiliki peran utama sebagai perumus, penilai, dan mitra akademik bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana.

Selain hal di atas, beberapa peran yang bisa dijalankan oleh perguruan tinggi adalah:

- a) Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan masyarakat dalam upaya menyusun rencana dan pelaksanaan PRB
- b) Membantu pemerintah dan pihak lainnya dalam berbagai upaya terkait PRB yang diinisiasi atau dilaksanakan oleh pihak lainnya
- c) Melaksanakan berbagai kegiatan akademik dan penelitian di Kabupaten Dharmasraya yang berkaitan dengan berbagai isu kebencanaan

6.2.3.2. Pelaku bisnis

Pelaku bisnis dan lembaga filantropi dapat berperan utamanya dalam hal pengalokasian sumber daya dan sumber dana dalam upaya PRB di Kabupaten Dharmasraya. Beberapa peran yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis dan lembaga filantropi di Kabupaten Dharmasraya adalah:

- a) Mengalokasikan sumber daya dan sumber dana yang berkelanjutan dalam upaya PRB
- b) Menginisiasi berbagai kegiatan berkaitan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam PRB
- c) Memberikan dukungan kepada lembaga pemerintah dan pihak lainnya pada kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

Selain kelima aktor tersebut di atas, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) merupakan institusi penting di suatu wilayah yang dapat mengawal kegiatan pengurangan risiko bencana. FPRB merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana terdiri dari perwakilan lembaga usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, donor, organisasi profesi/keahlian, legislatif, yudikatif, dan organisasi perangkat daerah, serta relawan penanggulangan bencana. FPRB merupakan mitra dari Badan Penanggulangan Bencana baik di level provinsi maupun kabupaten/kota untuk bersama mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana di wilayah.

6.3. Sumber Pendanaan

6.3.1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

1. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (6 huruf e).
2. Anggaran penanggulangan bencana dialokasikan dalam bentuk dana siap pakai pasal (6 huruf f).
3. Dana penanggulangan bencana dialokasikan dalam APBD secara proporsional dan memadai (pasal 8 huruf d).
4. Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah (pasal 60 ayat 1).
5. Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat (pasal 60 ayat 2).
6. kemudian di pasal 61 ayat 1 dijelaskan bahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, huruf f dan pasal 8 huruf d (pasal 61 ayat 1).

6.3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

- a. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana (pasal 1 ayat 1);
- b. Penjelasan mengenai dana kontingensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah (1 ayat 4, 5, dan 6);
 - 1) Dana kontingensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu (pasal 1 ayat 4).
 - 2) Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir (pasal 1 ayat 5).
 - 3) Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana (pasal 1 ayat 6).
- c. Pada pasal 4 dijelaskan penanggung jawab dan sumber-sumber dana penanggulangan bencana yaitu :
 - 1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah yang (pasal 4 ayat 1).
 - 2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 bersumber dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat (pasal 4 ayat 2).
- d. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana (pasal 10 ayat 2)
- e. Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi: a) tidak terjadi bencana, dan b) terdapat potensi terjadinya bencana pasal 12
- f. Pada pasal 13 dijelaskan penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 huruf a meliputi :
 - 1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - 2) program pengurangan risiko bencana;
 - 3) program pencegahan bencana;
 - 4) panduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
 - 5) penyusunan analisis risiko bencana;
 - 6) fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - 7) penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - 8) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- g. Pada Pasal pasal 14 dijelaskan penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b yang meliputi:
 - 1) kegiatan kesiapsiagaan,
 - 2) pembangunan sistem peringatan dini, dan
 - 3) kegiatan mitigasi bencana.
- h. Pada Pasal 15 ayat 1 dijelaskan penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi :

- 1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/ Lembaga terkait,
 - 2) dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran BNPB, dan
 - 3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.
- i. Di pasal 16 dijelaskan bahwa penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya,
 - 2) kegiatan penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana,
 - 3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana,
 - 4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan, dan
 - 5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
 - j. Terkait dengan penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b pada pasal 17 ayat 1 ditetapkan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
 - k. Lebih detilnya pada pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - 1) pencarian dan penyelamatan korban bencana
 - 2) pertolongan darurat
 - 3) evakuasi korban bencana
 - 4) kebutuhan air bersih dan sanitasi
 - 5) pangan
 - 6) sandang
 - 7) pelayanan kesehatan, dan
 - 8) penampungan serta tempat hunian sementara.
 - l. Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB (pasal 17 ayat 3).
 - m. Pada pasal 18 disebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis.
 - n. Pasal 20 menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan: a) rehabilitasi, dan b) rekonstruksi.
 - o. Pada pasal 21 menjelaskan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a meliputi:
 - 1) perbaikan lingkungan daerah bencana
 - 2) perbaikan prasarana dan sarana umum
 - 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
 - 4) pemulihan sosial psikologis
 - 5) pelayanan kesehatan
 - 6) rekonsiliasi dan resolusi konflik
 - 7) pemulihan sosial ekonomi budaya
 - 8) pemulihan keamanan dan ketertiban
 - 9) pemulihan fungsi pemerintahan, atau
 - 10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

- p. Sedangkan pada pasal 22 dijelaskan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b meliputi:
- 1) pembangunan kembali prasarana dan sarana
 - 2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
 - 3) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
 - 4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
 - 5) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
 - 6) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
 - 7) peningkatan fungsi pelayanan public, atau
 - 8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

6.3.3. *Penggunaan Dana*

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

6.4. *Monitoring dan Evaluasi*

6.4.1. *Pengawasan dan Evaluasi*

Upaya pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan program agar sesuai dengan rencana yang telah disusun, sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang ada agar dapat mengambil langkah tindakan sedini mungkin untuk penyelesaian masalah tersebut. Pengawasan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan anggaran, realisasi pencapaian target luaran dan kendala yang dihadapi. Pemantauan yang dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat mengenai implementasi kegiatan, kinerja program maupun luaran yang dicapai.

Pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan asas :

- (i) efisiensi,
- (ii) efektivitas,
- (iii) kemanfaatan,
- (iv) dampak, maupun
- (v) keberlanjutannya.

Kegiatan pengawasan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kegiatan pengawasan dilaporkan setiap enam bulan sekali. Adapun kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilaksanakan untuk melihat luaran kegiatan baik berupa barang maupun jasa atau lainnya yang memberikan dampak/manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan mengidentifikasi setiap kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian indikator kegiatan.

6.4.2. *Pelaporan*

Implementasi program dan kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam suatu laporan tertulis dengan maksud agar semua data dan informasi kebencanaan dapat terdokumentasi dengan baik dan secara resmi dikeluarkan oleh BPBD Kabupaten Dharmasraya.

Laporan tertulis tersebut berisi laporan kegiatan, pencapaian kegiatan, serta evaluasi keberhasilan dan/atau kegagalan program yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2024 hingga 2029. Adapun rekomendasi untuk pemangku kebijakan terkait dapat dilaporkan untuk perbaikan apabila diperlukan.

6.4.3. Mekanisme Pembaruan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tertuang pada pasal 6 ayat (6) bahwa Rencana Penanggulangan Bencana ditinjau secara periodik setiap dua tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Evaluasi ini memiliki maksud untuk melihat sejauh mana pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana, maupun mengidentifikasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi program dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Oleh karenanya, pada akhir tahun kedua dan akhir tahun keempat pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dharmasraya harus mengkoordinasikan upaya peninjauan terhadap program yang tengah dan sudah dilakukan dengan pelibatan seluruh pemangku kebijakan terkait bidang kebencanaan. Adapun hasil evaluasi dipergunakan sebagai masukan untuk proses pembaruan terhadap Rencana Penanggulangan Bencana yang sedang berjalan. Terakhir, di akhir tahun kelima, harus dilaksanakan evaluasi akhir secara komprehensif untuk melihat pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana yang akan dipergunakan sebagai perbaikan dan rekomendasi terhadap penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana periode selanjutnya.

BAB 7. PENUTUP

Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penanggulangan bencana dilakukan melalui mekanisme Rencana Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen hidup yang disusun untuk periode waktu perencanaan sejak tahun 2024 hingga 2029. Dalam pelaksanaannya, Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dharmasraya membutuhkan koordinasi dan komitmen kuat baik secara teknis maupun politis. Untuk itu, upaya advokasi diperlukan untuk membangun komitmen antar pemangku kepentingan agar secara optimal dapat melaksanakan apa yang tertulis di Rencana Penanggulangan Bencana pada seluruh jenjang pada periode waktu 2024 hingga 2029 di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini tentunya tidak terlepas dari evaluasi periodik dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya maupun perubahan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, maupun politis yang dapat mempengaruhi terjadinya bencana. Kabupaten Dharmasraya berusaha untuk mewujudkan budaya aman dari bencana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang Maju, Mandiri, dan Berbudaya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2042
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana

Buku/Dokumen :

- BNPB. 2015. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. Jakarta: JICA-BNPB.
- BNPB. 2016. Risiko Bencana Indonesia. Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. 2020. Indeks Risiko Bencana Indonesia. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. 2020. Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Versi 3.0. Jakarta : BNPB.
- BPS. 2020. Kabupaten Dharmasraya dalam Angka Tahun 2020.
- BPS. 2021. Kabupaten Dharmasraya dalam Angka Tahun 2021.
- BPS. 2022. Kabupaten Dharmasraya dalam Angka Tahun 2021.
- BPS. 2023. Kabupaten Dharmasraya dalam Angka Tahun 2023.
- BPS. 2024. Kabupaten Dharmasraya dalam Angka Tahun 2024.